



**PENOLAKAN OTONOMI KHUSUS OLEH PEMERINTAH
THAILAND DI THAILAND SELATAN**

***(Rejection Of Special Autonomy By The Thai Government In Southern
Thailand)***

diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan gelar Sarjana pada Jurusan
Hubungan Internasional

SKRIPSI

Oleh :

Elisabet Elfadani

210910101013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
JEMBER
2026**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dipersembahkan kepada:

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jember
2. Ayah Abdul Wafa M.Ag, Ibu Komroin S. Pd, dan Adik Kevin Elfadani serta Adik Nawfal Elfadani selaku keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
3. Bapak Himawan Bayu Patriadi S.Sos., M.A., Ph.D dan Bapak Honest Dody Molasy, S.Sos., M.A., CIQaR., CIQnR., CRP. yang telah berkontribusi dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Keluarga besar ibu di Nganjuk dan Keluarga Besar ayah di Bondowoso yang selalu mendoakan dan memotivasi saya agar lebih bersemangat
5. Sahabat- sahabat saya yaitu: Luthfina, Seftina, Resita, Sonia, Lestari, Amanda, Hanif, Ando, Afrizal, Safir, Ghofar, Nathan, Rayhan, Azfa, Adhit, Firda, Titan, Dewi, Putri, Angelia,
6. Teman-teman angkatan 2021 mahasiswa prodi Hubungan Internasional Universitas Jember

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

”Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Al-Insyirah ayat :6)

”You are Free, You just don’t Know yet”

(Redeeming Love – Francine Rivers)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini;

Nama: Elisabet Elfadani

NIM: 210910101013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Penolakan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Thailand di Thailand Selatan” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Maret 2026

Yang menyatakan

Elisabet Elfadani
NIM 210910101013

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Penolakan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Thailand di Thailand Selatan* telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Maret 2026
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing	Tanda Tangan
1. Pembimbing Utama	
Nama : Drs. Himawan Bayu Patriadi M.A., Ph.D.	(.....)
NIP : 196108281992011001	
2. Pembimbing Anggota	
Nama : Honest Dody Molasy S.Sos., M.A., CIQaR., CIQnR., CRP.	(.....)
NIP : 197611122003121002	

Penguji	
1. Penguji Utama	
Nama : Prof. Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D.	(.....)
NIP : 196402081989021001	
2. Penguji Anggota	
Nama : Fuat Albayumi, S.IP., MA.	(.....)
NIP : 197404242005011002	

ABSTRAK

Separatisme di Thailand Selatan merupakan persoalan keamanan nasional yang berakar pada proses aneksasi oleh Kerajaan Siam terhadap bangsa Muslim-Melayu ke dalam negara-bangsa Thailand. Dinamika konflik ini muncul dari perasaan *relative deprivation* di kalangan masyarakat Muslim-Melayu sehingga mendorong lahirnya gerakan separatisme. Dalam kerangka penyelesaian konflik, kelompok separatis mengajukan tuntutan otonomi khusus sebagai alternatif solusi perdamaian. Namun respon pemerintah Thailand justru menolak tuntutan tersebut dengan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan prinsip nasionalisme dan integrasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dibalik penolakan pemerintah Thailand terhadap aspirasi otonomi khusus di Thailand Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis interpretasi data. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penolakan otonomi khusus oleh pemerintah Thailand didasarkan pada nasionalisme dan integrasi nasional.

Kata Kunci : Konflik, Separatisme, Nasionalisme, Thailand Selatan

ABSTRACT

Separatism in Southern Thailand constitutes a matter of national security rooted in the historical process of annexation by the Siamese Kingdom of the Muslim-Malay population into the Thai nation-state. The dynamics of the conflict emerged from a sense of relative deprivation among the Muslim-Malay community, which subsequently encouraged the rise of separatist movements. Within the framework of conflict resolution, separatist groups have proposed special autonomy as an alternative solution for peace. However, the Thai government has rejected this demand on various grounds related to the principles of nationalism and national integration. This study aims to examine the underlying reasons behind the Thai government's rejection of the special autonomy aspiration in Southern Thailand. This research employs a qualitative approach with data interpretation analysis. The study relies on secondary data collected through a literature review. The findings indicate that the Thai government's rejection of special autonomy is fundamentally based on considerations of nationalism and national integration.

Keywords: Conflict, Separatism, Nationalism, Southern Thailand

Ringkasan

Penolakan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Thailand di Thailand Selatan;

Elisabet Elfadani, 210910101013; 2026; 94 halaman; Jurusan Hubungan Internasional; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember

Konflik separatisme di Thailand Selatan merupakan suatu permasalahan keamanan wilayah bagi negara Thailand. Konflik ini telah terjadi sejak abad ke-14 dimana kerajaan Siam melakukan aneksasi terhadap wilayah Thailand Selatan yang mencakup Pattani, Yala dan Narathiwat. Konflik ini dipicu karena sikap *Relative Deprivation* masyarakat Muslim-Melayu terhadap pemerintah Thailand sehingga menimbulkan separatisme sebagai salah satu upaya mempertahankan identitas mereka. Dalam upaya penyelesaian damai, kelompok separatis menuntut otonomi khusus agar membebaskan identitas Muslim-Melayu dari Kebijakan Siamisasi namun hal tersebut ditolak oleh pemerintah Thailand. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini membahas alasan penolakan pemerintah Thailand terhadap tuntutan otonomi khusus di Thailand Selatan.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan analisis data melakukan interpretasi data. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder melalui kajian studi pustaka seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, berita dan laporan resmi negara serta organisasi internasional. Keabsahan data penulis menggunakan metode triangulasi sumber dan validasi literatur. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori konflik, konsep separatisme, konsep otonomi khusus, konsep nasionalisme dan konsep integrasi nasional.

Hasil dari penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa alasan penolakan pemerintah Thailand terhadap tuntutan otonomi khusus di Thailand Selatan karena terdapat 2 alasan yaitu pertama otonomi khusus mengancam keberadaan identitas nasional Thailand, kedua otonomi khusus berpotensi memicu disintegrasi nasional.

PRAKATA

Puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, kerana berkat karunia-Nya penelitian skripsi yang berjudul "Penolakan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Thailand di Thailand Selatan" telah mencapai tahap penyelesaian. Penelitian ini sulit terselesaikan apabila tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak penyusunan ide sampai selesai. Bersama ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Himawan Bayu Patriadi S.Sos., M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Honest Doday Molasy S.Sos., M.A., CIQaR., CIQnR., CRP., selaku Dosen Pembimbing Anggota dan Dosen Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu bimbingan, serta dukungan terkait penyelesaian skripsi
2. Bapak Prof. Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D. selaku Dosen Penguji Utama dan Bapak Fuat Albayumi, S.IP., MA selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun terkait skripsi.
3. Jajaran dosen jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama perkuliahan.

Jember, 03 Maret 2026

Penulis,

Elisabet Elfadani

210910101013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK.....	v
Ringkasan.....	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Praktis	5
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kerangka Konseptual.....	7
2.1.1 Teori Konflik	7
2.1.2 Konsep Nasionalisme berbasis Budaya (<i>Culture based Nasionalism</i>)	10
2.1.3 Integrasi Nasional (<i>National Integration</i>)	12
2.1.4 Konsep Separatisme	14
2.1.5 Konsep Otonomi Khusus	17
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Ringkasan Penerapan Teori.....	25
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	28

3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Objek dan Fokus Penelitian	28
3.2.1 Batasan Materi	28
3.2.2 Batasan Waktu	29
3.3 Pengumpulan Data	29
3.4 Keabsahan Data.....	30
3.5 Analisis Data	30
3.6 Sistematika Penulisan.....	31
BAB 1 Pendahuluan.....	31
BAB 2 Tinjauan Pustaka	32
BAB 3 Metode Penelitian.....	32
BAB 4 Alasan Penolakan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Thailand di Thailand Selatan	32
BAB 5 Kesimpulan.....	32
BAB 4. PENOLAKAN OTONOMI KHUSUS OLEH PEMERINTAH THAILAND DI THAILAND SELATAN	33
4.1 Sejarah Munculnya Konflik Separatisme dan Tuntutan Otonomi Khusus di Thailand Selatan	33
4.1.1 Sejarah Penyebaran Islam di Thailand Selatan	33
4.1.2 Interaksi Politik Inggris dengan Thailand.....	36
4.1.3 Aneksasi Kesultanan Pattani oleh Kerajaan Siam	37
4.1.4 Kebijakan “Siam”-isasi Tahun 1909.....	41
4.2 Munculnya Gerakan Separatisme	43
4.2.1 Aksi Protes Terhadap Kebijakan Siamisasi	44
4.2.2 Munculnya Gagasan Separatisme.....	48
4.2.3 Terbentuknya Barisan Nasional Pattani (BRN).....	51
4.2.4 Munculnya Pattani United Liberation Organization (PULO)	53
4.2.5 Aksi Separatisme 2004-2007.....	58
4.2.6 Mediasi oleh Pihak Ketiga.....	64
4.3 Usulan Otonomi Khusus	71
4.4 Respon Pemerintah Thailand Terhadap Tuntutan Otonomi Khusus	

4.5 Alasan Penolakan Pemerintah Thailand atas Aspirasi Otonomi Khusus	80
4.5.1 Otonomi Khusus Mengancam Keberadaan Identitas Nasional ' <i>Lak Thai</i> '	80
4.5.2 Otonomi Khusus dan Disintegrasi Nasional	89
BAB 5. KESIMPULAN	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu.....	22
Gambar 2.2 Ringkasan Penerapan Teori.....	25
Gambar 4.1 Diagram Annual Number of Attacks in Southern Border Provinces on Basic of Apparent Target (January 2004-July 2007).....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Rangkaian usulan otonomi khusus di Thailand Selatan.....	71
--	----

DAFTAR SINGKATAN

BRN	: Barisan Revolusi Nasional
PULO	: <i>Pattani United Liberation Organization</i>
OKI	: Organisasi Kelompok Islam
MARA	: Majelis Amanah Rakyat
SBPAC	: <i>Southern Border Provinces Administrative Centre</i>

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini membahas mengenai Etnopolitik dengan fokus separatisme di Thailand Selatan yang belum menemukan solusi penyelesaian konflik. Penelitian ini akan membahas mengenai konflik separatisme di wilayah Thailand Selatan yang munculnya dari sikap *relative deprivation* komunitas muslim-melayu yang merasa bahwa pemerintah Thailand melakukan tindakan diskriminasi terhadap identitas mereka. Dalam menyelesaikan konflik, kelompok Muslim-Melayu mengusulkan otonomi khusus sebagai alat perdamaian terhadap 3 wilayah Thailand Selatan yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat dengan pemerintah Thailand, namun respon pemerintah justru menolak aspirasi tersebut karena kebijakan otonomi khusus dianggap dapat mengancam keberadaan identitas nasional Thailand. Analisis ini akan membahas secara menyeluruh terkait sebab akibat yang akan terjadi dalam menerapkan otonomi khusus, serta sikap Nasionalisme Pemerintah Thailand mempertahankan identitas 'Thai' sebagai identitas nasional.

Thailand adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan budayanya. Negara ini juga menjadi satu-satunya negara yang bebas dari penjajahan asing di kawasan Asia Tenggara, walaupun demikian negara ini tidak luput dengan permasalahan internal yang terjadi di wilayah negaranya. Salah satunya konflik separatisme di Thailand Selatan yang berusaha memisahkan diri dari negara Thailand. Konflik ini dipicu oleh sikap *relative deprivation* kelompok Muslim-Melayu terhadap pemerintah Thailand akibat tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap identitas Muslim-Melayu (Cintya, 2018). Konflik ini telah berlangsung sejak pemerintahan Kerajaan Siam hingga saat ini belum menemukan titik terang menuju perdamaian.

Berawal pada tahun 1938, Seorang pemimpin kerajaan siam yaitu Phibun Songkram memberlakukan sebuah kebijakan *Rathniyom* (Revolusi Budaya) yang bertujuan untuk menciptakan sebuah identitas budaya Thai sebagai identitas nasional negara Thailand yang maju di seluruh wilayah Thailand. Kebijakan ini tak hanya mengunggulkan identitas Thai namun juga memberlakukan *siamization*

policy yaitu memaksakan orang-orang bukan Thai untuk menjadi bagian dari identitas (Yazid, 2013). Revolusi ini menjadi pemicu adanya konflik antara komunitas Muslim-Melayu yang berada di wilayah Pattani, Thailand Selatan dengan Pemerintah Thailand. Konflik ini mulai terjadi pada tahun 1970-an, Para masyarakat Muslim-Melayu merasa bahwa Revolusi ini menyebabkan terjadinya diskriminasi dan marginalisasi terhadap agama Islam, sehingga pemberontakan yang dilakukan oleh komunitas muslim melayu menyebabkan timbulnya konflik Separatisme di wilayah Thailand Selatan (Cintya, 2018). Oleh karena itu, Aksi pemberontakan yang dilakukan oleh para separatis digunakan untuk memperoleh keadilan bagi para masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan agar tidak adanya ketimpangan dalam sistem politik yang mereka alami serta pembebasan identitas mereka dari kebijakan Siamisasi.

Salah satu kelompok separatis terbesar dan paling berpengaruh di Thailand Selatan adalah BRN (Barisan Revolusi Nasional) yang dikenal sebagai kelompok pemimpin perjuangan untuk kemerdekaan di empat provinsi Thailand Selatan. Kelompok ini melakukan separatisme tidak hanya menggunakan aksi demonstrasi, tetapi juga mengandalkan kekerasan bersenjata untuk mencapai tujuannya. Menurut Abdul Karim Khalid, seorang anggota BRN, penggunaan senjata dianggap sebagai cara untuk memaksa pemerintah Thailand mengakui hak-hak masyarakat Muslim-Melayu dan memberikan mereka kemerdekaan yang diinginkan (Siregar, 2017). Penggunaan senjata dianggap sebagai bentuk pembelaan dari kelompok separatis agar menarik perhatian pemerintah Thailand untuk menunjukkan upaya pemisahan diri dari negara kesatuan.

Konflik Pattani semakin besar puncaknya pada tahun 2004 ditandai dengan penyerangan di markas militer Distrik Arion di daerah Narathiwat yang telah menewaskan 4 tentara Thailand dan sebanyak 400 senjata beserta amunisi hilang, dilanjutkan dengan serangan di wilayah sekitar Thailand Selatan, Seperti Yala, Pattani, Narathiwat dan songkhla (Cargo, 2014). Ditengah peningkatan konflik pada tahun 2004, pemerintah Thailand mulai menyadari bahwa aksi pemberontakan ini dapat menyebar dan menimbulkan gerakan separatisme sehingga akan mengancam asas kedaulatan negara Thailand *Lak Thai* (Raja, Thai, Buddha),

Pemberontakan ini akan memicu timbulnya pemisahan diri untuk memerdekakan wilayah Thailand Selatan dari kekuasaan Pemerintah Thailand (Melvin, 2007). Maka dari itu, terjadinya konflik ini menarik perhatian pemerintah Thailand untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan isu separatisme dengan beberapa metode penyelesaian konflik salah satunya yaitu aspirasi penerapan otonomi khusus.

Penerapan Otonomi Khusus telah berhasil diimplementasikan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia yang diterapkan di wilayah Aceh dan Filipina di wilayah Mindanao. Otonomi Khusus dilakukan sebagai “*Middle Ground*” atau solusi penengah dalam penyelesaian konflik separatisme. Melalui sejarah, kedua negara tersebut memiliki latar belakang dalam perkembangan Islam dan beberapa daerahnya di dominasi oleh Komunitas Muslim. Gerakan Separatisme dilakukan untuk menuntut status dan hak identitas komunitas Muslim yang tertindas. Contoh nyata bagaimana penerapan otonomi khusus berperan dalam penyelesaian konflik yaitu di Indonesia, pemberian otonomi khusus di wilayah provinsi Aceh yang tertulis dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 Juncto UU 11 tahun 2006 (Suharyo, 2018). Sedangkan, di Filipina Otonomi diberikan di Bangsamoro, Mindanao pada 26 Juli 2018 sekaligus menciptakan kerangka hukum untuk pembentukan Daerah Otonomi Bangsamoro terhadap Muslim Mindanao (Parmono, 2019). Namun hal menarik terjadi di Thailand, negara ini juga tengah mengalami polemik konflik Separatisme, walaupun konflik yang terjadi memiliki persamaan latar belakang yang sama dengan konflik separatisme di Indonesia dan Filipina namun Thailand menolak untuk menggunakan pendekatan konsep Otonomi Khusus sebagai solusi alat perdamaian konflik separatisme.

Aspirasi otonomi Khusus di Thailand Selatan pertama kali dilakukan oleh Haji Sulong, seorang tokoh ulama di Pattani yang memimpin masyarakat Muslim-Melayu melawan “Politik Siamisasi”, ia juga merupakan perwakilan komunitas Muslim-Melayu yang mengajukan aspirasi otonomi khusus kepada Pemerintah Thailand (Husam *et al*, 2017). Pada tanggal 3 April 1947 Haji Sulong mengajukan aspirasi pemberian otonomi khusus di wilayah Thailand Selatan sebagai salah satu penyelesaian konflik antara komunitas Muslim-Melayu dan pemerintah Thailand serta membebaskan identitas Muslim-Melayu dari kebijakan Siamisasi (Husam *et*

al, 2017). Menurut Haji Sulong, kebijakan Siamisasi dalam penerapan hukum agama Islam akan merusak kemurnian dari ajaran agama Islam, Hal ini dapat dibuktikan dengan lemahnya penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat Pattani. Seperti contoh nyata, tradisi agama Islam yang diberikan campuran budaya Thai, penerapan aksara Thai di kalangan masyarakat Melayu (Abdulfattah, 2021). oleh karena itu, pandangan tersebut yang menyebabkan diajukan aspirasi otonomi khusus di wilayah Thailand Selatan agar penerapan hukum Islam di Thailand dapat dipisahkan secara independen tanpa ada campur tangan dari politik Siamisasi.

Namun, hal menarik yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu respon pemerintah Thailand dalam menanggapi aspirasi otonomi khusus sebagai “*Middle Ground*” di Thailand Selatan. Penerapan otonomi Khusus di Thailand Selatan tidak sesuai seperti negara tetangga yaitu Indonesia dan Filipina. Thailand justru menolak usulan otonomi khusus sebagai salah satu aspirasi perdamaian antar komunitas Muslim-Melayu dengan Pemerintah Thailand.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Thailand Selatan merupakan salah satu solusi potensial untuk meredakan konflik Separatisme. Seperti yang sudah dijelaskan diatas berdasarkan pengalaman Indonesia dan Filipina sebagai negara tetangga yang memiliki Komunitas Muslim terbesar di beberapa wilayah negaranya yang berusaha menuntut pemberian otonomi sebagai pembebasan status dan hak identitas Muslim dari keterikatan identitas nasional telah berhasil diimplementasikan. Aspirasi otonomi khusus akan memberikan ruang bagi komunitas Muslim untuk mempertahankan identitas dan praktik keagamaan mereka tanpa harus menuntut kemerdekaan, serta mengurangi ketegangan antara pemerintah pusat dan komunitas lokal dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan dalam negeri mereka sendiri. Namun, berbeda dengan Thailand, meskipun tuntutan otonomi khusus terus didorong oleh Bangsa Melayu di Thailand Selatan, Pemerintah Thailand merespon aspirasi tersebut dengan menolak otonomi khusus sebagai solusi perdamaian. Peristiwa ini menarik untuk dibahas untuk mengetahui

apa yang menjadi alasan pemerintah Thailand menolak tuntutan otonomi khusus yang diusulkan oleh komunitas Melayu di Thailand Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dengan demikian penulis mengambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

“Mengapa Pemerintah Thailand Menolak Tuntutan Otonomi Khusus di Thailand Selatan ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dan pertimbangan pemerintah Thailand yang merespon aspirasi otonomi khusus dengan menolak dan mempertimbangkan kebijakan tersebut sebagai salah satu ancaman disintegrasi bangsa negara Thailand.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat yang diharapkan oleh penulis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca. Selain bermanfaat untuk menambah wawasan penulis dan pembaca, penelitian ini memiliki manfaat secara praktik dan teoritis seperti berikut :

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini akan menyajikan alasan pemerintah Thailand menolak aspirasi otonomi khusus yang diusung oleh komunitas Muslim-Melayu di Thailand Selatan sebagai upaya penyelesaian konflik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kebijakan selain otonomi khusus yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi komunitas Muslim-Malayu.
3. Penelitian ini diharapkan dapat mengambil dukungan upaya perdamaian yang lebih efektif di Thailand Selatan, baik melalui pendekatan yang berbeda atau dengan memodifikasi aspirasi

otonomi khusus agar lebih dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah literatur akademis berkaitan dengan konflik etnis dan agama, serta penerapan otonomi khusus sebagai solusi untuk menangani konflik separatisme di Thailand Selatan.
2. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori Konflik, Nasionalisme dan Etnopolitik khususnya dalam konteks negara yang menghadapi tantangan dalam mengelola keragaman etnis dan agama.
3. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kerangka analisis kebijakan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sikap pemerintah terhadap solusi otonomi khusus dalam konflik etnis dan agama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Teori Konflik

Dalam penelitian ini sebelum membahas mengenai inti dari kajian penolakan otonomi khusus di Thailand Selatan oleh Pemerintah Thailand maka perlu untuk terlebih dahulu mencari akar permasalahan munculnya dari konflik di Thailand Selatan, untuk itu penelitian ini menggunakan Teori Konflik untuk menjelaskan bagaimana konflik dapat terjadi dalam peristiwa Separatisme di Thailand Selatan. Dalam buku karya Ted Robert Gurr seorang penulis Amerika dan Profesor Ilmu Politik yang berjudul “*Why Men Rebel*” menjelaskan bahwa Teori Konflik adalah konsep ketidakpuasan yang relatif terjadi dan memicu tindakan gerakan protes atau penuntutan kepada Pemerintah Negara. Seperti kutipan dibawah:

The primary causal sequence in political violence is: relative deprivation → frustration → aggression → political violence. (Gurr, 1970, hlm 13)

Kutipan diatas menjelaskan pendapat Gurr yang menyatakan bahwa akar permasalahan dari munculnya konflik politik seperti separatisme yaitu terletak pada munculnya perasaan ketidakadilan yang dirasakan individu atau kelompok masyarakat minoritas. Dalam menjelaskan munculnya konflik, ia menyoroti fenomena ini dengan sebutan *Relative Deprivation* yaitu situasi yang menggambarkan seseorang merasa bahwa ia atau kelompoknya berhak mendapatkan kehidupan yang layak namun pada kenyataanya mereka justru mengalami kesenjangan sosial yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. *Deprivation* tidak harus berhubungan dengan faktor sosial seperti kemiskinan atau penderitaan masyarakat namun lebih tertuju pada persepsi bahwa setiap individu atau kelompok dominan lebih mendapatkan kehidupan yang layak dan keuntungan dalam sistem negara seperti hal ekonomi, sosial, politik dan pengabaian identitas minoritas yang memicu munculnya perasaan frustasi. Sikap frustasi akan memperburuk kondisi jika tidak adanya ruang komunikasi untuk menyalurkan

aspirasi masyarakat minoritas seperti melalui partai politik, media atau lembaga hukum sehingga kelompok minoritas akan merasa terpinggirkan dan mulai melakukan tindakan agresif seperti gerakan protes, kerusuhan bahkan pemberontakan. Fenomena *Relative Deprivation* seringkali muncul dalam negara yang multikultural, memiliki berbagai identitas etnis, agama atau budaya yang berbeda dengan pusat kekuasaan. Perasaan deprivasi dapat berkembang menjadi sebuah aksi gerakan separatisme yang muncul dari kelompok minoritas yang merasa bahwa mereka berhak memisahkan diri dari negara induk karena dianggap sebagai salah satu solusi untuk mencapai keadilan dan pengakuan atas hak-hak mereka. Fenomena separatisme seringkali muncul di daerah-daerah yang merasa terabaikan, tidak diakui dan eksploitasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, konflik separatisme muncul dari rasa ketidakpuasan masyarakat minoritas yang merasa pemerintah telah melakukan sikap diskriminasi dan marginalisasi terhadap hak-hak mereka sehingga kelompok ini akan menuntut keadilan dengan melakukan aksi protes hingga gerakan pemisahan diri sebagai bentuk upaya memperjuangkan hak identitas mereka. .

*The concept of RD [**Relative Deprivation**] was first used systematically in the 1940s by the authors of The American Soldier to denote the feelings of an individual who lacks some status or conditions that he thinks he should have, his standards of what he should have generally being determined by reference to what some other person or groups has (Gurr, 1970)*

Sesuai dengan kutipan diatas, menurut Gurr konsep *Relative Deprivation* pertama kali diimplementasikan pada awal tahun 1940 oleh seorang penulis *American Soldier* yang menggambarkan kehadiran perasaan yang dirasakan oleh seorang individu yang merasa bahwa status dan hak terhadap identitas mereka tidak lagi memiliki standar sesuai dengan identitasnya melainkan standar identitas mereka mengacu pada standar identitas individu atau kelompok lain. Standar status dan hak ditentukan sesuai dengan kelompok yang paling mendominasi dalam sistem negara kemudian pemerintah akan menjadikan status dan hak yang paling dominan sebagai Identitas Nasional (Gurr, 1970). Penjelasan diatas menunjukkan bahwa konsep *Relative Deprivation* adalah sebuah kesenjangan yang dirasakan oleh

individu atau kelompok minoritas yang merasa bahwa standar identitas yang mereka miliki seharusnya menjadi hak mereka namun identitas mereka justru ditekan dan harus mengikuti standar identitas kelompok dominan. Kondisi ini terjadi karena dominasi identitas yang ada dalam negara telah diintegrasikan menjadi identitas nasional yang satu kesatuan kemudian ditetapkan sebagai standar status dan hak identitas negara. Oleh karena itu, kondisi tersebut akan mengantarkan kepada perasaan kelompok minoritas yang merasa status dan hak mereka tidak diakui oleh pemerintah negara, permasalahan ini tentu menjadi faktor utama pemicu terjadinya konflik Separatisme.

Konflik separatisme yang dilakukan oleh suatu komunitas tentunya didasarkan pada emosional seseorang ataupun kelompok yang muncul akibat adanya rasa kecewa atau ketidakpuasan terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Menurut Gurr (1970), sesuai yang telah dijelaskan diatas bahwa separatisme terjadi akibat perasaan *Deprivation Relative* yang dirasakan oleh suatu kelompok etnis minoritas terhadap pemerintah dan kelompok etnis mayoritas. Perasaan ini muncul akibat adanya kesenjangan akses pada sistem negara baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik (Gurr, 1970). Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik separatisme. Pertama, adanya perasaan frustrasi yang dirasakan kelompok etnis tertentu khususnya etnis minoritas karena kesenjangan harapan dan kenyataan yang mereka alami. Kedua, mobilisasi politik dan ideologi yang dilakukan oleh para pemimpin kelompok etnis yang memperjuangkan kepentingan kelompoknya, Ketiga, munculnya tindakan diskriminasi dan marginalisasi yang dirasakan oleh kelompok minoritas (Eteban *et al*, 2011). Oleh karena itu, kesenjangan yang dialami oleh etnis minoritas disebabkan atas sikap pemerintah yang menciptakan mobilisasi politik dan ideologi dengan menggunakan identitas mayoritas negara untuk mencapai kepentingan tertentu. Kesenjangan ini memunculkan sikap diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok minoritas yang akhirnya menimbulkan konflik separatisme.

Sebuah konflik tidak harus berupa kekerasan namun konflik juga dapat dilakukan dengan aksi protes yang dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Konflik separatisme tidak selalu berupa kekerasan, namun juga berupa protes untuk

perdamaian dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah kebijakan atau struktur sosial yang dianggap tidak adil bagi kelompok minoritas. Ketika ruang untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kesenjangan yang dialami kelompok minoritas ini tertutup atau pemerintah berusaha menolak untuk membuka ruang sebagai alat komunikasi menyalurkan hak suara, maka besar kemungkinan akan menimbulkan aksi serangan bersenjata. Kondisi tersebut dapat memicu konflik yang lebih buruk apabila telah mencapai keinginan kelompok separatis untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Dalam konteks ini, beberapa faktor yang memicu ketidakpuasan masyarakat adalah: diskriminasi, ketidakadilan sosial dan pengabaian pemerintah terhadap kelompok minoritas (Cedermen *et al*, 2010). Dengan demikian konflik separatisme dapat terjadi karena kelompok minoritas merasa tidak memiliki suara dalam proses politik sehingga mereka cenderung mengambil tindakan yang lebih radikal demi memperjuangkan hak-hak mereka.

2.1.2 Konsep Nasionalisme berbasis Budaya (*Culture based Nasionalism*)

Dalam konteks kajian Hubungan Internasional konsep cinta tanah air disebut sebagai konsep Nasionalisme. John Hutchinson dalam karyanya yang berjudul “*The Dynamics of Cultural Nationalism*” (1987) merumuskan pandangannya tentang nasionalisme dengan menyatakan bahwa terdapat dua bentuk utama nasionalisme yaitu *Political Nasionalism* dan *Cultural Nationalism*.

Cultural nationalism is concerned with the moral regeneration of the community rather than the attainment of state power....., Political nationalism seeks to secure a representative state for the nation and to unify the nation through political institutions. (Hutchinson, 1987)

Menurut Hutchinson, kedua bentuk tersebut memiliki fokus dan orientasi yang berbeda. Bentuk *Political Nasionalism* berfokus pada pembentukan dan penguatan negara sebagai entitas politik dengan perhatian utama pada kekuasaan, institusi, serta kedaulatan negara. Dalam konteks tersebut nasionalisme digambarkan melalui upaya membangun struktur pemerintahan yang kuat, sistem hukum yang terorganisi, serta integrasi wilayah dalam satu kesatuan politik (Hutchinson, 1987). Sedangkan *Cultural Nationalism* lebih berfokus pada aspek identitas kolektif yang melibatkan budaya, bahasa, dan sejarah suatu komunitas

bangsa. Nasionalisme jenis ini memandang bangsa sebagai komunitas kultural yang mengacu pada kesadaran akan variasi budaya dan nilai-nilai sejarah yang dimiliki oleh suatu komunitas bangsa (Hutchinson, 1987).

Dalam penelitian ini penggunaan nasionalisme jenis *cultural nationalism* cenderung lebih relevan dengan studi kasus yang diangkat. Hutchinson menjelaskan bahwa *cultural nationalism* muncul ketika kondisi dalam suatu kelompok masyarakat merasa bahwa identitas budaya berada dalam ancaman, baik akibat tekanan modernisasi, dominasi budaya lain, maupun kebijakan negara yang bersifat asimilatif (Hutchinson, 2002). Dalam situasi tersenut, muncullah upaya untuk mempertahankan identitas melalui berbagai bentuk ekspresi budaya, seperti pelestarian bahasa, tradisi dan simbol-simbol sejarah. Menariknya, *cultural nationalism* tidak selalu berorientasi langsung pada tuntutan politik namun sering kali menjadi fase awal untuk membangun kesadaran kolektif sebelum berkembangnya menjadi gerakan politik yang terorganisir (Hutchinson, 2002). Oleh karena itu nasionalisme budaya berfungsi sebagai pondasi penting dalam proses pembentukan identitas kelompok yang dalam proses perkembangannya dapat bertransformasi menjadi nasionalisme politik ketika tuntutan terhadap pengakuan dan kekuasaan menjadi semakin menguat.

Nasionalisme budaya bukan sekedar bagian dari nasionalisme politik melainkan sebagai gerakan moral yang independen dan permanen. Hutchinson menegaskan bahwa nasionalisme budaya berakar pada upaya suatu komunitas yang menemukan kembali identitas khasnya melalui sejarah, tradisi dan bahasa yang telah ada pada keberadaan suatu bangsa (Woods, 2015). Nasionalisme budaya cenderung melihat bangsa sebagai entitas yang hidup dan berkembang yang perlu dilestarikan kembali untuk mengintegrasikan nilai-nilai masa lalu ke dalam dinamika modernitas. Dalam perspektif ini, aktor utama bukanlah elit politik, melainkan budayawan, dan seniman yang berperan sebagai komunikator dalam membangun kembali kesadaran kolektif masyarakat, terutama ketika terjadi krisis identitas akibat modernisasi atau kegagalan negara dalam mengakomodasikan kebutuhan sosial dan kultural masyarakat (Woods, 2015).

Seiring berkembangnya identitas kolektif tersebut, muncul solidaritas sosial yang mempererat hubungan antar individu dan kelompok sehingga menciptakan kohesi sosial yang kuat (Hutchinson, 1992). Pada akhirnya, kohesi ini menjadi dasar terbentuknya integrasi nasional sehingga integrasi nasional merupakan hasil dari keberhasilan proses nasionalisme budaya dalam menyatukan masyarakat melalui identitas dan solidaritas berbasis budaya. Menurut Hutchinson integrasi nasional merupakan output dari proses nasionalisme budaya atau *cultural nationalism* (Hutchinson, 1992). Oleh karena itu, nasionalisme budaya dapat berfungsi sebagai instrumen integratif apabila negara mampu mengakomodasi ekspresi budaya masyarakat. Sebaliknya ketika ekspresi ditekan melalui kebijakan asimilasi, maka nasionalisme budaya berpotensi berkembang menjadi resistensi yang justru melemahkan integrasi nasional.

2.1.3 Integrasi Nasional (National Integration)

Konsep integrasi nasional muncul dari hasil sikap Nasionalisme suatu bangsa dalam suatu negara. Integrasi Nasional menjadi sangat penting dalam konteks konflik separatisme yang seringkali dipicu karena konflik ketegangan etnis dan budaya yang berbeda sehingga dapat mengancam stabilitas negara. Menurut Leonard Binder – *National Integration and Political Development* (1964) menjelaskan mengenai definisi integrasi seperti kutipan di bawah.

National integration is a situationally bound phenomenon that involves the unification of diverse groups into a politically cohesive entity, which is essential for political development (Binder, 1964),

Kutipan diatas menjelaskan bahwa menurut Binder integrasi adalah sebuah proses yang digunakan untuk menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial masyarakat ke dalam satu kesatuan wilayah demi mewujudkan pembentukan identitas nasional. Dalam sebuah negara tentu terdapat berbagai elemen sosial budaya yang lahir dari nasionalisme bangsa. Elemen-elemen tersebut seperti bahasa, budaya, dan agama. Elemen ini jika diproses menjadi satu kesatuan maka akan menghasilkan identitas nasional oleh karena itu integrasi nasional merupakan bagian dari konsep identitas nasional yang terbentuk dari nasionalisme bangsa

(Binder, 1964). Oleh karena itu, Integrasi nasional adalah upaya atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara untuk menciptakan keselarasan secara nasional.

Integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang memiliki pengertian yang sama yaitu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah untuk membentuk identitas nasional atau bangsa untuk mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Menurut Myron Weiner dalam kutipan Juliardi (2014) terhadap 5 definisi mengenai integrasi sebagai berikut; Pertama, Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah untuk menuju proses pembentukan identitas nasional dan membangun rasa kebangsaan. Kedua, Integrasi membentuk wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit sosial yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial tertentu. Ketiga, Integrasi dapat menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat dalam arti integrasi dapat mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Keempat, Integrasi merujuk pada konsensus terhadap nilai yang minim yang diperlukan dalam memelihara ketertiban sosial. Kelima, Integrasi merujuk pada terbentuknya tingkah laku yang diproses secara terintegrasi dan diterima untuk mencapai tujuan bersama (Juliardi, 2014). Oleh karena itu, dari definisi yang dijelaskan diatas bahwa integrasi adalah sebuah proses penyatuan dengan menghubungkan kelompok budaya dan sosial yang beragam ke dalam satu kesatuan wilayah kemudian dibentuk suatu wewenang oleh pemerintah pusat untuk mencapai kesatuan identitas nasional dan membangun rasa kebanggaan terhadap bangsa.

Dalam sebuah negara multikultural tentu memiliki etnisitas yang berbeda-beda, seluruh etnis memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Perbedaan etnisitas tentu menjadi konsep penting bagi Integrasi nasional untuk menjalankan perannya. Integrasi nasional dapat membawa dampak positif maupun negatif, dampak positif yang ditimbulkan dapat membawa bangsa untuk menjadi identitas yang satu kesatuan yang kuat namun identitas nasional juga dapat berdampak negatif jika penggunaan konsep ini dilakukan untuk kepentingan identitas kelompok mayoritas dan sering mengabaikan identitas minoritas. Dalam banyak

kasus, konflik etnis seperti separatisme muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan kelompok tertentu yang dirasa terpinggirkan atau tidak diakui dalam struktur politik dan sosial negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika terdapat kelompok etnis yang merasa diabaikan atau hak suara mereka dibungkam dalam pengambilan keputusan maka mereka cenderung akan beralih ke tindakan separatisme sebagai bentuk protes kepada pemerintah.

Setiap negara akan berusaha untuk menjaga kesatuan negaranya sebagai bentuk upaya pertahanan dan kekuatan negara dalam menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Integrasi tidak hanya berkaitan dalam peristiwa asimilasi budaya namun juga menciptakan rasa saling memiliki diantara semua warga terlepas adanya perbedaan etnis atau agama individu. Pemerintah negara perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong integrasi dan pengakuan terhadap keragaman budaya. Kebijakan ini diupayakan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan pengakuan terhadap seluruh etnis yang berada dalam negara tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah harus bisa berkomitmen untuk mengakomodasi kepentingan seluruh kelompok etnis sehingga dapat mengurangi potensi konflik etnis. Secara keseluruhan, integrasi nasional merupakan kunci untuk mengatasi konflik etnis seperti separatisme di dunia, melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis. Negara akan menciptakan suasana yang kondusif untuk rekonsiliasi dan kerukunan antar etnis. Strategi ini tidak hanya akan mengurangi ketegangan yang ada namun juga memperkuat persatuan dan stabilitas nasional dalam jangka waktu yang panjang. Sejalan dengan pandangan bahwa integrasi nasional tidak hanya melibatkan aspek politik dan ekonomi namun juga aspek sosial budaya yang dapat menciptakan rasa memiliki diantara seluruh warga negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat di negaranya telah mendapatkan akses yang sama terhadap seluruh aspek dalam negara.

2.1.4 Konsep Separatisme

Isu Separatisme merupakan sebuah topik yang menjadi kajian penting dalam Ilmu Hubungan Internasional karena mencakup seluruh aspek kedaulatan

negara, stabilitas politik dan keamanan regional. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada politik domestik suatu negara namun juga mempengaruhi dinamika regional dan internasional secara lebih luas. Mengutip melalui buku Robert G Wirsing & Ehsan Ahrari yang berjudul *'Fixing Fractured Nation- The Challenges of Ethnic Separation in The Asia Pacific'*, konflik separatisme berhubungan dengan konteks bangsa multikultural yang berusaha mengusahakan mencocokkan bangsa dan negara

Since the nation has typically been understood in terms of a people's cultural or ethnic (most often including linguistic) identity, a feature of human society stubbornly defiant both of unambiguous definition and of distinct boundaries, determining the right match between the state and the ethnically defined nation has proven to be one of the most stubbornly perplexing and perilous conundrums of the modern era. (Wirsing & Ahrari, 2010)

Menurut Wirsing dan Ahrari dalam pernyataanya diatas bahwa mereka menyoroti kompleksitas hubungan antara negara dengan bangsa memiliki pemahaman yang sama terutama dalam pemhaman bangsa sebagai kerangka identitas suatu budaya atau etnis. Wirsing dan Ahrari menyoroti tantangan konseptual yang muncul ketika negara diposisikan sebagai representasi dari suatu bangsa yang didefinisikan melalui identitas etni-kultural. Identitas bangsa atau negara sangat berhubungan dengan aspek sosial seperti etnisitas, budaya dan linguistik. Identitas bangsa seringkali memiliki pemahaman yang ambigu karena sifatnya yang tidak memiliki batas yang tegas (Wirsing & Ahrari, 2010). Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk berupaya menyelaraskan batas-batas negara dengan batas-batas bangsa etnis yang kerap menjadi persoalan politik dan cenderung berpotensi menimbulkan konflik. Fenomena ini menjadi bagian penting dari seluruh rangkaian peristiwa ketegangan geopolitik modern termasuk menyangkut nasionalisme etnis, isu separatisme dan intervensi politik atas dasar kebersamaan etno-kultural.

Konsep bangsa bukanlah sebuah obejektif yang bersifat tetap namun bangsa merupakan kontruksi sosial yang terbentuk melalui sejarah, budaya, bahasa dan narasi kolektif. Seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan konsep integrasi

nasional mengutip melalui buku Benedict Anderson (1983) dalam *Imagined Communities* bahwa bangsa merupakan sebuah komunitas yang terbentuk dari imajinasi atau bayangan anggotanya tanpa adanya pertemuan atau saling mengenal satu sama lain namun mereka merasa saling memiliki dalam satu kesamaan identitas. Namun ketika batas negara tidak menggambarkan identitas bangsa secara tepat maka kondisi tersebut dapat memicu terjadinya konflik Separatisme atau tuntutan pemisahan diri.

Separatisme seringkali muncul ketika suatu kelompok masyarakat yang merasa negara telah mengabaikan dan tidak memperoleh keadilan dalam sistem politik, ekonomi atau sosial yang ada. Tuntutan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat dan membentuk entitas politik yang independen kerap muncul sebagai bentuk respon atas tindakan diskriminasi dan marginalisasi pemerintah atau kelompok etnis dominan terhadap kelompok minoritas. Fenomena separatisme seringkali dipicu oleh berbagai faktor seperti, ketidakadilan sosial dan ekonomi, identitas etnis dan budaya minoritas yang kuat seringkali merasa terancam dengan identitas mayoritas, gagalnya pemerintah negara melakukan sistem integrasi nasional dan krisis legitimasi oleh pemerintah pusat yang menghilangkan kepercayaan masyarakat minoritas terhadap pemerintah pusat akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keberagaman kelompok etnisitas. Konflik separatisme seringkali dilihat sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak diakui atau dilindungi oleh negara (Wirsing & Ahrari, 2010). Oleh karena itu, pemerintah yang seringkali kerap mengabaikan identitas minoritas dimana hal ini akan memicu tindakan diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok tersebut sehingga penindasan yang terjadi menimbulkan pemberontakan dari kelompok minoritas untuk menuntut keadilan terhadap hak-hak mereka.

Dalam kajian Hubungan Internasional, konsep Separatisme seringkali dijelaskan melalui lensa teori politik yang mencakup pendekatan seperti teori identitas, teori konflik dan teori nasionalisme. Melalui sudut pandangan Teori Identitas menekankan bahwa pentingnya pengakuan terhadap identitas kelompok sebagai faktor pendorong terjadinya separatisme. Ketika kelompok merasa bahwa

identitas mereka terancam atau diabaikan maka mereka cenderung akan memperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan atas hak identitas mereka yang lebih besar. Sementara itu, melalui sudut pandang Teori Konflik menjelaskan bahwa bagaimana proses ketegangan antara kelompok etnis dan budaya dapat memicu gerakan separatis, terutama ketika adanya ketidakpuasan yang terjadi pada kondisi sosial, ekonomi dan politik dikalangan masyarakat minoritas. Seperti yang telah dijelaskan pada bab Teori Konflik separatisme muncul sebagai respon ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang mengabaikan identitas minoritas oleh pemerintah. Selain itu, separatisme juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kedaulatan negara dimana setiap negara yang menghadapi konflik separatisme akan berusaha untuk mempertahankan integritas wilayah mereka. Tindakan setiap negara dalam mempertahankan integrasi wilayahnya merupakan sebuah upaya negara untuk mencegah terjadinya ketegangan antara negara-negara lain yang memungkinkan kelompok separatis mendapatkan dukungan dari negara lain. Misalnya dalam konflik separatisme terdapat dukungan internasional yang diberikan oleh negara-negara luar terhadap gerakan separatis seperti bantuan senjata secara ilegal. Oleh karena itu, Kondisi tersebut akan memicu konflik semakin besar dan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut. Maka, penting bagi setiap negara untuk mengakui identitas-identitas yang dimiliki oleh setiap keragaman etnis yang ada dalam negaranya. Pemerintah juga perlu mengawasi setiap aktifitas yang dilakukan dalam aksi gerakan separatisme apakah dalam tuntutan tersebut terdapat ikut campur dan bantuan dari negara luar.

2.1.5 Konsep Otonomi Khusus

Dalam konteks konflik etnis atau separatisme terdapat desain institusional yang mampu mengakomodasi keberagaman yang dapat menciptakan stabilitas dan perdamaian. Salah satu konsep yang sering dibahas dalam upaya tersebut adalah otonomi. Marc Weller & Stefan Wolff (2005) dalam bukunya yang berjudul “Autonomy Self Governance and Conflict Resolution Innovative Approaches to Institutional Design in Divided Societies” mendefinisikan otonomi seperti kutipan dibawah:

...we define autonomy as the legally entrenched power of ethnic or territorial communities to exercise public policy functions (legislative, executive and adjudicative) independently of other sources of authority in the state, but subject to the overall legal order of the state. Autonomy as a strategy of preventing and settling ethnic conflict. (Waller & Wolff, 2005).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Waller & Wolff (2005) menekankan mengenai definisi otonomi adalah sebuah pemberian kekuasaan yang secara hukum mengakar pada komunitas etnis atau teritorial untuk dapat menjalankan fungsi kebijakan publik dalam aspek legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara independen dari sumber otoritas lain di negara tersebut, tetapi tetap tunduk pada tatanan hukum negara secara keseluruhan. Waller & Wolff juga berargumen bahwa otonomi dapat dijadikan sebagai strategi untuk mencegah dan menjadi alat dalam penyelesaian konflik etnis. Maka, dari definisi diatas dapat di pahami bahwa otonomi merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah pusat yang memberikan kekuasaan secara hukum kepada komunitas etnis atau teritorial untuk dapat menjalankan kebijakan publik secara independen namun tetap dalam kekuasaan negara secara utuh. Tak hanya itu, otonomi juga menjadi alat penyelesaian konflik.

Dalam proses penerapan otonomi, Waller & Wolff (2005) juga memberikan penjelasan dalam bukunya mengenai peran otonomi seperti kutipan di bawah.

On the other hand, autonomy can make a significant contribution to the stabilisation of conflict-prone states, preventing their violent disintegration. As a conflict settlement mechanism, this is exactly what autonomy is meant to achieve: it does not generate peace in itself, but provides space for a transition to peace. The most important contribution that this volume has to offer to the theory and practice of conflict resolution is this: autonomy can only serve in the stabilisation of states facing self-determination conflicts if it is part of a well-balanced approach that draws on elements of consociational techniques, moderated by integrative policies, and tempered by a wider regional outlook.... (Waller & Wolff, 2005)

Kutipan diatas menjelaskan bahwa menurut Waller & Wolff otonomi adalah sebuah konsep yang dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap stabilitas negara-negara yang rawan konflik, mencegah disintegrasi yang dapat memicu kekerasan. Sebagai mekanisme penyelesaian konflik, otonomi berperan dalam menyelesaikan konflik dengan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok etnis yang berbeda untuk mengelola urusan internal mereka secara mandiri dalam

kerangka hukum negara. Konsep otonomi tidak secara langsung akan menciptakan perdamaian namun otonomi akan menyediakan ruang transisi menuju perdamaian. Konsep otonomi juga dapat berkontribusi terhadap stabilitas negara multikultural yang rawan terjadi konflik etnis serta otonomi juga dapat mencegah disintegrasi nasional. Weller & Wolff (2005) menekankan bahwa otonomi secara efektif hanya dapat menyelesaikan konflik jika melakukan pendekatan yang seimbang seperti menggabungkan teknik konsosiasional (*power-sharing*), kebijakan integratif, dan pandangan regional yang lebih luas. Otonomi juga digunakan sesuai dengan desain kelembagaan yang hati-hati. Konsep otonomi akan memberikan ruang yang cukup bagi kelompok non-dominan untuk merasakan pemerintahan sendiri yang nyata, sekaligus mengurangi ketidakamanan kelompok dominan terhadap keberlangsungan negara secara keseluruhan (Weller & Wolff, 2005). Dengan demikian, penerapan otonomi khusus yang memadai dapat menjadi pembeda antara konflik etnis yang berkepanjangan dan kekerasan dengan koeksistensi antar etnis yang damai.

Dalam buku Waller & Wolff (2005) otonomi berperan sesuai dengan jenisnya salah satunya yaitu Otonomi khusus atau *Special Autonomy*. Otonomi khusus merupakan bentuk otonomi yang diberikan cakupan dan kewenangan yang lebih luas dan spesifik dibandingkan otonomi biasa. Otonomi khusus biasanya dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan identitas kelompok minoritas atau etnis tertentu yang memiliki karakteristik unik dan sejarah yang berbeda dalam suatu negara. Otonomi khusus bukan hanya sekadar desentralisasi administratif, melainkan sebuah pengakuan politik yang mendalam terhadap hak-hak kolektif kelompok tersebut yang meliputi pengaturan urusan internal secara mandiri, termasuk aspek budaya, hukum adat, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Otonomi khusus memiliki definisi yang sama dengan otonomi teritorial seperti kutipan dari Waller & Wolff (2005) dalam bukunya *Autonomy, Self-governance and Conflict Resolution*:

Territorial autonomy is an arrangement aimed at granting a certain degree of self-identification to a group that differs from the majority of the population in the state, and yet constitutes the majority in a specific region.

Autonomy involves a division of powers between the central authorities and the autonomous entit (Waller, 2005)

Melalui kutipan diatas dijelaskan bahwa otonomi teritorial merupakan sebuah kebijakan yang diatur guna memberikan tingkat identifikasi identitas tertentu kepada suatu kelompok yang berbeda dari mayoritas penduduk di suatu negara namun tetap menjadi bagian dari mayoritas di suatu wilayah tertentu. Otonomi ini akan melibatkan pembagian kekuasaan antara otoritas pusat dan entitas otonom. Karakteristik utama otonomi khusus adalah pemberian kewenangan yang bersifat eksklusif dan terkadang dilengkapi dengan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa kelompok yang bersangkutan dapat mempertahankan identitas dan hak-haknya tanpa intervensi yang merugikan dari pemerintah pusat atau kelompok mayoritas. Dalam konteks desain institusional yang inovatif, otonomi khusus berfungsi sebagai alat untuk mengelola keragaman dan konflik dengan memberikan ruang yang cukup bagi kelompok minoritas untuk mengatur urusan mereka sendiri secara efektif dan berkelanjutan (Waller & Wolff, 2005). Dengan demikian, otonomi khusus menjadi instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan antara kesatuan negara dan pengakuan terhadap pluralitas masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketegangan dan potensi konflik horizontal di masyarakat yang terpecah secara etnis.

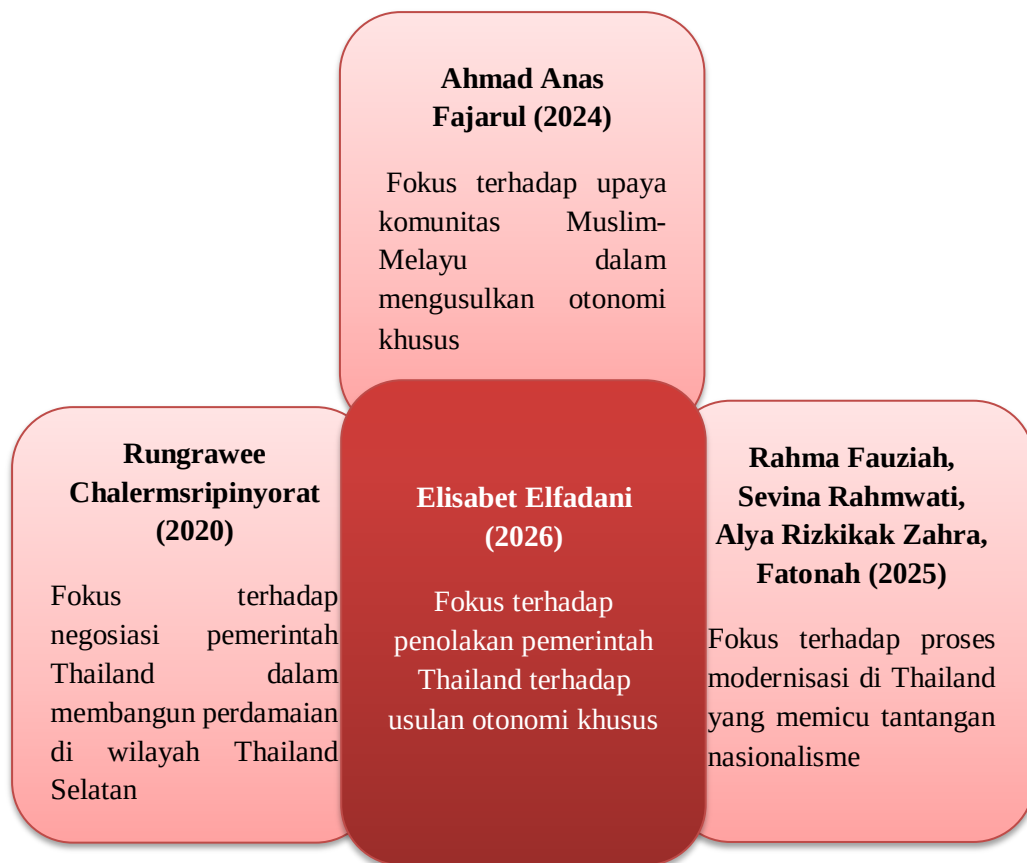
Otonomi khusus dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang memberikan hak dan keistimewaan khusus kepada wilayah atau kelompok tertentu, dimana memungkinkan bagi mereka untuk menjalankan pemerintahan sendiri dalam beberapa aspek tertentu, sementara pemerintah pusat tetap memegang kendali atas aspek negara seperti pertahanan, hubungan luar negeri dan keuangan. Maka, kebijakan ini seringkali dijadikan sebagai tuntutan untuk menyuarakan hak-hak bagi para kelompok minoritas yang tertindas. Oleh karena itu, Otonomi khusus seringkali dijadikan sebagai upaya penyelesaian konflik etnis di beberapa negara berkonflik. Konsep ini dapat membantu meredakan konflik dan menciptakan perdamaian di wilayah yang sebelumnya tengah mengalami konflik bersenjata. Salah satu gagasan utama dalam penerapan otonomi khusus yaitu untuk mengatasi ketidakadilan dan konflik historis yang muncul akibat kesenjangan etnis atau

regional. Kesenjangan yang terjadi dalam negara baik berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial masyarakat maka akan menimbulkan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertindas. Kondisi ini dapat mengancam integritas bangsa.

Meskipun pemberian otonomi khusus membebaskan beberapa kewenangan yang berbeda dengan negara namun pemerintah pusat tetap melakukan pemantauan dan mempertahankan kendali atas isu-isu yang berkaitan dengan kesatuan negara, seperti; pertahanan, hubungan luar negeri dan kebijakan moneter. Dengan demikian penerapan otonomi khusus hanya digunakan untuk pembebasan beberapa kewenangan daerah untuk tetap menjalankan peraturan sesuai dengan identitas kelompok etnis tertentu dibawah naungan pemerintah pusat. Kebijakan otonomi khusus menjadi penting mengingat negara tetap berupaya untuk mempertahankan wilayahnya tanpa harus melakukan tindakan asimilasi budaya sehingga menimbulkan aksi pemberontakan untuk memisahkan diri dari kelompok minoritas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian merupakan bagian untuk menguatkan penelitian ini yang memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda. Perbandingan kajian studi terdahulu akan menambah dan menguatkan penelitian ini. penulis mencantumkan 3 studi terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini:



Gambar 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu (Sumber: Diolah oleh penulis, 2025)

Dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Penolakan Pemerintah Thailand terhadap tuntutan Otonomi Khusus di Thailand Selatan” penulis membahas mengenai respon dan alasan penolakan tuntutan otonomi khusus di Thailand Selatan oleh Pemerintah Thailand. Fokus penelitian ini merujuk pada aspek politik dan sosial di Thailand yang mengacu pada kebijakan pemerintah Thailand dalam merespon tuntutan otonomi khusus sebagai alat perdamaian pada konflik separatisme. Oleh karena itu, untuk dapat membedakan penelitian terbaru

dengan penelitian lama maka penulis perlu melakukan kajian dengan studi terdahulu seperti dalam gambar 2.1 diatas :

Pertama, penelitian Rungrawee Chalermripinyorat (2020) yang berjudul “*Dialogue Without Negotiation: Iliberal Peace-Building in Southern Thailand*”, berupa artikel yang dimuat dalam jurnal *Conflict, Security & Development* Vol.20 No.1 ini membahas mengenai negosiasi pemerintah Thailand dalam membangun perdamaian di wilayah Thailand Selatan dengan tindakan yang tidak liberal, dalam arti bahwa pemerintah Thailand telah mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan dengan menggunakan metode yang otoriter, mereka cenderung menggunakan pendekatan realisme dalam mengembangkan perdamaian di Thailand Selatan. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian tersebut terdapat pada respon pemerintah Thailand hingga saat ini dalam merespon dan menyelesaikan konflik etnis di Thailand Selatan. Sementara itu, perbedaan dalam skripsi ini yaitu konsep dan perspektif yang digunakan, dalam skripsi ini penulis menggunakan fokus penelitian dalam aspek politik dan sosial untuk menjawab alasan penolakan pemerintah Thailand terhadap aspirasi kebijakan otonomi khusus sebagai solusi penyelesaian konflik sedangkan dalam penelitian Rungrawee Chalermripinyorat hanya berfokus pada aspek politik terhadap upaya penyelesaian konflik di Thailand Selatan dengan metode dialog perdamaian.

Kedua, Penelitian Rahma Fauziah, Sevina Rahmawati, Alya Rizkika Zahra, Fatonah (2025) yang berjudul “Dari Monarki Absolut ke Pemerintahan Konstitusional: Jejak Modernisasi Thailand” berupa artikel yang dimuat dalam Jurnal Pengetahuan Integrasi Disiplin Vol.6 No.21 membahas mengenai proses modernisasi di Thailand yang dimulai pada masa kepemimpinan Raja Mongkut. Modernisasi ini memicu tantangan nasionalisme bagi pemerintah Thailand, khususnya wilayah Thailand Selatan yang di dominasi oleh masyarakat Muslim-Melayu, dimana kebijakan modernisasi yang cenderung mengutamakan identitas “Thai” menyebabkan terpinggirkannya identitas etnis Muslim-Melayu sehingga memicu gerakan separatisme di wilayah Thailand Selatan. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian tersebut terdapat sejarah modernisasi negara Thailand Selatan dalam merubah tata kelola negaranya yang kemudian

menimbulkan tantangan nasionalisme seperti konflik Separatisme. Sementara itu, perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian sebelumnya yaitu skripsi ini menggunakan fokus terhadap aspek politik pemerintah Thailand dalam mempertahankan sikap nasionalisme dan integrasi nasional dari ancaman konflik separatis yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari negara Thailand setelah adanya transisi modernisasi pemerintahan Thailand. Sedangkan fokus penelitian sebelumnya lebih tertuju pada transisi modernisasi Thailand yang dapat menimbulkan tantangan nasional.

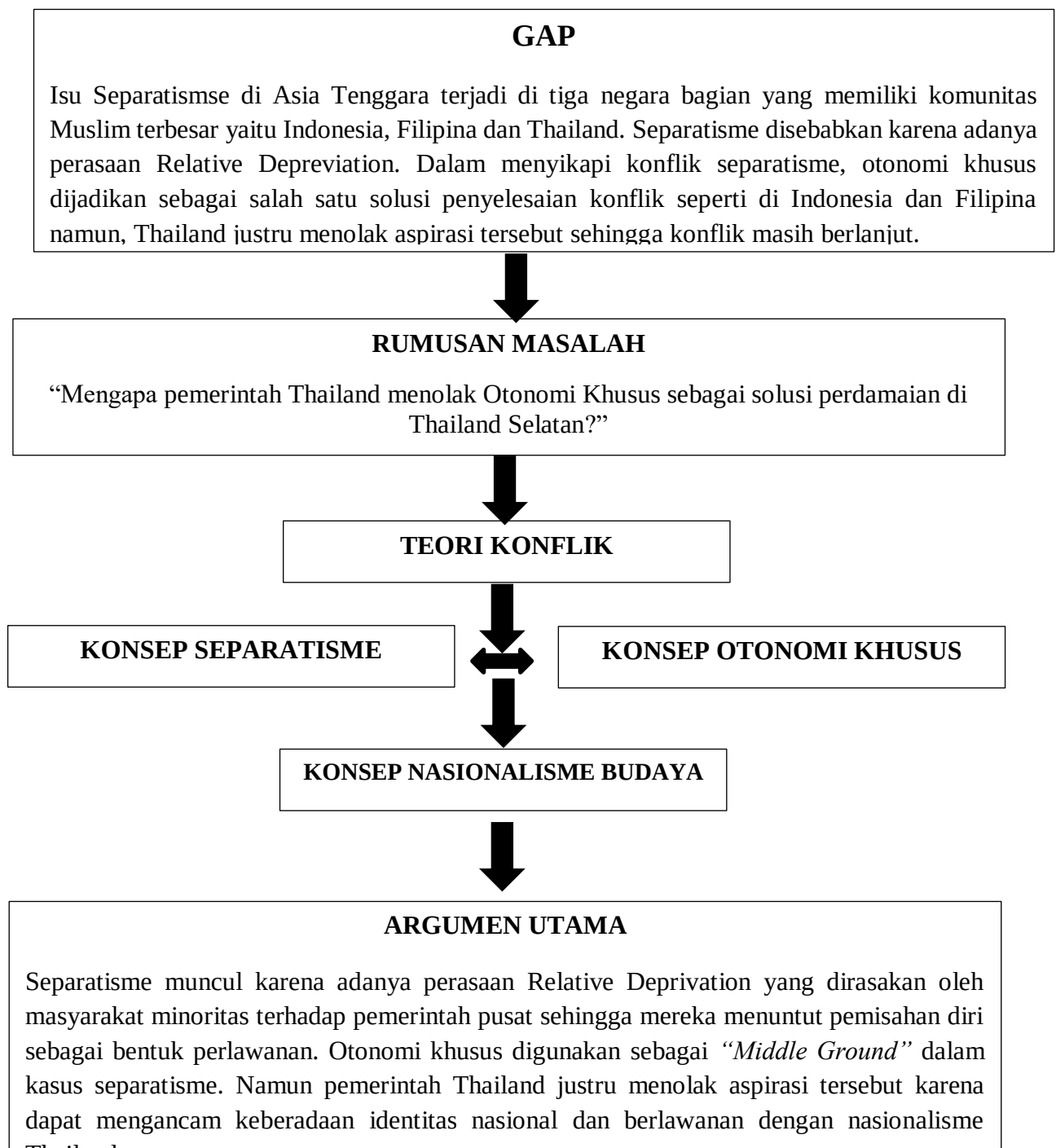
Terakhir, penelitian Ahmad Anas Fajarul (2024) yang berjudul “Protes Masyarakat Muslim Melayu Pattani sebagai Upaya Memperoleh Hak Otonomi, 1902-1948” berupa artikel yang dimuat dalam jurnal *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* Vol.8 No.1 membahas mengenai usaha kelompok Muslim-Melayu dalam mengusulkan otonomi khusus di wilayah Thailand Selatan untuk mempertahankan identitas melayu dari kekangan pemerintah Thailand. Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian sebelumnya terdapat dalam pembahasan aspirasi otonomi khusus yang diusulkan oleh para komunitas Muslim-Melayu sebagai upaya meminta keadilan dan hak-hak identitas mereka dari kebijakan asimilasi identitas “Thai” sejak pemerintahan kerajaan Siam. Sementara itu, perbedaan dalam skripsi ini, penulis lebih fokus dalam aspek politik dan sosial yang digunakan untuk menjawab alasan pemerintah Thailand menolak aspirasi Otonomi Khusus sebagai salah satu alat perdamaian di Thailand Selatan sedangkan penelitian sebelumnya fokus dalam aspek sosial pada gerakan protes masyarakat Muslim-Melayu dalam mengupayakan aspirasi otonomi khusus sebagai solusi penyelesaian konflik separatisme di Thailand Selatan.

Melalui kajian penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa skripsi ini belum terdapat studi yang mengkaji secara spesifik membahas mengenai penolakan otonomi khusus di Thailand Selatan oleh Pemerintah Thailand sebagai solusi penyelesaian konflik Separatisme. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas secara spesifik mengenai alasan pemerintah Thailand dalam merespon tuntutan otonomi khusus di Thailand Selatan sebagai alat perdamaian pada konflik separatisme dengan menggunakan Teori Konflik, Konsep Nasionalisme, Konsep

Integrasi Nasional, Konsep Separatisme dan Konsep Otonomi Khusus untuk membantu penulis menemukan hasil kajian dari penelitian ini.

2.3 Ringkasan Penerapan Teori

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menganalisis respon penolakan pemerintah Thailand terhadap tuntutan Otonomi Khusus yang telah diusulkan oleh kelompok Separatisme di Thailand Selatan sebagai solusi jalan menuju perdamaian. Penulis memanfaatkan kajian-kajiannya terdahulu untuk mempermudah analisa penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori dan Konsep Etnopolitik seperti Teori Konflik, Konsep Nasionalisme, , Separatisme, dan Otonomi Khusus.



Gambar 2.2. Ringkasan Penerapan Teori, (Sumber: Diolah oleh penulis, 2025)

Teori konflik digunakan untuk menjelaskan bagaimana konflik dapat muncul di dalam keberagaman etnisitas yang ada di negara multikultural salah satunya negara Thailand. Dalam skripsi ini, teori ini dikembangkan menggunakan konsep *Relative Deprivation* sebagaimana dikemukakan oleh Robert Tedd Gurr seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya. Konsep ini digunakan untuk menjawab akar permasalahan konflik di Thailand Selatan. Konsep Separatisme dalam skripsi ini digunakan untuk menjawab bagaimana pola separatisme dapat terjadi di Thailand Selatan, dimana separatisme saling berkaitan dengan Teori Konflik. Dalam menanggapi konflik Separatisme salah satu penyelesaian konflik yaitu menggunakan Konsep Otonomi Khusus, oleh karena itu konsep tersebut akan digunakan untuk menjawab bagaimana peran otonomi khusus sebagai “*Middle Ground*” di tengah konflik Thailand Selatan.

Untuk menjawab pertanyaan riset mengapa Pemerintah Thailand menolak aspirasi otonomi khusus di Thailand Selatan akan digunakan dua konsep, yaitu Konsep Nasionalisme Budaya. Konsep tersebut merupakan akar dari terbentuknya identitas nasional sebuah negara. Identitas nasional merupakan sebuah simbol bangsa dalam suatu negara. Identitas nasional akan menciptakan sikap Nasionalisme suatu bangsa sebagai bentuk rasa bangga atas kepemilikan identitas tersebut. Oleh karena itu, penggunaan Konsep Nasionalisme Budaya digunakan untuk menjawab alasan penolakan pemerintah Thailand terhadap aspirasi otonomi khusus oleh masyarakat Pattani.

Dengan menggunakan konsep di atas, skripsi ini berargumen bahwa penolakan otonomi khusus di Thailand Selatan oleh pemerintah Thailand karena terdapat 2 faktor alasan yaitu sebagai berikut;

Pertama, otonomi khusus dapat mengancam keberadaan identitas nasional, alasan ini berhubungan dengan konsep Nasionalisme Budaya, keberadaan identitas nasional merupakan aspek yang dapat menciptakan sikap nasionalisme bangsa ‘Thai’. Melalui Nasionalisme bangsa kemudian muncullah integrasi nasional

sebagai konsep yang menyatukan seluruh elemen bangsa seperti; ras, suku, agama dan budaya. Namun konsep otonomi khusus yang diusulkan sebagai solusi perdamaian konflik separatisme justru dapat membahayakan keberadaan identitas nasional, dimana konsep ini memberikan pengakuan terhadap identitas lain sehingga hal tersebut dapat mengancam peran identitas nasional. Ancaman ini juga akan memicu peran kelompok Nasionalis Thailand sebab dikhawatirkan terjadi disintegrasi Nasional.

Alasan kedua, otonomi khusus dapat berpotensi menyebabkan disintegrasi nasional, alasan ini masih berkaitan dengan konsep nasionalisme budaya karena otonomi memberikan hak kepada kelompok separatis untuk mendapatkan pengakuan secara khusus sehingga memicu kecemburuan etnis lain. Oleh karena itu, kecemburuan tersebut akan memicu tuntutan serupa di wilayah lain sehingga mengancam persatuan negara.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut John W. Creswell pendekatan diskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berorientasi pada pemahaman suatu makna dalam sebuah fenomena melalui penggambaran yang komprehensif terhadap kondisi atau peristiwa yang diteliti (Cresswell, 2014). Penulis memilih pendekatan ini karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai dinamika konflik, peran agama, dan penerapan otonomi khusus dalam konteks Thailand Selatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, motif dan perspektif dari berbagai sumber yang relevan dengan isu yang diteliti. Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif peneliti berupaya untuk menangkap kompleksitas sosial dan politik melingkupi permasalahan yang sedang diteliti.

3.2 Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian ini adalah konflik separatisme di Thailand Selatan yang melibatkan komunitas Muslim-Melayu dengan pemerintahan Thailand, dengan fokus khusus pada peran agama dan penerapan otonomi khusus sebagai solusi penyelesaian konflik. Fokus penelitian ini mencakup analisa terhadap dinamika konflik peran agama dalam memperkuat identitas suatu kelompok yang bertikai dan sebagai evaluasi terhadap penerapan otonomi khusus sebagai strategi meredam konflik separatisme serta mempromosikan perdamaian

3.2.1 Batasan Materi

Batasan Materi dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap studi literatur yang relevan, termasuk studi-studi yang telah diterbitkan mengenai konflik di Thailand Selatan, peran agama dalam konflik serta peranakan otonomi khusus di negara khususnya wilayah Asia Tenggara. Selain itu, Penelitian ini mencakup juga analisis terhadap dokumen-dokumen kebijakan, perjanjian damai, dan laporan-laporan dari organisasi internasional yang berkaitan dengan upaya penyelesaian

konflik di Thailand Selatan. Fokus utama dalam penelitian ini ada pada peran agama dan otonomi khusus dalam meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian.

3.2.2 Batasan Waktu

Batasan Waktu dalam penelitian ini meliputi analisis peristiwa dan perkembangan yang terjadi sejak tahun 1947 hingga 2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada konflik separatisme di Thailand Selatan yang pertama kali terjadi akibat penolakan usulan otonomi oleh tokoh ulama di Pattani yaitu Haji sulong yang dianggap sebagai perlawanan terhadap kebijakan Siamisasi yang kemudian Haji Sulong ditangkap dan dibunuh. Peristiwa tersebut memicu kebangkitan separatisme di Thailand Selatan dimana mereka terus menuntut pemisahan Thailand Selatan dari negara Thailand atau pemberian otonomi khusus terhadap wilayah Thailand Selatan. Namun hingga pada tahun 2024 pemerintah Thailand belum dapat memberikan solusi penyelesaian konflik dan masih menolak usulan otonomi khusus sebagai alat perdamaian.

3.3 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Kedua teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan tanpa harus melakukan penelitian lapangan yang mungkin dapat terhambat oleh berbagai kendala praktik dan etis. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber sekunder yang relevan, termasuk artikel ilmiah, buku, laporan penelitian dan publikasi dari organisasi internasional. Sedangkan Analisis dokumen mencakup peninjauan terhadap dokumen-dokumen kebijakan, perjanjian damai, undang-undang dan laporan dari organisasi internasional yang berkaitan dengan konflik di Thailand Selatan dalam kasus penerapan otonomi khusus.

3.4 Keabsahan Data

Dalam memastikan keabsahan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa strategi seperti triangulasi sumber dan validasi literatur. Triangulasi Sumber merupakan metode yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data seperti artikel Ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan untuk memverifikasi temuan-temuan utama (Bowen, 2008). Penulis melakukan metode triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai sumber data yang kemudian di bandingkan dengan temuan-temuan lain. Seperti data yang dicantumkan dalam satu penelitian untuk memastikan validasi data tersebut maka penulis akan melakukan perbandingan dengan penelitian data lainnya. Data bersumber dari artikel dan jurnal ilmiah. Dengan demikian penelitian ini dapat memastikan bahwa temuan yang dihasilkan lebih valid dan dapat diandalkan.

Kedua, penulis menggunakan metode Validasi Literatur. Validasi literatur adalah metode yang dilakukan dengan memilih sumber-sumber yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti jurnal ilmiah terakreditasi, buku yang diterbitkan oleh penerbit terkemuka, dan laporan dari organisasi internasional yang diakui (Hart, 2018). Contohnya Jurnal terakreditasi Scopus, Sinta, kemudian buku yang diterbitkan oleh Oxford dan Cambridge dan lain sebagainya. Metode ini digunakan penulis guna memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dasar akademis yang kuat dan diakui secara luas dalam komunitas ilmiah.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses dari interpretasi data. Menurut Cresswell, interpretasi data adalah sebuah proses yang memberikan makna terhadap hasil analisis data (Cresswell, 2014).

Data analysis involves organizing and preparing the data for analysis, reading through all the data, coding the data, and then interpreting the meaning of the data. (Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2014)

Intepretasi data dapat diartikan sebagai proses menjelaskan hasil penafsiran temuan untuk dihubungkan dengan pertanyaan penelitian dan teori, selain itu juga

untuk mengimplikasikan temuan yang lebih luas (Cresswell, 2014). Proses interpretasi data merupakan tahap lanjutan dari analisis data yang bertujuan untuk memberika makna yang lebih dalam terhadap temuan penelitian. Intepretasi data dilakukan dengan cara menafsirkan hasil pengkodean dan tema-tema yang telah diidentifikasi kemudian dikaitkan dengan konteks penelitian (Cresswell, 2014).

Peneliti tidak hanya mendiskripsikan data namun juga menggali makna dibalik pola dan hubungan antar kelompok yang menjawab rumusan masalah. Dalam proses ini peneliti juga melakukan refleksi kritis, membandingkan temuan dengan literatur sebelumnya, serta menarik kesimpulan yang bersifat konseptual. Dengan demikian, intepretasi data menjadi proses penting yang mengubah data mentah menjadi pemahaman yang utuh, bermakna dan relevan. Interpretasi ini didasarkan kepada kerangka teori yang relevan, serta didukung dengan data empiris yang diperoleh dari studi literatur dan analisis dokumen. Peneliti akan mempertimbangkan konteks sosial, politik dan budaya yang dapat mempengaruhi dinamika konflik dan penerapan otonomi khusus.

3.6 Sistematika Penulisan

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan rumusan masalah dengan menjabarkan analisis pada karya ilmiah ini secara garis besar menggunakan sistematika penulisan. Penulis akan membagi sistematika ini dalam 5 bab mulai dari: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan dan Kesimpulan.

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai penjelasan pada latar belakang terjadinya permasalahan terhadap judul yang diambil oleh penulis yang kemudian dilanjutkan dengan menyimpulkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan ditutup dengan manfaat penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan mengenai penjelasan terhadap teori dan konsep yang dapat dihubungkan dan dianalisa dengan rumusan masalah penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Teori konflik, Teori Integrasi Nasional dan Teori Kedaulatan Negara. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian terbaru dan penerapan teori.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini berisikan mengenai penjelasan terhadap metode penelitian yang digunakan oleh penulis selama menjalankan analisis karya ilmiah ini. Dalam tahapnya penulis membaginya menjadi 6 bab yaitu pendekatan penelitian, objek dan fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dan keabsahan data, teknik analisis serta sistematika penulisan.

BAB 4 Alasan Penolakan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Thailand di Thailand Selatan

Bab ini berisikan mengenai menjabarkan secara rinci terhadap pembahasan pada penelitian ini. Pertama, penulis akan menjabarkan sejarah pertama awal mula masuknya Agama Islam di wilayah Selatan Thailand kemudian Aneksasi wilayah Pattani ke dalam wilayah Siam hingga terjadinya separatisme dan tuntutan otonomi khusus di Thailand Selatan. Kedua, penulis akan menjelaskan respon dan alasan pemerintah Thailand Selatan terhadap penerapan otonomi khusus di Thailand Selatan.

BAB 5 Kesimpulan

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dalam penelitian ini, dalam bab ini penulis akan menjelaskan intisari dalam penelitian yang telah dipaparkan pada seluruh bab yang penulis teliti.

BAB 4. PENOLAKAN OTONOMI KHUSUS OLEH PEMERINTAH THAILAND DI THAILAND SELATAN

Dalam bab ini penulis bertujuan untuk membahas secara rinci bagaimana konflik separatisme di Thailand Selatan dapat terjadi, upaya masyarakat Muslim-Melayu untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai warga negara Thailand dan membebaskan identitas Melayu dari campur tangan identitas Thai melalui aspirasi otonomi Khusus. Kemudian penulis akan membahas mengenai respon pemerintah dalam menanggapi aspirasi otonomi khusus oleh masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan, terakhir penulis akan menjabarkan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah Thailand dalam merespon aspirasi otonomi khusus. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan argumentasi serta data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Terutama dalam menjawab alasan mengapa otonomi khusus di Thailand Selatan tidak dapat dilaksanakan seperti negara-negara tetangga.

4.1 Sejarah Munculnya Konflik Separatisme dan Tuntutan Otonomi Khusus di Thailand Selatan

4.1.1 Sejarah Penyebaran Islam di Thailand Selatan

Thailand Selatan memiliki sejarah yang panjang dalam penyebaran agama Islam di kawasan Semenanjung Malaya. Islam masuk di kawasan Thailand Selatan sejak abad ke-10 dan 13. Terdapat wilayah utama yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah ini, yaitu Pattani, Yala, dan Narathiwat. Ketiga daerah ini dianggap sebagai rumah bagi komunitas Muslim-Melayu yang ada di Negara Thailand (Mania, 2019). Dalam catatan sejarah perkembangan Islam di Semenanjung Malaya, India dan China memainkan peran dalam penyebaran Agama Islam melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Timur Tengah. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia dan India sering berkunjung dan berhenti di pelabuhan sepanjang pesisir Semenanjung Malaya, termasuk wilayah Thailand bagian Selatan yaitu daerah Pattani yang pada saat itu daerah ini menjadi salah satu pusat perdagangan utama (Karasa, 2017). Kondisi ini telah menunjukkan penyebaran Agama Islam di Thailand Selatan

dipengaruhi oleh kehadiran para pedagang Muslim yang melakukan kunjungan serta melakukan transaksi perdagangan di kawasan Thailand khususnya Pattani.

Pattani merupakan wilayah di Thailand Selatan yang dahulu di kuasai oleh sebuah kerajaan Islam merdeka. Kerajaan ini disebut dengan Kesultanan Pattani, berdiri pada abad ke-14, dan menjadi pusat kerajaan Islam di wilayah Thailand Selatan. Berdirinya Kesultanan Pattani telah membantu penyebaran ajaran Agama Islam di kalangan orang Melayu asli yang bermukim di wilayah Thailand bagian Selatan (Karasa, 2017). Penguasa Kesultanan Pattani disebut sebagai Sultan yang merupakan seorang penguasa beragama Islam memiliki ajaran ilmu agama yang mendalam. Seorang sultan memiliki peran penting dalam membantu menyebarkan Islam kepada seluruh masyarakatnya. Salah satu peran seorang sultan yaitu dengan membangun kerjasama dengan Kesultanan lain yang berada di wilayah Semenanjung Malaka. Seperti hubungan kerjasama antara Kesultanan Pattani dengan Kesultanan Malaka di mana keduanya merupakan tempat pusat utama diaspora Islam di Asia Tenggara. (Andaya, 2010). Dengan demikian, kekuasaan wilayah Pattani yang dipimpin oleh seorang Sultan dan kerjasama dengan Kesultanan lainnya telah berhasil membawa pengaruh Islam di wilayah Thailand Selatan.

Penyebaran agama Islam di wilayah Pattani dikembangkan dalam bentuk pembangunan-pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh penguasa Pattani. Pembangunan tersebut berupa madrasah sebagai pengenalan ajaran budaya dan agama kepada generasi muda dan masjid sebagai tempat ibadah. Tak hanya itu kedua tempat tersebut juga digunakan sebagai tempat untuk mengajarkan dan memperkenalkan ajaran agama Islam kepada generasi-generasi muda (Sanurdi, 2018) Penyebaran Islam di Thailand Selatan tidak hanya melalui bidang pendidikan saja namun juga dalam bidang politik dan sosial. Hubungan Islam di Semenanjung Malaya diperkuat dengan adanya perkawinan anggota keluarga Kesultanan Pattani dengan keluarga kesultanan-kesultanan yang lain. Perkawinan antar keluarga bangsawan kerajaan Islam seringkali didasari pada sistem politik Agama Islam sehingga banyak penduduk penguasa bangsawan lokal yang memeluk Agama Islam (Manan, 2022) Oleh sebab itu, perkembangan penyebaran Islam di

wilayah Semananjung Malaya semakin luas disebabkan oleh faktor hubungan kekeluargaan yang tercipta melalui perkawinan antara keluarga kesultanan yang ada.

Kemampuan para tokoh ulama Islam dalam penyebaran ajaran Islam di Thailand Selatan dapat dikatakan luar biasa. Mereka menyebarkan ajaran Islam menggunakan praktik dengan melakukan penyesuaian diri dengan budaya lokal. Meskipun Islam mengajarkan konsep monoteisme yang ketat dan ritual keagamaan yang mendalam namun ajaran ini dapat menyesuaikan dengan tradisi lokal yang telah ada sebelum tersebarnya Islamisasi (Fraser, 2013). Tradisi adat istiadat budaya Melayu yang menggabungkan ajaran Agama Islam dengan budaya Melayu dapat menciptakan sebuah adat istiadat yang unik. Seperti tradisi upacara pernikahan adat Muslim-Melayu (Merisik, Meminang atau Berinai), seni budaya Islam-Melayu (Hadrach, Tari Zapin, dan Silat), Tahlilan dan acara Mauliadur Rasul (Berzanji dan Qosidah) (Farouk, 1999). Oleh karena itu penyebaran Agama Islam di Thailand Selatan mudah diterima oleh penduduk lokal karena Islam dapat diajarkan dengan menyesuaikan kebudayaan dan tradisi adat istiadat budaya Melayu.

Walaupun penyebaran Islam di Thailand Selatan mudah diterima oleh masyarakat Melayu lokal namun wilayah Thailand Selatan seringkali menjadi tempat terjadinya perselisihan antara Kesultanan Pattani dengan Kerajaan Buddha di Thailand. Kesultanan Pattani sering terlibat dalam konflik dengan Kerajaan Siam (saat ini menjadi Thailand) (Manan, 2022). Dalam sejarah, wilayah Pattani merupakan bagian dari Kerajaan Siam setelah peristiwa aneksasi oleh pemerintah Siam sehingga Pattani menjadi kerajaan yang berada dibawah kekuasaan Siam. Namun tekad komunitas Muslim-Melayu yang memiliki solidaritas tinggi mampu untuk mempertahankan identitas Islam selama bertahun-tahun di tengah tantangan politik dan sosial yang kompleks. Disisi lain, kerajaan Siam selalu berusaha untuk melakukan perluasan wilayahnya di selatan dan berupaya untuk mengambil alih identitas wilayah selatan menjadi identitas 'Thai' (Farouk, 1999). Oleh karena itu, perbedaan agama dan budaya serta kepentingan politik dan ekonomi yang dikemas dalam sebuah kebijakan politik yaitu kebijakan Siamasisai yang diciptakan oleh

Penguasa Siam, peristiwa ini menjadi faktor utama penyebab konflik di Thailand Selatan terjadi.

4.1.2 Interaksi Politik Inggris dengan Thailand

Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak mengalami kolonialisme. Fenomena ini terjadi karena Thailand berhasil menciptakan hubungan diplomatik dengan negara kolonialis salah satunya yaitu negara Inggris. Hubungan antara Inggris dan Siam (saat ini Thailand) sangat berkaitan dengan strategi diplomatik adaptif yang telah dijalankan oleh para raja-raja Kerajaan Siam terutama dalam menjalankan kerja sama politik dan ekonomi (Jinda, 2023). Hubungan diplomatik keduanya secara signifikan pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Raja Mongkut (Rama IV) yang telah berkuasa dari tahun 1851 hingga 1868 yang kemudian di teruskan oleh Raja Chulolangkron (Rama V). Dalam sejarah, Raja Mongkut dikenal sebagai raja modernis yang telah membuka Kerajaan Siam dari pengaruh budaya barat (Jinda, 2023). Kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah Siam dari penjajahan kolonial bangsa Barat.

Pada 8 Oktober 1851 menjadi sejarah awal terbentuknya hubungan antara Inggris dan Siam melalui peristiwa perjanjian Traktat Bowring atau *Treaty of Amity and Commerce* dengan utusan Inggris yaitu Sir John Bowring (Kornphetcharat, 2025). Perjanjian ini telah membuka pelabuhan Siam sebagai perdagangan bebas dan memberikan hak ekstra-teritorialitas kepada warga negara Inggris. Tujuan perjanjian ini untuk melindungi kepentingan Inggris di Wilayah Siam dan mengatur hubungan diplomatik antara kedua pihak (National Library Board, 2025). Oleh karena itu, penyesuaian diri dengan budaya Barat yang dilakukan oleh penguasa kerajaan Siam telah mencegah negara Thailand dari kolonialisme. Namun perjanjian Bowring mencerminkan “semi-kolonialisme” di Thailand karena perjanjian Bowring hanya menguntungkan posisi Inggris dalam mempertahankan kekuasaannya di bidang perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara.

Hubungan Inggris dan Siam tidak terjalin tanpa alasan, ada beberapa alasan yang membentuk hubungan diplomasi antara kedua pihak. Alasan pertama, Siam (Thailand) memiliki peran penting karena kerajaan ini menduduki peran sebagai

Buffer state antara koloni Inggris di Malaya dan Koloni Perancis di Indochina. Bagi Inggris Siam menjadi tempat yang paling baik untuk menjadi penyangga strategis agar tidak terjadi konfrontasi langsung antara dua kekuatan koloni besar (Jinda, 2023).

Kedua, sikap Raja Mongkut dan putranya yaitu Raja Chulalongkorn melaksanakan perintah Inggris untuk melakukan serangkaian reformasi dalam sistem hukum, pendidikan dan administrasi bertujuan untuk memodernisasi negaranya (Jinda, 2023). Kebijakan ini telah membawa Siam sebagai negara yang patuh dan beradab dalam kacamata kolonial barat sehingga kebijakan tersebut mengurangi potensi penjajahan.

Ketiga, Diplomasi menjadi strategi pertahanan Siam, di mana kerjasama antara Inggris dan Siam merupakan bentuk politik sesungguhnya. Inggris sebagai koloni mendapatkan stabilitas kawasan dan akses ekonomi secara mudah sementara Siam menjaga kedaulatan nasionalnya dari kolonialisme bangsa Barat (Jinda, 2023). Oleh karena itu, keputusan Inggris menjalin hubungan dengan Siam bukan karena sikap idealisme namun dorongan atas pertimbangan strategis dan pragmatis. Dibuktikan dengan sikap Raja Mongkut (Rama IV) yang memainkan peran krusial dalam membuka jalur kerja sama secara terbuka dengan Inggris sehingga peran ini telah membawa Siam ke dalam kesuksesan menjaga kedaulatan negaranya di era kolonialisme bangsa Barat.

4.1.3 Aneksasi Kesultanan Pattani oleh Kerajaan Siam

Kesultanan Pattani seperti yang telah dijelaskan pada bab penyebaran Islam di Thailand Selatan bahwa kerajaan ini merupakan sebuah wilayah yang merdeka. Kesultanan Pattani dikenal sebagai kerajaan Islam yang makmur dengan wilayahnya yang strategis di pesisir Timur Semenanjung Malaya. Wilayah Pattani yang strategis menjadi pusat perhatian para pedagang Muslim menjadikan pusat perdagangan mereka sehingga Pelabuhan Pattani ramai dikunjungi oleh pelancong berbagai belahan dunia seperti, Arab, India dan China (Chatae &Fiadi, 2020). Dalam sejarah, Kesultanan Pattani banyak dikenal karena sistem pemerintahannya yang dipimpin oleh empat pemimpin kuat yang disebut sebagai Raja Hijau, Raja

Biru, Raja Ungu dan Raja Kuning. Kekuasaan dari keempat raja tersebut telah berhasil memajukan Pattani dengan keberhasilannya memperkuat ekonomi dan pengaruh kerajaan tersebut di wilayah Semenanjung Malaya (Mania, 2019). Namun, kemerdekaan kesultanan Pattani hanya berlangsung selama 4 abad lamanya karena kerajaan Siam melakukan aneksasi wilayahnya.

Pada abad ke-18, Kerajaan Thonburi (Siam) melakukan peristiwa bersejarah yaitu melakukan aneksasi terhadap wilayah kesultanan Pattani. Pada tahun 1785 Siam melakukan serangan terhadap ibu kota Pattani sebagai pusat daerah Pattani di bawah kepemimpinan Raja Taksin (Chatae &Fiadi, 2020). Peristiwa serangan 1785 merupakan upaya untuk memperkuat pengaruh dan mengkonsolidasikan kekuasaan Siam ke wilayah Semenanjung Malaya. Serangan ini menargetkan titik lemah Kesultanan Pattani yaitu ibu kota Pattani karena wilayah tersebut merupakan pusat perdagangan dan pemerintahan kerajaan. Dampak dari serangan ini yaitu menjadi awal berakhirnya kemerdekaan Pattani dan menyebabkan penduduk lokal Pattani terpaksa melakukan pengungsian dari wilayah tersebut (Chatae &Fiadi, 2020).

Penyebab Siam melakukan aneksasi wilayah Pattani karena letak wilayah Pattani yang strategis dan memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan. Keunggulan yang dimiliki Pattani menjadi potensi ancaman bagi Kerajaan Siam (Chatae &Fiadi, 2020). Faktor ini disebabkan karena kepentingan Siam dengan hubungan negara-negara yang menjalin kedekatan seperti Inggris yang memiliki kepentingan di wilayahnya (Jinda, 2023). Seperti dalam perjanjian Bowring yang melindungi kepentingan Inggris dalam bidang perdagangan bebas. Inggris telah mendorong Siam untuk melakukan aneksasi Pattani sebagai bagian dari wilayahnya (Kornphetcharat, 2025) Oleh karena itu, dukungan yang diberikan oleh Inggris terhadap kebijakan menganeksasi Pattani oleh Siam ditunjukan untuk mendapatkan kekuasaan lebih luas dalam sektor perdagangan.

Pada abad ke 19 tahun 1789 Kerajaan Siam berada di bawah kekuasaan Raja Rama I melakukan penyerbuan dan mengakhiri kemerdekaan Pattani. Siam kembali melakukan serangan terhadap wilayah Pattani. Pasukan siam menyerang kembali wilayah ini dengan maksud tujuan menghancurkan sisa-sisa pertahanan Pattani dan

menegakkan kontrol penuh atas wilayah tersebut menjadi bagian dari kekuasaan Siam (Bradley, 2013). Dalam serangan ini Siam telah berhasil menjadikan hampir seluruh bagian wilayah Pattani menjadi bagiannya yang kemudian membagi Pattani menjadi beberapa provinsi lebih kecil dibawah kekuasaan Pemerintah Siam. Pembagian wilayah Pattani dibagi menjadi tujuh bagian provinsi daerah seperti Pattani, Nongchik, Saiburi, Yala, Yaring, Ra-ngane, dan Raman. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, ketujuh provinsi ini diberikan kebijakan otonom terbatas yaitu dengan wilayah ini dapat dikelola oleh penguasa dari Kesultanan Pattani namun tetap tunduk kepada otoritas Siam (Bradley, 2013). Dengan demikian serangan 1789-1791 menjadi awal perpecahan kedaulatan Pattani di bawah kekuasaan Siam dengan menghasilkan tujuh pembagian wilayah Pattani oleh Siam sebagai langkah strategis Siam untuk mengendalikan wilayah Pattani serta mencegah kembalinya kekuasaan dan persatuan Pattani.

Kerajaan Siam terus berusaha untuk mengambil seluruh kekuasaan tersebut menjadi bagiannya dengan kembali melakukan serangan pada tahun 1808 hingga 1832. Periode ini telah menunjukkan penurunan secara utuh atas kedaulatan Pattani. Salah satu serangan yang paling signifikan terjadi pada 1838, di mana seluruh wilayah Pattani telah berhasil menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Siam (Bradley, 2021). Pada Tahun 1838 secara resmi Kesultanan Pattani menjadi kerajaan yang berada di bawah kepemimpinan Siam walaupun penduduk Pattani beberapa kali berusaha melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Siam namun Siam memiliki aliansi yang kuat dalam mempertahankan kontrol atas kekuasaannya di tanah Pattani dan terus berupaya untuk mengurangi kekuatan lokal yang tersisa. Meskipun secara *de facto* Pattani menjadi bagian kekuasaan Siam namun praktik ajaran Agama Islam dan budaya Melayu masih berjalan secara luas (Bradley, 2021). Dengan demikian, serangan yang dilakukan oleh Pattani selama beberapa tahun mengakibatkan jatuhnya kedaulatan Kesultanan Pattani ke dalam kekuasaan Kerajaan Siam.

Proses pembagian wilayah Pattani diperjelas dengan adanya perjanjian dan kebijakan yang diterapkan oleh Kerajaan Siam dengan Inggris. Perjanjian tersebut merupakan Perjanjian Burney dilakukan pada tahun 1826 di mana negara sekutu

yaitu Inggris mengakui kedaulatan Siam atas Pattani sehingga pengakuan ini semakin memperkuat posisi Siam di Wilayah Pattani. Perjanjian Burney merupakan perjanjian antara Kerajaan Siam dan Inggris yang telah ditandatangani pada 20 Juni 1826 di Bangkok (Noor, 2019). Perjanjian ini diberikan nama Burney diambil dari nama seorang panglima utusan Inggris yaitu Kapten Henry Burney. Tujuan utama perjanjian ini yaitu untuk mengatur hubungan perdagangan dan persahabatan antara kedua negara serta menyelesaikan beberapa isu terkait wilayah di Semenanjung Malaya (Noor, 2019).

Dalam perjanjian Burney adapun beberapa isi bagian utama yaitu seperti *Treaty of Friendship* yang terdiri dari 14 pasal, perjanjian persahabatan yang mengatur hubungan kedua pihak dalam menjalankan perdagangan. Kemudian *Agreement of Trade* terdiri dari 6 pasal yang mengatur seluruh hak perdagangan Inggris di wilayah Siam. Aneksasi wilayah Pattani masuk dalam perjanjian *Agreement of Trade* yang menyatakan bahwa Pattani menjadi tanah Siam selamanya. Perjanjian ini menjadi dasar terbentuknya perjanjian-perjanjian selanjutnya dan membuka pintu liberalisasi perdagangan di wilayah kekuasaan Siam (Noor, 2009) Oleh karena itu, dari perjanjian ini menghasilkan keuntungan kedua pihak, Inggris mendapatkan hak-hak perdagangan di wilayah Siam sedangkan Siam mendapatkan pengakuan Inggris di kawasan Pattani.

Memasuki abad ke-20, tahun 1902 Siam mulai melakukan integrasi formal dari Siam menuju reformasi Thesaphiban dibawah naungan Raja Chulalongkorn (Raja Rama V). Thesaphiban secara harfiah merujuk pada wilayah yang diatur atau wilayah yang diawasi. Reformasi Thesaphiban adalah sebuah peralihan administratif yang disebut dengan Thesaphiban untuk menyatukan seluruh wilayah-wilayah perbatasan ke dalam struktur negara Siam Modern (Haberkorn, 2024) Raja Chulalongkorn memulai reformasi ini dengan dengan membagi Siam menjadi beberapa unit administratif yang disebut dengan *Monthon* (Provinsi). Tujuan dari reformasi ini yaitu memperkuat kekuasaan Kerajaan Siam di Pattani dan mengintegrasikan wilayah Pattani menjadi bagian Kerajaan Siam seutuhnya. Wilayah-wilayah Siam bagian Selatan termasuk Pattani telah resmi bergabung pada tahun 1906. Kesultanan Pattani dimasukkan secara resmi ke dalam Provinsi

Monthon Pattani yang secara sah menjadi bagian administratif Siam bukan lagi kerajaan dibawah kendali Siam (Subrahmanyam, 2018) Kebijakan ini mengakibatkan hilangnya otonomi politik dan budaya bagi masyarakat Muslim-Melayu di Pattani.

Oleh karena itu, walaupun refomasi Thesaphiban bertujuan untuk modernisasi Siam namun dampak reformasi ini sangat buruk bagi kelompok Melayu Pattani karena hak-hak sebagai masyarakat Pattani telah dihapuskan dan tidak lagi memiliki kekuasaan dalam sistem pemerintahan sehingga reformasi ini memicu penolakan dari masyarakat Muslim-Melayu Pattani. Penolakan ini semakin diperburuk dengan adanya kebijakan Siamisasi yang menjadi tonggak awal mula konflik di Thailand Selatan.

4.1.4 Kebijakan “Siam”-isasi Tahun 1909

Negara Thailand merupakan negara yang memiliki identitas “Thai” yang menganut tradisi dan agama Buddha. Dalam sejarah, Thailand dulu diperintah oleh kerajaan-kerajaan Budhha yang telah berevolusi hingga saat ini menjadi negara Thailand. Reformasi ini dapat dibuktikan dengan berbagai situs peninggalan budaya dari kerajaan Buddha yang berada di Thailand (Boonpiam, 1989). Namun wilayah negara Thailand tidak sepenuhnya dihuni oleh masyarakat etnis Thai, di wilayah Selatan Thailand masyarakatnya lebih banyak didominasi oleh masyarakat Muslim-Melayu. Terdapat 3 provinsi besar yang di dominasi oleh masyarakat Muslim-Melayu yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Tiga provinsi tersebut dulu menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Pattani namun kini menjadi bagian dari negara Thailand setelah peristiwa “Siamisasi” (Melvin, 2007).¹ Pada abad ke-20 Raja Chulalongkorn mendapatkan ancaman dari kolonial Inggris dan Prancis untuk mendorong agar mempercepat reformasi dalam hal teritorial dan sentralisasi kekuasaan wilayah Muslim-Melayu. Ancaman tersebut mendorong Raja

¹ “Siam-isasi” adalah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kerajaan Thailand (dahulu bernama Siam) dibawah kepemimpinan Raja Chulalongkorn (Rama V) pada abad-20. Kebijakan ini merupakan strategi politik dan kultural yang bertujuan untuk membangun identitas nasional tunggal berdasarkan etnis, bahasa dan budaya buddha. Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, ”Masyarakat Muslim Thailand dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilisasi Budaya”, Jurnal Hisbah, (Juni 2016) hal.113

Chulalongkron membentuk kebijakan Siamisasi. kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang berupaya untuk mengintegrasikan wilayah Thailand Selatan dan mengasimilasi budaya Melayu ke dalam budaya dan agama etnis Thai (Christopher, 2019). Oleh karena itu, perbedaan dominasi etnis dan agama di wilayah Selatan dan Utara menjadi permasalahan yang menimbulkan pertikaian antara masyarakat Muslim Melayu dengan Pemerintah Thailand.

Proses pembentukan kebijakan Siamisasi diawali dengan langkah sentralisasi dan integrasi wilayah Thailand Selatan. Pada tanggal 10 Maret 1909 telah diadakan penandatanganan perjanjian "Anglo-Siam" oleh Inggris dan Kerajaan Siam. Dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa beberapa wilayah dibawah kekuasaan kesultanan Melayu akan ditempatkan di bawah kedaulatan Siam (Boobpiam, 1989). Wilayah Pattani akan diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan pusat yaitu Siam sehingga proses ini akan mengubah status kesultanan Pattani dari negara menjadi provinsi di bawah kedaulatan Siam. Proses ini didukung oleh Inggris yang berusaha mendorong Siam untuk mengadopsi batas-batas administratif geografis dan mengintegrasikan struktur pemerintahan tradisional ke dalam sistem pemerintahan pusat. Thailand sebagai wilayah yang lebih awal memiliki hak untuk mengintegrasikan dalam kebijakan ini menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki hak yang lebih tinggi (Christopher, 2019). Oleh karena itu, sistem Siamisasi dapat diimplementasikan karena dominasi kekuasaan Thailand terhadap wilayah Selatan lebih besar sehingga mendukung kebijakan sentralisasi dan asimilasi di Thailand Selatan.

Pada tahun 1950-an kerajaan Siam menciptakan kebijakan penggunaan identitas Thai di seluruh wilayah negara Thailand termasuk masyarakat Muslim-Melayu. Kebijakan ini tidaklah mudah diterapkan mengingat syariah agama yang berlaku dalam agama Islam dan Buddha jelas berbeda (Rogozina, 2021). Kebijakan ini bermula setelah peristiwa aneksasi kesultanan Pattani oleh kerajaan Siam pada tahun 1902 yang memutuskan kebijakan untuk menjadikan identitas "Thai" sebagai identitas dan budaya mereka. Dampak dari kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan bagi kelompok Muslim-Melayu di Thailand Selatan, mereka merasa terpinggirkan dalam sektor politik dan ekonomi (Ian, 2008). Masyarakat Muslim-

Melayu melakukan penolakan atas kebijakan tersebut namun pemerintah Kerajaan Siam tetap memaksa menjalankan asimilasi terhadap budaya Muslim-Melayu sehingga hal ini memicu perlawanan dari komunitas Muslim-Melayu sebagai upaya pertahanan identitas mereka (Rogozina, 2021). Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi awal pemicu emosional masyarakat Muslim-Melayu karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat hanya mementingkan identitas mayoritas dan menindas kelompok minoritas.

Kebijakan Siamisasi telah memaksakan budaya Thai untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kelompok Muslim-Melayu di Thailand Selatan. Kebijakan tersebut seperti, pemaksaan penggunaan bahasa Thai di daerah yang didominasi oleh etnis Muslim-Melayu dan melarang penggunaan bahasa Melayu, Pendidikan berbasis kurikulum Thai dan pencampuran ajaran Buddha ke dalam ajaran agama Islam (Saari, 2023). Kebijakan Siamisasi menunjukkan upaya pemerintah Siam untuk mengintegrasikan budaya dan agama etnis Thai sebagai identitas nasional di seluruh wilayah negara Thai. Alasan utama yang memicu ketidakpuasan masyarakat Thailand Selatan yaitu memaksakan untuk menggunakan tradisi dan agama Buddha di kalangan masyarakat Melayu yang beragama Islam (Saari, 2023). Agama merupakan sebuah unsur yang menjadi bagian dari identitas suatu kelompok. Selain itu, ajaran agama memiliki banyak perbedaan dalam syariat dan kewajibannya sebagai umat beragama sehingga masing-masing umat juga memiliki cara beribadah sesuai syariat agamanya. Namun, kebijakan siamisasi justru mendorong untuk menjadikan agama Buddha sebagai kewajiban bagi warga negara Thailand termasuk seluruh masyarakat Melayu yang beragama Islam (Nidhiprabha, 2014). Dengan demikian, kebijakan ini menjadi faktor utama dalam munculnya ketidakpuasan masyarakat Muslim-Melayu yang merasa bahwa mereka tidak akan menerima syariat agama mereka dicampuri oleh agama lain.

4.2 Munculnya Gerakan Separatisme

Kebijakan Siamisasi yang menganeksasi Kesultanan Pattani dan mengasimilasi budaya Muslim-Melayu kedalam budaya Thai pada akhirnya

memicu gerakan Separatisme. Separatisme yang terjadi di Thailand Selatan merupakan bentuk unjuk rasa dari kelompok Muslim-Melayu akibat kebijakan asimilasi budaya oleh pemerintah Thailand dari segi kebudayaan Melayu dan agama Islam ke dalam budaya Thai dan agama Buddha. Asimilasi di Thailand Selatan merupakan sebuah kegagalan negara dalam menciptakan kesejahteraan bangsa dimana negara justru telah menciptakan tindakan diskriminasi terhadap penduduk Pattani yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Muslim-Melayu. Bagi masyarakat Muslim-Melayu kebijakan Siamisasi yang telah melarang menggunakan ajaran agama selain agama Buddhist dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kebijakan tersebut merupakan salah satu contoh bukti pemerintah mendiskriminasi kelompok minoritas di Thailand (Rogozhina, 2021). Oleh karena itu, gerakan separatisme yang dilakukan oleh komunitas Muslim-Melayu untuk meminta kembali hak-hak identitas Melayu dan kebebasan beragama di negara Thailand.

4.2.1 Aksi Protes Terhadap Kebijakan Siamisasi

Reaksi masyarakat Pattani muncul sebagai respon suatu kelompok yang merasakan adanya sikap *relative deprivation*. Sesuai dengan penjelasan dalam bab teori bahwa Gurr berpendapat *relative deprivation* adalah sebuah konsep yang menjelaskan persepsi ketidakadilan yang muncul ketika terjadi kesenjangan antara harapan (*expectations*) dengan realitas (*capabilities*) yang diterima (Gurr, 1970). Kesenjangan ini berawal dari kebijakan Siamisasi yang mengasimilasi budaya Muslim-Melayu ke budaya Buddha-Thai. Oleh karena itu kebijakan dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintahan Siam sejak peristiwa aneksasi kesultanan Pattani, khususnya yang berorientasi pada asimilasi budaya Muslim-Melayu telah menciptakan ketidakadilan secara struktural sehingga menjadi akar permasalahan konflik di Pattani.

Faktor terjadinya *relative deprivation* oleh masyarakat Pattani disebabkan pada 3 aspek yaitu asimilasi budaya Muslim-Melayu terhadap aspek sosial, politik, ekonomi. Dalam aspek sosial dampak dari kebijakan asimilasi Siam yaitu seperti kesenjangan bahasa dan pendidikan. Kebijakan ini menjadikan bahasa Thai sebagai

satu-satunya bahasa resmi yang wajib digunakan dalam aktifitas budaya maupun pendidikan. Contohnya seperti, seluruh administrasi pendidikan diwajibkan untuk menggunakan bahasa Thai dan tidak diizinkan untuk menggunakan bahasa Melayu (Shimojo, 2005). Dampak dari kebijakan ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda masyarakat Muslim Melayu, tingginya angka putus sekolah dan keterbatasan mobilitas sosial masyarakat Muslim-Melayu (Shimojo, 2005).

Selain itu, asimilasi pemerintah Siam juga menciptakan kesenjangan identitas dan pengakuan budaya, dimana asimilasi telah menekankan identitas nasional secara tunggal yaitu Thai-Buddhis (Abdullah, 2008). Kebijakan tersebut menyebabkan penghapusan simbol, sejarah dan praktik budaya Muslim-Melayu. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Pattani akibat kebijakan ini munculnya perasaan keterasingan identitas lokal dan melemahnya rasa keterikatan terhadap negara pusat (Abdullah, 2008). Oleh karena itu, perasaan *relative deprivation* muncul atas kesenjangan sosial budaya yang mengutamakan budaya Thai dan melemahkan budaya Melayu.

Faktor kedua yaitu kesenjangan dalam aspek politik. *Relative deprivation* muncul akibat kebijakan Siamisasi yang menciptakan struktur birokrasi dan pemerintahan lokal Pattani yang di dominasi oleh elit Thai-Buddhis dari daerah pusat (Amir, 2013). Pemerintah Thailand juga membatasi hak politik masyarakat Muslim Pattani sehingga mereka tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan politik baik ditingkat lokal maupun nasional. Batasan kebijakan ini tidak hanya dalam aspek partisipasi politik namun juga batasan dalam berekspresi dan berorganisasi oleh masyarakat lokal Pattani. Dampak dari kebijakan ini memperbesar kesenjangan politik sehingga masyarakat Pattani mulai merasa adanya ketidakpercayaan dan ketidakdilan terhadap negara (Amir, 2013).

Faktor ketiga yaitu kesenjangan dalam aspek perekonomian. Pembangunan perekonomian di Thailand yang tidak merata terhadap Provinsi Pattani menjadi faktor munculnya perasaan *relative deprivation* di kalangan masyarakat Pattani. Perbandingan kondisi ekonomi antara Thailand dengan Pattani menunjukkan ketimpangan yang signifikan (Aedasong & Useng, 2024). Thailand secara

nasional memiliki perekonomian yang relatif kuat sesuai dengan data GDP pada tahun 2024 Thailand mendapat 7.986.95 bath sedangkan Pattani hanya mendapatkan 75.697 bath (*National Statistical Office, 2024*). Kondisi tersebut menunjukkan posisi ekonomi wilayah yang jauh dibawah rata-rata nasional. Ketimpangan perekonomian Pattani mencerminkan perbedaan struktural, dimana perekonomian Thailand secara nasional lebih mendominasi (Aedasong & Useng, 2024). Kondisi tersebut disebabkan Thailand cenderung menguasai sektor industri dan jasa sedangkan Provinsi Pattani hanya bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan dengan nilai tambah yang rendah.

Kebijakan siamisasi juga menjadi alasan mengapa perekonomian masyarakat Pattani sangat tertinggal dengan masyarakat di daerah pusat yaitu Bangkok (Burke *at all*, 2013). Kesenjangan ekonomi disebabkan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya dan pembangunan yang bersifat *top-down*. Pemerintah Thailand lebih memprioritas pembangunan ekonomi yang menguntungkan bagi kelompok Thai di daerah pusat. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat Pattani memiliki keterbatasan akses terhadap lahan dan modal yang menjadi faktor utama ketimpangan ekonomi dengan masyarakat di daerah pusat. Selain itu, kebijakan penggunaan bahasa Thai dan standar pendidikan nasional menyebabkan masyarakat Pattani mengalami hambatan struktural untuk mengakses pekerjaan formal khususnya dalam sektor pemerintahan dan perusahaan milik negara (Saari, 2023). Akibatnya, masyarakat Pattani lebih banyak bekerja di sektor informal atau swasta dengan pendapatan yang rendah. (Saari, 2023). Oleh karena itu, dari seluruh faktor kesenjangan yang memicu sikap *relative deprivation* oleh masyarakat Muslim-Melayu disebabkan adanya perasaan ketidakpuasaan terhadap realita yang diciptakan oleh pemerintah Thailand dalam kebijakan Siamisasi.

Pada awal abad ke-20 masyarakat Pattani merespon kebijakan Siamisasi dengan melakukan berbagai aksi protes terhadap pemerintah Thailand. Kondisi ini terjadi sebelum bangkitnya gerakan separatisme di Thailand Selatan. Salah satu bentuk resistensi awal terhadap penerapan kebijakan Siamisasi yaitu penolakan terhadap peresmian bahasa Thai sebagai bahasa nasional dalam sistem pendidikan

dan administrasi di wilayah Thailand Selatan (Shimojo, 2005). Masyarakat Muslim-Melayu menolak kebijakan tersebut karena mereka menganggap penerapan bahasa Thai sebagai bahasa utama akan mengancam identitas budaya Melayu. Masyarakat Muslim-Melayu merasa bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan dalam aspek sosial untuk memperkenalkan budaya Melayu kepada generasi-generasi selanjutnya. Salah satu contohnya karena budaya Thai dijadikan sebagai pondasi dalam bidang pendidikan para pelajar (Herriman, 2005). Aksi protes pertama kali terjadi pada tahun 1939 dimana saat itu pemerintah Thailand dibawah kekuasaan Jendral Plaek Phibunsongkhram menerapkan kebijakan yang mengubah seluruh struktur pemerintah daerah di Thailand Selatan (Shimojo, 2005). Kebijakan ini mengatur peraturan daerah dimana, seluruh provinsi di Thailand Selatan yang sebelumnya memiliki hak otonomi tertentu pada akhirnya mulai diintegrasikan ke dalam administrasi pusat dan mengikuti seluruh rangkaian peraturan kekuasaan di Bangkok. Kebijakan ini tidak hanya merampas hak politik masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan namun juga menciptakan rasa ketidakpuasaan atas hilangnya hak-hak mereka sebagai warga negara Thailand yang beridentitas Muslim-Melayu (Amir, 2013). Sebagai bentuk rasa ketidakpuasan masyarakat Muslim-Melayu, mereka akhirnya melakukan aksi unjuk rasa dan demonstrasi di berbagai kota di Thailand Selatan walaupun dengan dukungan yang terbatas karena militeristik di kawasan tersebut masih dalam pengawasan ketat.

Aksi unjuk rasa terus berlanjut hingga akhir tahun 1940 terjadi gerakan perlawanan sebab kebijakan pemerintah yang menyebarkan agama Buddha di tengah besarnya komunitas Muslim di Thailand Selatan (Amir, 2013). Masyarakat Muslim-Melayu memprotes kebijakan ini karena pemerintah berupaya untuk membangun tempat peribadatan Buddha yaitu Wihara di wilayah Thailand Selatan. Pembangunan ini dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan umat Muslim Thailand Selatan karena wilayah Thailand Selatan lebih di dominasi oleh masyarakat Muslim. Selain itu, Pembangunan Wihara lebih mendapatkan sumber daya yang besar dibandingkan pembangunan Masjid (Mccargo, 2008). Oleh karena itu, kebijakan siamisasi telah mendiskriminasi dan memarginalisasi kelompok Muslim-

Melayu sehingga memicu gerakan-gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari negara Thailand.

4.2.2 Munculnya Gagasan Separatisme

Haji Sulong merupakan tokoh pejuang Muslim di Pattani yang memperjuangkan keadilan identitas Muslim Melayu. Ia merupakan sosok yang pintar dan cerdas dalam mendalami ilmu agama Islam (Husam et al, 2017) Sejak kecil Haji Sulong telah menimba ilmu di pondok pesantren yang terletak di daerah Pattani kemudian saat umurnya 12 tahun ia melanjutkan pendidikan di Mekkah. Selama 20 tahun Haji Sulong mendalami ilmu di Mekkah berharap agar saat ia pulang ke tanah air ia dapat menegakkan syariat agama Islam di wilayah Pattani dan wilayah yang didominasi Muslim-Melayu. Pada tahun 1924 Haji Sulong pulang ke tanah kelahirannya yaitu Thailand, hasil menimba ilmu di Mekkah ia dedikasikan dengan membangun pendidikan dengan menggunakan kurikulum berdasarkan syariat agama Islam. Selain menciptakan kurikulum pendidikan berbasis ajaran agama Islam, Haji Sulong juga menciptakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak Muslim-Melayu (Husam et al, 2017).

Pada tahun 1944 Haji Sulong menciptakan sebuah organisasi yaitu Badan Hukum Syariah. Organisasi ini terbentuk atas dorongan masyarakat Muslim yang merasa adanya tekanan dan intimidasi dari pemerintah Siam. Organisasi ini terbentuk dari dampak kebijakan *Siamisasi* yang telah menghapuskan seluruh kebijakan yang berdasarkan syariat Islam di wilayah Thailand Selatan (Husam et al, 2017). Oleh sebab itu, organisasi ini dibentuk untuk menjadi forum bagi kelompok Muslim-Melayu melakukan perundingan dan kesepakatan terhadap kebijakan Thailand yang menindas kelompok mereka.

Haji Sulong menggelar pertemuan dengan pejuang-pejuang Muslim-Melayu untuk mengadakan perundingan terkait persoalan yang telah merugikan kelompok Muslim-Melayu. Tepat pada 3 April 1947 penyidik dari Bangkok datang ke Pattani untuk berbincang dengan Haji Sulong yang bertujuan untuk menuntut keadilan atas kebijakan Siamisasi yang mendiskriminasi identitas kelompok Muslim-Melayu (Husam et al, 2017) Dalam perbincangan tersebut Haji

Sulong membawa 7 tuntutan yang akan diserahkan sebagai aspirasi bagi kelompok minoritas Muslim-Melayu di Thailand Selatan. Tuntutan tersebut berisikan mengenai kondisi Muslim-Melayu yang tertindas oleh kebijakan Thainess pemerintahan Thailand (Wira Tahe, 2010). Isi dalam 7 perkara tersebut sebagai berikut:

1. Pengakuan wilayah Thailand Selatan sebagai wilayah yang memiliki otonomi khusus
2. Pemberian hak untuk mengatur pendidikan sesuai dengan syariat Agama Islam
3. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi wilayah Thailand Selatan
4. Pemberian hak untuk memiliki wakil pemerintah daerah agar dapat mewakilkan hak suara kelompok minoritas Muslim-Melayu
5. Pengakuan adat dan budaya Melayu Pattani
6. Pemberian Hak untuk mengelola sumber perekonomian wilayah Pattani
7. Pengakuan terhadap kedaulatan dan menghormati integritas wilayah Pattani sesuai batasannya

Dari 7 perkara yang disampaikan bertujuan untuk permohonan pemberian otonomi terhadap pemerintah daerah wilayah Selatan Thailand sebagai wilayah yang berbasis agama Islam, Pendidikan berbasis etnis Melayu, undang-undang pemerintahan berdasarkan syariat agama Islam dan memisahkan mahkamah pemerintah dengan mahkamah Islam (Rosidi, 2016). Usulan Haji Sulong merupakan sebuah usaha untuk memberikan kebebasan daerah Thailand Selatan yang didominasi oleh Muslim-Melayu agar dapat membangun pemerintahan daerah sesuai dengan syariat agama Islam.

Namun hasil usaha Haji Sulong justru dianggap sebagai pemberontakan bagi pemerintah Thailand. Hal tersebut disebabkan karena usahanya dalam membangun pendidikan berbasis agama Islam dan membentuk organisasi yang menciptakan tuntutan terhadap pemerintah Thailand dianggap sebagai tindakan yang melanggar kebijakan pemerintah pusat (Rosidi, 2016). Akibatnya Haji Sulong ditangkap oleh pemerintah Thailand setelah upayanya menyebarkan ajaran agama

Islam di wilayah Thailand Selatan. Saat itu pada tahun 1947 pemerintahan Thailand di bawah kekuasaan Jenderal Phibun Songkram yang menjabat sebagai perdana menteri, disaat pemerintahannya negara Thailand berada dalam kebijakan “*Thainess*” atau Siamisasi. Kebijakan ini mengikat warga negara Thailand untuk wajib menjadi seorang Buddhist dan mengharuskan menggunakan bahasa dan kebudayaan Thai sesuai dengan aturan Monarki Thailand (Almas, 2022). Oleh karenanya, upaya Haji Sulong dalam membangun pendidikan berdasarkan Syariat agama Islam dianggap sebagai pemberontakan terhadap prinsip kebijakan Siamisasi. Thailand merespon peristiwa tersebut dengan melakukan penangkapan Haji Sulong atas tindakannya yang berusaha melawan kebijakan Siamisasi.

Gerakan separatis pertama kali terjadi di Thailand Selatan pada tahun 1948 yang menjadi fenomena penting dalam sejarah di Thailand Selatan. Berawal dari terdengarnya kabar bahwa seorang pemimpin Muslim di wilayah Thailand Selatan yaitu Haji Sulong telah dibunuh oleh pemerintah Thailand karena tindakannya yang dianggap sebagai pemberontakan terhadap kebijakan pemerintah Thailand (Rosidi, 2016). Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu utama yang memperkuat sentimen separatisme di wilayah Thailand Selatan. Fenomena munculnya gerakan separatisme tidak hanya menciptakan ketegangan dalam aspek sosial maupun politik namun juga memperburuk hubungan antara komunitas Muslim-Melayu dengan pemerintah Thailand (Almas, 2022). Oleh karena itu, peristiwa pembunuhan Haji Sulong menjadi penanda awal munculnya gerakan separatisme terjadi di Thailand.

Fenomena pembunuhan Haji Sulong mempercepat gerakan separatisme di Thailand Selatan. Aktivis separatisme mulai gencar melakukan serangan dan perlawanan terhadap militer Thailand yang ditugaskan untuk melawan kelompok separatis (Chalk, 2008). Menanggapi gerakan separatisme Pemerintah Thailand mengambil tindakan pendekatan militeristik untuk mengendalikan konflik Separatisme di Thailand Selatan. Kebijakan militeristik justru semakin memperburuk ketegangan antara hubungan kelompok Muslim-Melayu dengan Pemerintah Thailand (Hartati, 2008). Ketegangan tersebut disebabkan aksi militer

Thailand yang melakukan penangkapan dan penganiayaan terhadap seluruh pemimpin Muslim di Thailand Selatan.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak militer Thailand memicu ketidakpuasan masyarakat Muslim-Melayu. Ketidakpuasan ini muncul sebab masyarakat Muslim-Melayu merasa bahwa kebijakan militeristik telah membawa kondisi Thailand Selatan pada zona yang tidak aman terhadap masyarakat sipil. Pemerintah tidak lagi dapat memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi mereka justru pemerintah dianggap dengan mudahnya melakukan tindakan penangkapan bahkan pembunuhan kepada para masyarakat Muslim-Melayu yang berani melawan kebijakan pemerintah Thailand (Rosidi, 2016). Dengan demikian tindakan militeristik pemerintah pusat justru telah memperburuk kepercayaan masyarakat Muslim-Melayu terhadap Pemerintah Thailand

Seluruh rangkaian aksi protes yang dijelaskan diatas menggambarkan upaya masyarakat Muslim-Melayu yang berusaha untuk mengembalikan hak-hak identitas Melayu dan kebebasan Agama Islam. Protes ini mengundang sejumlah kelompok lokal dari Thailand Selatan yang mulai menciptakan organisasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat Muslim-Melayu. Salah satu organisasi ini disebut sebagai Gerakan Pattani. Meskipun kelompok ini belum terorganisir sebagai gerakan separatis namun keberadaan mereka telah menunjukkan rasa ketidakpuasan masyarakat Muslim-Melayu atas kebijakan Siamisasi (Chalk, 2008). Oleh karena itu, respon militeristik pemerintah Thailand telah memperburuk situasi di Thailand Selatan yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat Muslim-Melayu terhadap pemerintah Thailand.

4.2.3 Terbentuknya Barisan Nasional Pattani (BRN)

Semenjak tragedi gerakan separatisme tahun 1948, kelompok separatis mulai gencar bergerak dan memperbesar komunitasnya. Pada tahun 1960-1970 Thailand Selatan mengalami eskalasi ketegangan hubungan antara kelompok Muslim-Melayu dan pemerintah Thailand. Tahun 1960 dianggap sebagai puncak dari ketegangan kedua pihak yang memicu kebangkitan gerakan separatisme yang lebih terorganisir (Nilsen, 2012). Tragedi pembunuhan Haji Sulong memicu

ketidakpuasan masyarakat Muslim-Melayu yang semakin mengakar, memunculkan berbagai kelompok separatisme yang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan wilayah Thailand Selatan.

Salah satu organisasi separatis yang terbentuk pada tahun 1960 yaitu Barisan Revolusi Nasional Pattani (BRN). Organisasi BRN didirikan oleh sejumlah pemimpin Muslim-Melayu yang menginginkan untuk memisahkan wilayah Thailand Selatan seperti Pattani, Yala, Narathiwat dari negara Thailand. Tujuan dari organisasi ini yaitu BRN menginginkan kebebasan politik, mempertahankan identitas budaya Melayu dan kebebasan agama Islam dari kebijakan pemerintah Thailand (Nilsen, 2012). Organisasi BRN tidak hanya bertujuan untuk melawan pemerintah Thailand namun juga berupaya untuk menggantikan pemerintahan wilayahnya dengan sebuah negara yang sesuai dengan prinsip dan syariat ajaran agama Islam serta nilai-nilai budaya Melayu. Tujuan BRN itu sendiri disebabkan karena BRN berusaha untuk membebaskan dan memerdekakan identitas Muslim-Melayu dari keterikatan identitas 'Thai' (Nilsen, 2012). Oleh karena itu, BRN terus berupaya melawan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan identitas Muslim-Melayu di Thailand Selatan.

BRN dianggap sebagai kelompok yang cukup mendominasi dalam gerakan separatis di Thailand Selatan karena organisasi ini telah menghadapi seluruh tantangan baik secara internal maupun eksternal namun mereka tetap memiliki tekad besar untuk berjuang melepaskan wilayah Thailand Selatan dari negara Thailand. Metode perlawanan BRN tidak hanya menggunakan aksi protes dan demonstrasi namun BRN juga menggunakan perlawanan yang radikal seperti kekerasan fisik maupun bersenjata (Chalk, 2008). Oleh karenanya, ketidakpuasan masyarakat yang terus ditekan oleh pemerintah Thailand menciptakan perlawanan yang semakin intens dari kelompok separatis.

Terbentuk BRN semakin memperkuat kelompok Muslim-Melayu untuk memisahkan diri dari Thailand. BRN terbentuk dari motivasi ideologis pemimpin Muslim di Thailand Selatan. Periode ini banyak anggota BRN yang terinspirasi dari prinsip dan syariat Islam serta nasionalisme Bangsa Melayu untuk membebaskan identitas mereka dari kontrol Thailand. Kelompok separatis BRN berusaha untuk

menciptakan sebuah negara yang berlandaskan pada hukum Agama Islam dan menghidupkan identitas budaya Melayu (Shimojo, 2005) Mereka menganggap negara yang akan dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip Islam-Melayu akan terasa lebih adil dan sesuai dengan identitas mereka. Selain keinginan untuk membentuk negara sendiri, BRN juga terbentuk dari tekanan atas tindakan ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Thailand yang melakukan pengabaian atas pendidikan, ekonomi dan politik Muslim-Melayu (McCoy, 1991). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Thailand mengabaikan identitas Muslim-Melayu telah memperkuat para kelompok separatis untuk berjuang memisahkan diri dari Thailand.

Seiring dengan terbentuknya organisasi BRN, kekerasan antara militer Thailand dengan Masyarakat Muslim Melayu semakin meningkat. Ketegangan hubungan antara pasukan militer dengan kelompok separatis semakin memperburuk keamanan wilayah Thailand Selatan (McCoy, 1991). Kondisi ini telah menarik perhatian pemerintah Thailand yang kemudian pemerintah memutuskan untuk menurunkan pasukan militer ke wilayah Selatan lebih intens untuk meredam aksi separatisme namun pendekatan yang digunakan oleh pemerintah justru semakin memperburuk situasi.

Kebijakan militeristik untuk menangani gerakan separatis justru memperburuk kondisi di Thailand Selatan. Beberapa indikasi diantaranya seperti terjadinya pembakaran desa dan penangkapan sewenang-wenang. Pola penanganan ini didiklarasikan sebagai kondisi darurat sehingga memberlakukan hukum militer (*martial law*) (Euro-Burma Office, 2005). Kondisi tersebut telah menciptakan ketidakpercayaan yang semakin dalam pada masyarakat Muslim-Melayu (Chalk, 2008). Dengan demikian, kebijakan militeristik pemerintah Thailand justru memperburuk rasa permusuhan antara pemerintah Thailand dengan kelompok separatisme.

4.2.4 Munculnya Pattani United Liberation Organization (PULO)

Pembentukan BRN pada awal tahun 1960 semakin memperluas gerakan separatisme di Thailand Selatan. Perkembangan ini dapat dibuktikan dengan

munculnya organisasi-organisasi separatisme lainnya. Salah satu organisasi separatisme yang muncul setelah BRN yaitu Pattani United Liberation Organization (PULO). Berdiri pada tahun 1975 sebagai golongan organisasi yang sama-sama memiliki fokus dengan BRN yaitu memerdekakan wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat atau disebut dengan julukan “Pattani Raya” (Negara Melayu Merdeka) (Chalk, 2008). Kehadiran PULO menjadi periode baru dalam sejarah konflik separatisme di Thailand Selatan.

PULO terbentuk sebagai bentuk respon kelompok Muslim-Melayu yang merasa tidak puas atas cara kerja dan ideologi organisasi BRN. Terbentuknya organisasi PULO lebih terorganisir dibandingkan BRN karena PULO cenderung memanfaatkan pendekatan yang fokus terhadap diplomasi internasional dibandingkan BRN yang fokus pada kekerasan (Hamzah, 2019). Pendekatan diplomasi internasional yang digunakan oleh PULO sebagai bentuk upaya untuk mencari pengakuan kepada pihak internasional atas perjuangan mereka. Seperti memanfaatkan jaringan diaspora Muslim di negara-negara kawasan seperti Malaysia, Indonesia dan beberapa negara kawasan Timur Tengah yang juga memberikan dukungan politik dan moral bagi mereka (Hamzah, 2019). Untuk memperkuat argumen pernyataan diatas, kutipan dibawah ini akan memberikan penjelasan terkait perjuangan PULO dalam memainkan peran diplomasi internasional.

While the peace talks between the Thai government and some Malay-Muslim separatist leaders, including those related to PULO, have faced interruptions, diplomatic efforts continue in diaspora and international arenas to raise awareness and seek support for the Southern Thailand insurgency. These efforts aim to promote negotiation and political dialogue as alternatives to armed conflict, although progress remains fragile and dependent on both domestic and international political will." (International Crisis Group. (2021)

Laporan diatas melalui website *International Crisis Group* pada tahun 2021 menyatakan bahwa perundingan Pemerintah Thailand dengan PULO seringkali mengalami gangguan dan ketegangan. Kondisi ini terjadi karena adanya ketidakpercayaan masyarakat Muslim-Melayu terhadap kebijakan pemerintah Thailand dan tindakan kekerasan yang terjadi di kawasan berkonflik. Adanya

hambatan-hambatan yang terjadi dalam perundingan antar kedua pihak tidak menurunkan semangat PULO untuk terus berupaya menggalang dukungan dari negara-negara asing dan organisasi internasional (*International Crisis Group*, 2021). PULO menyoroti kondisi yang terjadi di Thailand Selatan khususnya terkait diskriminasi kelompok Muslim-Melayu untuk mencari dukungan internasional.

Dampak dari upaya PULO telah membuahkan hasil dengan banyaknya dukungan dari luar negeri terutama oleh diaspora Muslim-Melayu di Asia Tenggara. Bentuk dukungan komunitas diaspora Muslim-Melayu diberikan dalam bentuk dukungan pemberian dialog perdamaian melalui platform media internasional. Tujuan dari dukungan ini sebagai solusi antara pemerintah Thailand dan kelompok Separatis untuk mengendepankan kemanusiaan dan keadilan masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan serta mencegah kekerasan yang mengorbankan nyawa manusia (*International Crisis Group*, 2021). Dukungan ini mendorong PULO untuk terus bergerak melakukan protes dengan menyoroti isu-isu ketidakadilan sosial dan politik di Thailand Selatan. Oleh karena itu, upaya diplomasi PULO telah membawa gerakan separatisme di Thailand tidak selalu berakhir dengan kekerasan namun juga bergerak dalam pendekatan diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Thailand.

Langkah organisasi PULO lebih strategis dalam menjalankan tujuannya yaitu kemerdekaan wilayah Pattani. Organisasi ini melakukan taktik dengan mengembangkan jaringan internasional dan memperkuat basis dukungan di dalam negeri, mereka cenderung lebih fokus pada upaya memobilisasi sosial dan diplomatik politik setelah BRN yang fokus mengandalkan kekuasaan militer (Abdul Aziz, 2018). Organisasi PULO menekankan pada penciptaan dialog politik dan memberikan dorongan kepada pemerintah Thailand untuk memberikan dan mengakui hak-hak identitas kelompok Muslim-Melayu. Organisasi PULO memainkan strategi diplomasi yang cukup intens dengan mengembangkan misinya untuk membangun konsesus internasional yang berkaitan dengan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Pattani dan melakukan tuntutan agar masyarakat internasional memberikan pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah Thailand

(Abdul Aziz, 2018). Dengan demikian taktik yang digunakan PULO justru telah membuka periode baru dalam sejarah separatisme di Thailand Selatan karena diplomasi yang telah dilakukan PULO telah memberikan ruang dialog antara pemerintah Thailand dengan kelompok Muslim-Melayu.

Meskipun PULO memiliki branding yang menonjol sebagai organisasi yang sah dalam perjuangan kemerdekaan Pattani namun PULO tetap merupakan kelompok separatis yang juga terlibat dalam tindakan kekerasan. Organisasi ini sempat terlibat dalam aksi-aksi militer yang menargetkan pasukan keamanan militer Thailand dan beberapa infrastruktur pemerintah pusat di wilayah Thailand Selatan. Salah satu aksi besar yang dilakukan PULO yaitu melakukan serangan terhadap pos-pos militer Thailand di daerah Yala pada tahun 1980-an yang dianggap sebagai kawasan militer yang strategis oleh pemerintah Thailand (Abdul Aziz, 2018). Serangan ini mengakibatkan tewasnya beberapa korban jiwa pada pasukan militer Thailand dan merusak fasilitas posko militer Thailand.

Dampak yang ditimbulkan dalam serangan PULO pada tahun 1980-an cukup signifikan terhadap aspek politik dan sosial di Thailand Selatan. Serangan ini menyebabkan eskalasi ketegangan hubungan antara pemerintah dengan kelompok separatis semakin memburuk (Abuza, 2006). Akibatnya pemerintah Thailand memberlakukan kebijakan untuk memperkuat pertahanan militer di perbatasan wilayah Selatan. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PULO dan kelompok separatis lainnya tidak membawa mereka lebih dekat pada pencapaian kemerdekaan, melainkan memperburuk ketegangan antara kedua belah pihak.

Kebijakan yang intensif dan tekanan militer keamanan dari pemerintah Thailand telah menyebabkan kekalahan kelompok separatis dan berhenti melakukan perlawanan. Faktor utama yang mendorong penurunan intensitas perlawanan yaitu kelompok separatis tidak dapat menyeimbangkan tekanan yang lebih besar dari militer Thailand dan ketidakmampuan mereka untuk memenangkan perlawanan skala besar dengan kerugian yang mereka alami (Chalk, 2008). Tekanan militer Thailand yang mulai diperkuat menyebabkan pemimpin kelompok separatis mengisyratkan untuk menyerah.

Salah satu momen penting dalam sejarah yaitu proses penyerahan melalui dialog pertama antara PULO dengan pemerintah Thailand yang terjadi pada tahun 1989, fenomena ini menjadi langkah besar menuju de-eskalasi konflik. Dampak dalam pertemuan tersebut telah memberikan ruang kedua pihak untuk saling menegosiasikan perdamaian (Abuza, 2006). Pemimpin PULO memberikan usulan untuk mengajukan tuntutan berupa pemberian otonomi yang lebih luas terhadap wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat serta memberikan perlindungan terhadap identitas budaya dan agama Muslim-Melayu. Usulan ini bertujuan untuk mengakomodasi wilayah Thailand dengan keinginan pemerintahan menggunakan sistem *'self-determination'* atau pemerintahan mandiri dibawah kekuasaan pemerintah pusat (Chalk, 2008). Oleh karena itu, penyerahan kelompok separatis dalam perlawanan dengan pemerintah Thailand digantikan dalam tuntutan terhadap pengakuan identitas mereka dalam bentuk diberikannya otonomi secara luas di wilayah Thailand Selatan.

Dalam merespon tuntutan tersebut pemerintah Thailand belum memberikan kebijakan yang efektif. Respon ini dianggap karena pertimbangan bahwa pemberian otonomi dalam skala besar akan memicu banyak perpecahan dan berpotensi merusak kesatuan nasional (Abuza, 2006). Pernyataan tegas diberikan langsung oleh Elite Thailand yaitu Prem Tinsulanonda yang menjabat sebagai Penasehat Kerajaan (*Privy Council*) seperti pernyataan dibawah dalam Zachary Abuza (2006).

We cannot accept that [proposal] as we are Thai. The country is Thai and the language is Thai... We have to be proud to be Thai and have the Thai language as the sole national language. (Abuza, 2006)

Melalui pernyataan Prem Tinsulanonda diatas mencerminkan pandangan nasionalisme Thai yang bersifat monokultural, dimana ia menegaskan bahwa identitas nasional Thailand harus didasarkan pada satu bahasa, budaya dan satu kesadaran bangsa yang homogen (Abuza, 2006). Pemerintah telah mempertegas alasan penolakan otonomi khusus yang dinilai berpotensi mengakui identitas non-Thai sehingga dapat mengancam peran identitas nasional. Pernyataan tersebut menunjukkan resistensi elite terhadap upaya desentralisasi politik yang menjadi

salah satu akar ketegangan antara negara dengan masyarakat Melayu-Patani di Thailand. Oleh sebab itu, aspirasi otonomi secara luas belum mendapatkan respon yang efektif karena aspirasi tersebut bertentangan dengan komitmen dan nasionalisme pemerintah Elite Thailand

Namun, pemerintah Thailand tetap membuka kebijakan khusus bagi kelompok Muslim-Melayu dengan diberikannya otonomi secara terbatas dalam aspek budaya dan agama. Contohnya seperti, pertama, pembentukan lembaga *Southern Border Provinces Administrative Centre* (SBPAC) pada tahun 1981 yang menangani isu sosial, ekonomi dan keamanan wilayah Selatan namun lembaga ini telah bubar pada tahun 2002. Kedua, terciptanya program pembangunan wilayah perbatasan Selatan (*Deep South Development Policy*) berperan meningkatkan perekonomian dan menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi seperti, pembangunan infrastruktur dan bantuan usaha kecil seperti *Thailand SME Support Program*. Pembentukan *Command Operations Center for Southern Border Provinces* (ISOC Region 4) digunakan untuk mengurangi ketegangan dan membuka forum negosiasi tanpa melepas kendali pemerintah pusat (*International Crisis Group* (2009). Kebijakan dengan sasaran yang terbatas diberikan kepada masyarakat Muslim-Melayu telah mendorong tercapainya kesepakatan damai antara pemerintah Thailand dengan kelompok Muslim-Melayu. Meskipun demikian perjanjian ini tidak sepenuhnya telah mengakhiri konflik namun dampak dari perjanjian ini telah menurunkan eskalasi konflik separatisme di Thailand Selatan dan meningkatkan stabilitas keamanan negara Thailand.

4.2.5 Aksi Separatisme 2004-2007

Perjanjian damai yang dihasilkan melalui kebijakan berdasarkan sasaran tertentu terhadap masyarakat Muslim-Melayu sempat menurunkan eskalasi konflik namun hal tersebut tidak bertahan lama karena konflik separatisme kembali terjadi. Gerakan separatisme kembali terjadi dan menjadi periode baru pada tahun 2004 hingga 2007 (Boonratsamee, 2022). Aksi separatisme pada 2004 disebabkan faktor sejarah, sosial, ekonomi dan politik yang kompleks.

Melalui sudut pandang sosial, faktor sosial utama yang memicu bangkitnya separatisme di Thailand Selatan yaitu karena masih adanya tindakan marginalisasi identitas Melayu, ketidakadilan struktur sosial dan pelanggaran hak-hak Muslim-Melayu. Kondisi diperparah dengan kebijakan ambisius oleh perdana menteri Thaksin Shinawatra yang melakukan pembubaran lembaga otonom SBPAC yang dahulu di bangun untuk salah satu lembaga perdamaian antara masyarakat Melayu dengan pemerintah Thailand (*The Free Library*, 2014). oleh karena itu, adanya ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat Muslim-Melayu memicu kebangkitan kembali insugensi konflik separatisme pada tahun 2004

Kemudian, adapun pandangan melalui faktor ekonomi yang disebabkan karena kesenjangan ekonomi di wilayah Thailand Selatan seperti Pattani, Yala dan Narathiwat dikenal sebagai kawasan miskin di Thailand. Ketidakseimbangan ekonomi ini semakin memperparah rasa ketidakadilan dan ketidakberdayaan di kalangan komunitas Muslim-Melayu. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya akses pekerjaan bagi masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan karena identitas Melayu selalu menjadi kendala administratif yang menghambat penerimaan mereka dalam mendapatkan pekerjaan (UNICEF, 2014). Oleh karena itu, kondisi tersebut memicu tingkat pengangguran yang tinggi dikalangan masyarakat Muslim-Melayu sehingga memperdalam rasa cemburu sosial dan frustrasi yang memicu gerakan separatisme kembali terjadi.

Selanjutnya, melalui sudut pandang politik, faktor kembali munculnya separatisme juga dipengaruhi oleh faktor politik yaitu pertama, pembubaran SBPAC oleh perdana menteri Thaksin Shinawatra tanpa mediasi dari pihak Muslim-Melayu telah menimbulkan skeptisme terhadap pemerintah Thailand. Kedua, insiden pembantaian di Krue Se (April 2004) dan Tak Bai (Oktober 2004) memperdalam luka politik yang berujung pada tindakan kekerasan semakin luas di wilayah Thailand Selatan (Bajoria *et al*, 2008). Kekerasan ini tidak hanya memperkuat perlawanan pihak separatis namun juga menciptakan skeptisme terhadap pandangan pemerintah sebagai pihak yang dapat memberikan solusi perdamaian.

Terakhir, pemicu permasalahan utama munculnya konflik separatisme yaitu faktor sejarah, sejak peristiwa aneksasi Pattani oleh Thailand pada abad ke-20 ketegangan antara masyarakat Muslim-Melayu dengan pemerintah Thailand tidak pernah benar-benar selesai. Masyarakat Muslim-Melayu semakin menunjukkan sikap perlawanan sejak terjadinya kebijakan pemberlakuan darurat militer oleh perdana menteri Thaksin dan serangan militan yang semakin intensif seperti pembunuhan dengan kekerasan dan penyerangan secara terorganisir (Minority Rights Group, 2016-1018). Oleh karena itu, pemerintah Thailand dianggap gagal dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini dibuktikan dengan sikap pemerintah Thailand yang masih melakukan tindakan diskriminasi dan memarginilisasi kelompok Muslim-Melayu.

Perilaku diskriminatif dan ketidakadilan pemerintah Thailand seringkali berhubungan dengan bidang pendidikan, pekerjaan dan akses layanan publik. Contohnya, dalam sistem pendidikan pemerintah Thailand memaksakan penggunaan identitas 'Thai' sebagai kurikulum pendidikan masyarakat Muslim-Melayu, kemudian adanya pembangunan ekonomi yang tidak merata sehingga menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang memperburuk kehidupan masyarakat Muslim-Melayu. Selain itu, pemerintah Thailand juga melakukan diskriminasi dalam urusan politik terhadap kelompok Muslim-Melayu dimana para masyarakat Melayu seringkali dipersulit dalam urusan administratif negara (Minority Rights Group, 2016-1018). Oleh sebab itu, sikap ini menjadi sorotan utama karena tindakan diskriminasi ini telah membedakan kelompok Muslim-Melayu dalam mendapatkan fasilitas yang sama dengan masyarakat Thai.

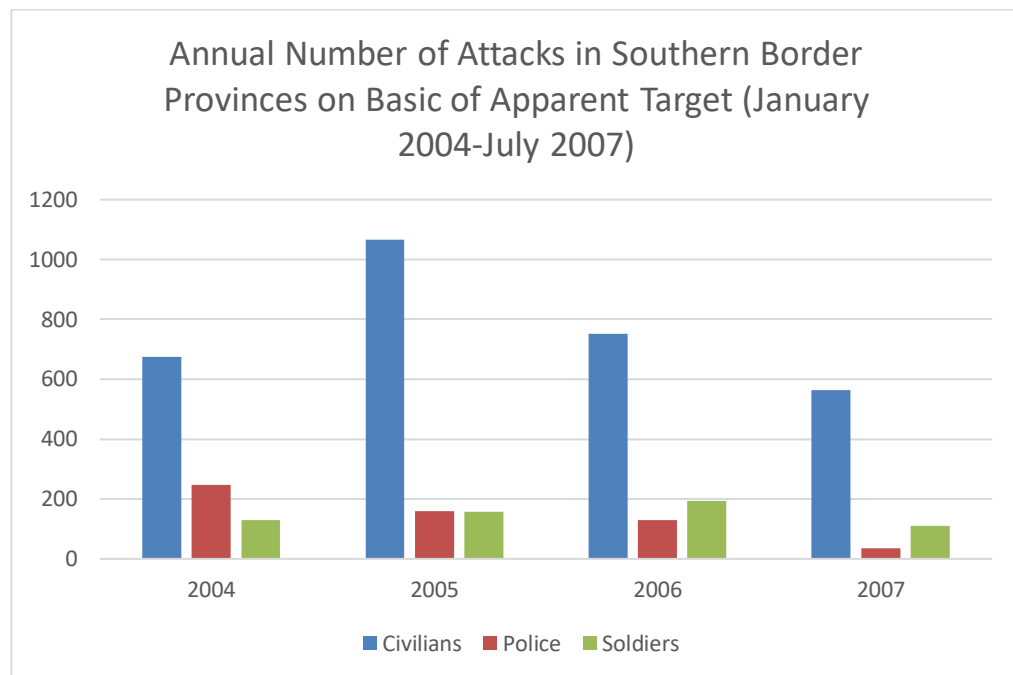


Diagram 4.1 Annual Number of Attacks in Southern Border Provinces on Basic of Apparent Target (January 2004-July 2007)

Sumber : Human Rights Watch and Intellectual Deep South Watch, (2007) diolah oleh penulis (2025)

Peristiwa kekerasan yang disebabkan oleh separatisme di Thailand Selatan mulai meningkat pada tahun 2004 hingga 2007. Diagram 4.1 menjelaskan ketegangan separatisme pada periode 2004 sangat memperburuk kondisi keamanan negara Thailand bagian Selatan. Dampak dari kekerasan ini lebih banyak dialami oleh warga sipil. Seperti data diatas mulai dari 2004 hingga 2007 menunjukkan tingkat korban jiwa warga sipil pada peristiwa ini mencapai seribu lebih dibandingkan korban jiwa dari pihak polisi dan militer. Kondisi menunjukkan perbandingan yang cukup besar dibandingkan aksi-aksi separatisme tahun sebelum 2004. Data ini diperkuat dengan laporan pernyataan dari *Human Rights Watch* sebagai berikut :

“his has led to unprecedented and, in Thailand, seemingly unthinkable levels of violence. According to Intellectual Deep South Watch, a Pattani-based research center affiliated with the Prince of Songkhla University, 3,056 of the total 4,152 militant attacks during the period from January 4, 2004, to July 31, 2007, targeted civilians or civilian objects, both Buddhist and ethnic Malay Muslim. During the same period there were approximately 530 attacks targeting various military units and their

personnel, and 566 attacks targeting police units and their personnel.” (Human Rights Watch and Intellectual Deep South Watch, 2007)

Pernyataan diatas menunjukkan eskalasi kekerasan yang sangat tinggi tidak hanya melibatkan pihak militer dan aparat keamanan saja namun juga menargetkan warga sipil baik yang beragama Buddha maupun mereka yang beragama Islam (*Human Rights Watch and Intellectual Deep South Watch, 2007*) . Secara spesifik menurut laporan *Intellectual Deep South Watch* (2007) sebuah lembaga riset yang berbasis di Pattani dan terafiliasi dengan *Universitas Prince of Songkhla* melalui *Human Rights Watch* sesuai data diatas bahwa total serangan militer yang terjadi di Thailand Selatan sebanyak 4.152 pada 4 Januari 2004 hingga 31 Juli 2004. Dari jumlah tersebut sekitar 73% dengan total keseluruhan 3.056 korban kekerasan bersenjata ini ditujukan kepada warga sipil atau objek masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik. Selain itu, terdapat 530 serangan yang telah ditujukan kepada unit-unit militer dan personelnya serta 566 serangan terhadap unit-unit kepolisian dan personilnya (*Human Rights Watch, 2007*). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan ini tidak hanya melibatkan seluruh aparat negara namun juga fasilitas bangunan infrastruktur negara seperti pos-pos aparat negara.

Data diatas menunjukkan bahwa konflik separatisme di Thailand Selatan memiliki dimensi yang luas karena serangan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yang dominan tertuju oleh warga sipil. Peristiwa ini menandakan bahwa separatisme di Thailand Selatan menunjukkan adanya upaya teror dan mengintimidasi warga sipil agar melemahkan keamanan masyarakat Thailand. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan konflik di Thailand Selatan tidak hanya bersifat militeristik namun juga berkaitan dengan psikologis dan strategis yang menjadikan warga sipil sebagai target utama kelemahan dalam melawan pemerintah Thailand.

Periode separatisme 2004-2007 menjadi peristiwa penting dalam sejarah separatisme di Thailand Selatan karena wilayah ini berada dalam status darurat militer akibat perlawanan kelompok Separatis dengan aparat dan militer Thailand yang semakin memburuk hingga mengorbankan warga sipil sebagai target (*Human Rights Watch, 2007*). Kondisi ini menunjukkan permasalahan bagi

stabilitas negara karena eskalasi konflik dalam periode ini semakin memburuk dengan jumlah serangan yang sangat besar hingga melibatkan warga sipil baik yang beragama Buddha maupun Islam.

Selain itu, adapun pernyataan dari *Human Rights Watch* (2007) yang menunjukkan eskalasi konflik separatisme semakin mempeburuk keamanan aktifitas warga sipil di Thailand Selatan sebagai berikut :

Of 2,463 deaths since January 2004, Human Rights Watch counted 2,196 civilians killed in bomb attacks, shootings, assassinations, ambushes, and machete attacks. Civilians have been killed or injured while they were going about their daily activities—on the way to work, picking up their children from school, herding cattle, buying food in a market, or eating in a restaurant.

Laporan diatas menunjukkan melalui *Human Rights Watch* telah menghitung dari 2.463 kematian sejak awal januari 2004 sebanyak 2.196 warga sipil tewas menjadi korban dalam serangan bom, penembakan dan pembunuhan, penyeragaman dan serangan parang oleh kelompok separatis (*Human Rights Watch*, 2007). Serangan separatisme dalam periode ini menunjukkan sikap kelompok separatis yang mulai agresif dalam melawan Pemerintah Thailand. Dampak dari serangan periode ini mengakibatkan banyak sektor pendidikan yang tertutup akibat serangan terhadap warga sipil yang seharusnya tidak terlibat dalam konflik (*Human Rights Watch*, 2007). Akibatnya aktivitas seluruh murid di Thailand Selatan harus tertunda karena peristiwa ini. Selain itu, serangan ini juga menyebabkan terganggunya mental psikologis para warga sipil yang merasakan adanya rasa takut dan cemas karena takut akan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatisme terhadap dirinya bahkan keluarganya (Abuza, 2006). Periode ini menjadi sejarah penting dalam ledakan eskalasi konflik separatisme yang semakin agresif dan mengancam keamanan negara Thailand Selatan.

Menanggapi konflik separatisme yang semakin memburuk, Pemerintah Thailand merespon peristiwa tersebut dengan menggunakan pedekatan Militer dan tindakan represif. Aksi kekerasan separatisme yang semakin mengancam stabilitas keamanan negara mengundang perhatian pemerintah Thailand untuk lebih memperketat sistem pertahanan wilayah tersebut. Pemerintah Thailand

meningkatkan jumlah pasukan militer dan polisi di wilayah Selatan dengan tujuan mengatasi ancaman dari kelompok separatis yang semakin meningkat dan agresif (Boonratsamee, 2005). Selain itu, pemerintah meluncurkan operasi militer secara besar-besaran bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan perluasan kelompok separatis sebagai upaya memulihkan kendali wilayah Thailand Selatan. Pemerintah juga memberlakukan sistem darurat militer di daerah Thailand Selatan sebagai upaya memperbesar kekuatan untuk menanggapi serangan separatis dan upaya mengendalikannya (Abuza, 2006). Namun respon pemerintah dalam melakukan pendekatan militeristik yang bersifat represif tidak berhasil dalam meredakan ketegangan. Kondisi ini disebabkan pendekatan militer yang melawan kekerasan dengan kekerasan justru memperburuk ketegangan dan meningkatkan perlawanan lebih agresif oleh kelompok separatis.

4.2.6 Mediasi oleh Pihak Ketiga

Menanggapi konflik separatisme di Thailand Selatan yang berada dalam puncaknya pada periode 2004 hingga 2007 adapun peran negara tetangga dan organisasi internasional yang membantu memberikan bantuan untuk menjadi fasilitator mediasi antara pemerintah Thailand dengan kelompok separatis Muslim-Melayu, Salah satunya negara tetangga yang masih berada dalam satu kawasan di Asia Tenggara yaitu Malaysia dan Organisasi Kelompok Islam (OKI) sebagai organisasi komunitas Islam berbasis Internasional juga terlibat dalam menjadi mediator konflik ini.

A. Mediasi Malaysia

Dalam upaya memfasilitasi forum perundingan antara pihak pemerintah Thailand dengan kelompok separatisme, Malaysia telah berupaya untuk membentuk sebuah perundingan untuk mencari solusi perdamaian dalam konflik separatisme di Thailand Selatan. Adapun beberapa perundingan sebagai berikut:

1) Langkawi Talks (2005-2006)

Pada akhir tahun 2005 hingga awal 2006 telah dilakukan negosiasi antara kelompok separatis dengan pemerintah Thailand dengan melakukan perundingan

di Langkawi. Forum ini disebut dengan '*Langkawi Talks*' karena pelaksanaannya berada di pulau Langkawi, Malaysia. Dalam perundingan ini Malaysia memainkan perannya menjadi mediator perundingan antara Thailand dan kelompok separatisme (Panjor, 2024). Perundingan ini dipimpin oleh seorang mantan perdana menteri Malaysia yaitu Mahathir Mohammad yang memberikan fasilitas serangkaian perundingan informal untuk membangun perdamaian awal di Thailand Selatan. Perundingan *langkawi talks* merupakan upaya Malaysia memfasilitasi forum untuk memediasi kedua pihak yaitu pemerintah Thailand dengan kelompok separatis. Bertujuan dalam menemukan penyelesaian konflik setelah gerakan separatisme periode 2004 yang menjadi peristiwa besar dalam serangan separatisme di Thailand Selatan (Panjor, 2024). Perundingan ini menjadi awal komunikasi pemerintah Thailand dengan kelompok Separatisme yang didampingi oleh Malaysia sebagai mediator.

Forum ini dilaksanakan melalui undangan yang dikirimkan oleh Mahatir lewat lembaganya yaitu Perdana Leader Foundation yang mengundang para pemangku kekuasaan negara Thailand seperti *National Security Council* dan *Armed Forces Security Centre* serta para pemimpin kelompok separatis seperti PULO, BRN dan beberapa organisasi separatis lainnya (Burke et al., 2013). Dalam forum ini Malaysia tidak mengundang para pejabat formal dari pihaknya namun hanya memberikan dukungan politik agar menciptakan perdamaian. Tujuan Malaysia tidak mengundang para pemerintahnya karena meminimalisir ikut campur dalam konflik ini (Askandar K, 2021). Forum perundingan ini tidak terjadi hanya sekali saja namun pelaksanaan perundingan ini dilakukan selama beberapa kali pertemuan hingga menemukan hasil yang konkret. Kondisi ini menunjukkan upaya keseriusan pemerintah Thailand dengan kelompok separatis yang terus mendorong untuk melakukan dialog negosiasi hingga mendapatkan hasil yang efektif.

Dari hasil beberapa putaran perundingan ini pada November 2005 hingga Februari 2006 telah menghasilkan sebuah proposal perdamaian yang disebut sebagai "*Peace Proposal for Southern Thailand*". Dalam proposal ini terdapat upaya pemerintah yang melakukan kesepakatan dengan menggunakan pendekatan strategi *Joint Peace and Development Plan* yang bertujuan untuk mengintegrasikan

upaya keamanan dengan pembangunan sosial ekonomi secara stimulan (Askandar K, 2021). Menurut laporan World Bank, sebagai bentuk insiatif dalam menjalankan strategis tersebut, Pada tahun 2007 pemerintah Thailand mengalokasikan dana sebesar THB 1,4 Miliar atau sekitar 41 juta USD. Dana ini ditujukan untuk keamanan dan pembangunan daerah yang terdampak konflik di Thailand Selatan. Dalam mengalokasikan dana ini, World Bank juga terlibat dan berperan penting dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Contohnya seperti terbentuknya sebuah proyek yaitu *Southern Thailand Empowerment and Participation* (STEP) yang bertujuan untuk memberdayakan dan berpartisipasi aktif dalam membangun wilayahnya (The World Bank, 2011). Namun sebenarnya, salah satu tujuan utama dalam rencana ini yaitu terbentuknya pendekatan dialog dan rekonsiliasi antara pemerintah Thailand dengan kelompok Separatisme seperti BRN agar pendekatan tersebut dapat mendorong transformasi konflik menjadi perdamaian yang berkelanjutan (Panjor, 2024). Meskipun demikian, dengan adanya proposal perdamaian ini konflik separatisme di Thailand Selatan belum menunjukkan perubahan karena kesepakatan ini belum cukup membantu mengubah sikap skeptisme antara kedua pihak. Dengan demikian, perundingan ini tercatat gagal dalam mencari solusi damai.

2) (Majelis Amanah Rakyat) MARA Initiative (2015-2019)

Kegagalan Perundingan Langkawi tidak menandai berakhirnya peran Malaysia sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Malaysia kembali menawarkan dukungan melalui inisiatif mediasi kedua yang dikenal dengan *MARA Initiative*, yang berlangsung pada periode 2015–2019 (Tangsefa, 2020). Inisiatif ini dirancang sebagai sebuah platform dialog yang mempertemukan pemerintah Thailand dengan berbagai kelompok separatis di Thailand Selatan. Forum ini dibentuk sebagai proses dialog damai antara pemerintah Thailand dan kelompok separatisme dengan Malaysia sebagai mediator periode kedua. Tujuan forum ini yaitu untuk membangun proses perdamaian yang kredibel dan berkelanjutan setelah gagalnya hasil kesepakatan pertama (Chalermphanupap, 2016). Proses pelaksanaan perundingan ini melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah Thailand yaitu *National Security Centre* dan pemimpin kelompok separatis seperti BRN dan

PULO. Perundingan ini tetap dipimpin oleh Malaysia sebagai penyedia fasilitator forum mediasi ini yang memberikan lokasi untuk dialog utama dalam perundingan di Kuala Lumpur.

Dalam proses perundingan ini langkah pertama yang dilakukan yaitu membangun saluran komunikasi antara pihak-pihak yang sebelumnya berkonflik. Malaysia sebagai fasilitator tidak memihak pihak-pihak terkait sehingga sikap ini telah memicu kedua pihak untuk menghormati Malaysia (Chalermphanupap, 2016). Dialog pertama dilakukan secara tertutup guna meminimalisir tekanan eksternal dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berdiskusi. Dari perundingan tertutup ini telah menghasilkan kesepakatan untuk membentuk “*Safety Zona*” yang bertujuan untuk meminimalisir kontak kekerasan dan memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan perundingan damai. Tahap ini memerlukan kepercayaan antar kedua pihak karena dari kepercayaan tersebut akan menghasilkan kesepakatan yang efektif. Namun skeptisisme dari masing-masing pihak masih tinggi mengingat adanya pengkhianatan dan kegagalan dalam perundingan di masa lalu menyebabkan susahnyanya membangun kembali kepercayaan antar kedua pihak (Chalermphanupap, 2016). Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Thailand Selatan sangat sulit untuk menemukan langkah awal keberhasilan karena perasaan skeptisisme yang tinggi dari pihak pemerintah Thailand dan kelompok separatis.

Dalam proses perundingan *MARA Initiative* memperoleh dukungan dari pihak ketiga yaitu selain Malaysia, Jepang juga menjadi mediator melalui lembaga *Sasakawa Peace Foundation*. Lembaga ini memberikan dukungan teknis terhadap seluruh proses mencari solusi menuju perdamaian (Tangsefa, 2020). Strategi ini guna untuk menambahkan kredibilitas yang dapat memastikan bahwa hasil dialog antara pihak pemerintah Thailand dan kelompok separatis lebih terstruktur dan berorientasi. Dalam perundingan MARA bersama Jepang dilaksanakan dalam beberapa sesi yang membahas mengenai isu-isu penting seperti isu desentralisasi politik, hak budaya dan agama masyarakat Muslim-Melayu serta mekanisme keamanan lokal (. Selain itu, dialog utama dalam negosiasi ini membahas mengenai gencatan senjata sementara dan pengurangan kekerasan namun tetap saja hasil dari

dialog ini masih belum berhasil diimplementasikan. Alasan utama ketidakberhasilan dalam dialog ini yaitu karena komitmen yang lemah dan skeptisme antara kedua pihak yang sangat tinggi sehingga sikap ini menghambat untuk menemukan hasil solusi perdamaian (*International Crisis Group*, 2020). Dengan demikian, walaupun perundingan MARA berhasil membuka dialog dan merumuskan beberapa langkah perdamaian namun perundingan ini tetap gagal dan tidak mencapai penyelesaian konflik yang tuntas.

B. Mediasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Keterlibatan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam konflik separatisme di Thailand Selatan merupakan bentuk implementasi dari tujuan organisasi tersebut. OKI adalah organisasi internasional yang beranggotakan 57 negara di dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tujuan utama OKI yaitu memperkuat solidaritas dan bekerjasama antar negara anggota untuk melindungi dan menjaga kepentingan dunia umat Muslim melalui semangat mempromosikan perdamaian internasional (Rachman, 2019). Keterlibatan OKI dalam konflik separatisme di Thailand Selatan berawal setelah insiden berdarah yang terjadi di Masjid Krue Se dan tragedi Tak Bai pada tahun 2004 yang menewaskan puluhan warga Muslim. Insiden ini telah menarik perhatian internasional khususnya dari komunitas Islam karena dalam insiden ini terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi Muslim minoritas.

Sebagai organisasi yang gencar mendeklarasikan keamanan umat Muslim, OKI menyikapi konflik separatisme di Thailand Selatan dengan terlibat aktif memberikan dukungan terhadap kebebasan hak asasi manusia masyarakat Muslim Melayu. Menurut Waesahmae (2012) ia menyatakan bahwa OKI secara resmi memberikan dukungan terhadap masyarakat Muslim-Melayu secara struktural pada tahun 2005. Dukungan ini dijalankan oleh Sekretaris Jenderal OKI yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu. Dalam menjalankan reformasi OKI Prof. Ekmeleddin secara lebih proaktif menekankan kepentingan Muslim-Melayu di Thailand Selatan yang tertulis dalam kesepakatan KTT Luar Biasa di Mekkah pada tanggal 7-8 Desember 2005 (Waesahmae, 2012). Dalam kesepakatan KTT ini

terdapat beberapa poin yang menekankan mengenai perlindungan HAM minoritas Muslim sebagai berikut:

- Memberikan perlindungan terhadap hak-hak minoritas Muslim di negara-negara non-anggota
- Membentuk badan independen untuk melakukan promosi HAM pada kelompok Muslim minoritas
- OKI terlibat secara aktif dalam isu-isu kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh komunitas muslim.

Dari ketiga poin diatas mencerminkan hasil kesepakatan para anggota OKI untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Muslim yang menjadi minoritas di negara non-anggota OKI. Tiga poin diatas menjadi acuan OKI untuk memberikan dukungan terhadap kelompok Muslim-Melayu di Thailand Selatan.

Prof. Ekmeleddin melakukan tindakan pengecaman keras terhadap tindakan represif militer dari pemerintah Thailand. Tindakan ini dipicu akibat adanya anggapan bahwa pihak militer telah mengancam keamanan warga sipil Muslim-Melayu di Thailand Selatan. Selain itu, Ekmeleddin juga mendesak pemerintah Thailand untuk memberikan jaminan hak-hak minoritas Muslim dan menghentikan tindakan diskriminasi sistemik di Thailand Selatan (Rahcman, 2019). Prof. Ekmeleddin menekankan peringatan kepada pemerintah Thailand sebagai bentuk dukungan dan pembelaan OKI terhadap hak-hak kelompok Muslim-Melayu di Thailand Selatan.

Bentuk diplomasi damai yang dilakukan oleh OKI memiliki ciri khas yaitu menggunakan konsep diplomasi Islam. Bentuk kerjasama ini tidak berupa ikut campur dalam urusan intervensi militer namun OKI menggunakan jalur dialog negoisasi dan kunjungan resmi ke wilayah berkonflik. Diplomasi OKI lebih menggunakan pendekatan *soft power* yaitu dengan mengirimkan delegasi atau perwakilan dari pihaknya untuk berkunjung ke Thailand Selatan agar dapat mengamati langsung kondisi masyarakat Muslim-Melayu (Putri & Yumitro, 2022). Tindakan tersebut dilakukan guna mengetahui secara langsung kondisi yang

dialami oleh para penduduk Muslim-Melayu di Thailand Selatan setelah terdampak peperangan antar pihak militer dengan kelompok separatis.

Selain mengamati kondisi di Thailand Selatan, OKI juga berusaha untuk mendorong pemerintah Thailand agar membentuk komisi independen guna menyelidiki pelanggaran HAM. Tujuan utama permohonan tersebut untuk menciptakan rekonsiliasi dan memperkuat kepercayaan antara komunitas Muslim-Melayu dengan pemerintah Thailand. (Putri & Yumitro, 2022) Permohonan tersebut muncul sebab OKI mengamati pasca tragedi Tak Bai dan Masjid Krue Se terdapat pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak Militer. Pelanggaran tersebut disebabkan pasca tragedi, Militer Thailand melakukan penangkapan, pengangkutan hingga pembantaian yang menewaskan 86 warga Muslim. (Putri & Yumitro, 2022). Peristiwa tersebut telah mencerminkan adanya kekacauan dalam penanganan oleh militer Thailand.

Pemerintah Thailand merespon permintaan OKI dan berkomitmen untuk menyelidiki pelanggaran HAM tersebut. Komitmen ini ditunjukkan berupa pemberian bantuan kompensasi kepada korban yang terdampak konflik serta mempromosikan pembangunan sosial, ekonomi dan pendudukan di wilayah selatan (Rahcman, 2019). Meskipun demikian, tidak semua janji terealisasi secara maksimal namun kondisi ini telah menunjukkan peran OKI yang berhasil mendorong kebijakan pemerintah Thailand.

Keterlibatan OKI terhadap dukungannya kepada kelompok minoritas Muslim-Melayu di Thailand Selatan telah menghasilkan perubahan. OKI telah berhasil meningkatkan perhatian internasional terhadap isu Pattani yang kemudian memperkuat solidaritas umat Muslim internasional. Namun perubahan yang dilakukan oleh OKI sangat terbatas terutama karena pemerintah Thailand merupakan negara non-anggota selain itu juga Thailand memiliki prinsip kedaulatan nasional yang sangat kuat sehingga kondisi tersebut membatasi usaha negosiasi OKI terhadap pemerintah Thailand dalam meredam konflik separatisme. (Waesahmae, 2012). Oleh karena itu, peran OKI dalam mendukung solusi perdamaian pada konflik di Thailand Selatan sangat substansial namun terbatas karena kuatnya prinsip nasionalisme Thailand.

4.3 Usulan Otonomi Khusus

Sepanjang peristiwa gerakan separatisme di Thailand Selatan, kelompok separatis hanya mengupayakan untuk membebaskan budaya Muslim-Melayu dari asimilasi budaya Thai. Kebijakan Siamisasi yang mengikat mereka pada budaya dan agama Thai menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Muslim-Melayu. Mereka melakukan aksi protes untuk meminta hak-hak identitas Melayu kepada pemerintah Thailand agar mendapatkan kesetaraan dalam konteks pengakuan identitas budaya Melayu sebagai identitas mereka. Namun respon pemerintah Thailand terus mengabaikan hak suara masyarakat Muslim-Melayu sehingga aksi protes berujung pada gerakan separatisme. Dalam aksi demonstrasi kepada pemerintah pusat, para kelompok separatis menuntut pemerintah Thailand agar memberikan kebijakan otonomi khusus terhadap wilayah di Thailand Selatan agar masyarakat Muslim-Melayu dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan budaya dan ajaran agamanya. Penulis menyajikan tabel rangkaian usulan otonomi khusus oleh kelompok Muslim-Melayu yang telah disusun dalam tabel 4.1

No	Tahun	Peristiwa/Tokoh	Aspirasi	Keterangan
1	1947	Haji Sulong Abdul Kadir Al-Fatani	Permohonan berupa 7 tuntutan Haji Sulong berupa penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa daerah, penerapan hukum Islam dan pemberian otonomi dalam bidang pendidikan agar sesuai dengan ajaran agama Islam	Dokumen usulan otonomi khusus pertama kali sebagai simbol perjuangan Muslim-Melayu terhadap dominasi Bangsa Thai.
2	1960-1993	Kebangkitan BRN dan PULO	Usulan untuk pemisahan dari Thailand dengan sistem pemerintahan sendiri (<i>self-determination</i>) namun tidak secara formal seperti diplomatik	Kemunculan organisasi yang memperjuangkan otonomi melalui jalur kekerasan bersenjata dan tidak mengajukan proposal dalam bentuk formal.
3	2005	Forum Masyarakat Sipil Muslim-Melayu	Usulan pembentukan wilayah administratif khusus dengan adanya pengakuan atas identitas Melayu dan pemberian otonomi	Forum perdamaian dari pihak luar negeri seperti OKI dan Malaysia sebagai

			dalam bidang keagamaan dan pendidikan	fasilitator serta dukungan oleh tokoh masyarakat lokal.
4	2006	Konferensi Perdamaian Pattani di Kuala Lumpur	Delegasi dari diaspora Muslim Melayu memberikan usulan yaitu pemberian zona otonomi khusus dibawah konstitusi Thailand	Konferensi ini di dukung oleh BRN dan beberapa tokoh lokal Pattani serta OKI turut menjadikan ini perhatian utama, namun permohonan ini masih ditolak oleh pihak Thailand
5	2013	Dialog Damai Thailand -BRN di Malaysia	Dalam negosiasi informasi. BRN terus menyampaikan tuntutan secara tidak langsung berupa permohonan pemberian pemerintahan daerah yang diakui secara hukum dalam sistem kerangka pemerintahan Thailand.	Tuntutan ini tidak berupa dokumen tertulis maupun formal, namun tetap dilakukan secara dialog negoisasi
6	2020	Deklarasi Barisan Pembebasan Pattani di Luar negeri.	Penegasan kembali usulan otonomi khusus dalam bentuk wilayah otonom berbasis hukum syariah Islam, baik dalam bidang pendidikan, budaya maupun sosial dan ekonomi.	Tetap mendapatkan penolakan dan tidak mendapatkan pengakuan pemerintah Thailand

Tabel 4.2 Rangkaian usulan otonomi khusus di Thailand Selatan
Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Perlu digarisbawahi seperti yang telah dijelaskan dalam bab “kebijakan Siamisasi dan Perjanjian Anglo-Siam” yang menegaskan bahwa sebelum aksi penuntutan otonomi khusus di Thailand Selatan, wilayah ini dahulu merupakan kesultanan dengan struktur pemerintahannya sendiri. Kemudian Siam dan Inggris melakukan perjanjian ‘*Anglo-Siamese Treaty*’ pada tahun 1990 yang menjadi awal penetapan wilayah Pattani sebagai kekuasaan Siam secara utuh. Sejak perjanjian tersebut masyarakat Pattani melakukan aksi protes selama bertahun-tahun untuk meminta hak sebagai masyarakat Muslim-Melayu yang menduduki wilayah Thailand Selatan.

Usulan otonomi khusus pertama kali diajukan oleh Haji Sulong seorang tokoh Muslim dari Pattani. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab diatas, upaya Haji Sulong mengubah tatanan sosial khususnya pada sistem pendidikan Haji Sulong sebagai bentuk usaha membangun pendidikan yang berbasis agama Islam dikalangan Masyarakat Muslim Melayu. Kondisi ini dilakukan guna menghidupkan kembali ajaran Islam yang telah lama dihapuskan oleh kebijakan Siamisasi (Husam et al, 2017).

Seperti yang telah dicantumkan dalam bab peristiwa tuntutan oleh Haji Sulong diatas bahwa 7 perkara yang diajukan oleh Haji Sulong bertujuan untuk memperjuangkan hak identitas agar mendapatkan pengakuan dan otonomi bagi wilayahnya yang mayoritas beretnis Melayu-Muslim (Husam et al, 2017). Dalam merespon tuntutan tersebut pemerintah Thailand menolak 7 perkara yang telah disampaikan oleh Haji Sulong. Alasan penolakan ini disebabkan perkara yang disampaikan dapat mengancam kedaulatan negara dan integrasi nasional negara Thailand. Alasan ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah Thailand terhadap perpecahan dan disintegrasi nasional. Pemerintah Thailand juga menganggap bahwa sistem pemerintahan yang ada telah sesuai dengan aspek sosial, ekonomi dan politik negara Thailand sehingga tidak perlu adanya perubahan (Wira Tahe, 2010). Kondisi ini menunjukkan respon pemerintah terhadap pertahanan kedaulatan negaranya.

Tuntutan Haji Sulong dianggap sebagai pemberontakan terhadap kebijakan pemerintah Thailand. Akibatnya Haji Sulong ditangkap oleh pihak pemerintah Thailand atas tindakannya yang berusaha untuk menentang kebijakan pemerintah Thailand. setelah penolakan 7 perkara yang disampaikan oleh Haji Sulong, otonomi tetap dilanjutkan sebagai tuntutan yang diajukan oleh kelompok separatis. Dalam penjelasan bab pembentukan organisasi-organisasi separatis diatas dijelaskan bahwa pada tahun 1960-1993 menunjukkan gerakan separatisme yang mulai aktif secara terorganisir. Kelompok-kelompok separatisme seperti BRN dan PULO dibentuk sebagai organisasi yang bertujuan memerdekakan wilayah Thailand Selatan dan membebaskan identitas Melayu serta agama Islam dari ikatan identitas 'Thai' (identitas nasional Thailand).

Dalam upaya penuntutan otonomi khusus oleh organisasi separatis seperti BRN dan PULO terdapat poin penting yang membahas mengenai tuntutan otonomi khusus. BRN dan PULO menuntut pemerintah Thailand untuk memberikan otonomi khusus dalam wilayah Pattani guna membebaskan masyarakat Muslim-Melayu mengatur urusan pemerintahan wilayahnya secara mandiri (Abuza, 2006). Dalam tuntutan kebebasan pemerintahan secara mandiri PULO mengusulkan pemberlakuan sistem *Home Rule* (pengelolaan mandiri dibawah kekuasaan Thailand) atau *self-determination*. Sistem tersebut dikelola untuk wilayah-wilayah tertentu agar dapat menjalankan sistem pemerintahan sesuai kebutuhan daerah tersebut namun tetap dalam kekuasaan negara pusat. Kondisi ini mencerminkan upaya BRN dan PULO untuk membebaskan pemerintahan wilayah Pattani dari ikatan sistem pemerintah Thailand (Chalk, 2008).

Dalam upaya penuntutan oleh kelompok-kelompok separatis, PULO merupakan salah satu organisasi separatis yang menerima agenda negosiasi. PULO bersedia untuk berpartisipasi dalam agenda negosiasi perdamaian dengan syarat menolak perundingan yang hanya berfokus pada kepentingan konstitusi Thailand (Chalk, 2008). Kondisi ini mencerminkan sikap PULO dalam kerjasama secara konstruktif dengan pemerintah Thailand.

Pada tahun 1998 stabilitas keamanan negara Thailand mengalami peningkatan setelah negosiasi antara PULO dengan pemerintah Thailand yang menghasilkan kesepakatan secara terbatas. Dalam bab PULO diatas penulis telah menjelaskan bahwa dalam kesepakatan tersebut pemerintah menolak usulan otonomi khusus namun tetap memberikan kebijakan otonomi secara terbatas. Hasil dari kesepakatan ini membawa Thailand dalam kondisi yang terkendali dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional (Nilsen, 2012). Namun kondisi ini hanya berlaku sementara hingga pada tahun 2004 terjadilah gerakan separatisme kembali.

Tahun 2004 hingga 2007 Thailand mengalami eskalasi peristiwa separatisme yang semakin memburuk. Kondisi ini hingga memicu perhatian publik internasional. Tragedi pembunuhan, pengeboman hingga ancaman terhadap warga sipil mengundang perhatian dunia (Boonratsamee, 2022) Menanggapi tragedi-

tragedi berdarah pada periode 2004-2007 Malaysia sebagai negara tetangga membantu memberikan fasilitas terhadap kelompok separatis dan pemerintah Thailand untuk bernegosiasi dalam merundingkan perdamaian. Dalam beberapa forum yang diselenggarakan oleh Malaysia terdapat usulan otonomi khusus sebagai solusi penyelesaian konflik.

Isi dalam tuntutan dalam negosiasi yang di fasilitasi oleh Malaysia yaitu tuntutan otonomi yang dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap identitas Melayu. Tuntutan ini mencakup dalam aspek keagamaan, budaya, hukum, dan pemerintahan daerah (McCargo, 2014). Tuntutan ini diinginkan oleh kelompok separatis sebagai bentuk kebutuhan yang berdasarkan kesesuaian dengan nilai dan adat budaya masyarakat Muslim-Melayu. Kelompok separatis menuntut otonomi yang dapat memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan lokal secara mandiri dan mendapatkan pengakuan hak-hak etnis Melayu-Muslim (McCargo, 2014). Kondisi ini mencerminkan upaya kelompok Muslim-Melayu yang tidak pernah putus asa untuk menuntut pengakuan terhadap identitasnya

Malaysia sebagai negara fasilitator berada dalam posisi yang netral dan tidak memberikan dukungan terhadap siapapun, namun dalam perundingan Malaysia juga memberikan pendapatnya terhadap konflik separatisme di Thailand Selatan. Mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu Tun Dr. Mahathir Mohammad menambahkan pendapatnya dengan memperkenalkan konsep otonomi sebagai solusi penyelesaian konflik (McDermott, 2014). Namun pendapat ini justru memberikan dampak terhadap asumsi pemerintah Thailand bahwa Malaysia mungkin memberikan dukungan kepada kelompok separatis. Kondisi ini justru menjadi tantangan dalam negosiasi ini yang menimbulkan sikap skeptisme pemerintah Thailand terhadap aspirasi otonomi khusus (McDermott, 2014). Oleh karena itu, agenda negosiasi oleh Malaysia belum dapat menemukan keberhasilan membawa konflik ini menuju perdamaian.

Pada tahun 2013, terjadi peristiwa perundingan dalam dialog damai antara pemerintah Thailand dengan BRN. Dialog ini diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai bentuk usaha menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Pada Tanggal 28 Februari 2013 pemerintah Thailand dan BRN telah menandatangani

kesepakatan untuk memulai proses dialog damai secara inklusif (Aphornusuvan, 2013). Dalam dialog tersebut BRN mengajukan 5 tuntutan utama. Melalui media *Bangkokpost* (2013) isi dalam 5 tuntutan tersebut seperti

1. Pengakuan terhadap perwakilan komunitas Melayu
2. Pembebasan terhadap tahanan Melayu
3. Keterlibatan pihak internasional sebagai pengawas
4. Pengakuan terhadap status BRN sebagai gerakan pengampunan bukan separatisme
5. Malaysia sebagai mediator bukan fasilitator saja.

Dari 5 tuntutan BRN diatas terdapat salah satu tuntutan penting yang mengacu pada pengajuan diri BRN sebagai gerakan pengampunan bukan separatisme. Kondisi ini mengarah pada penyelesaian konflik separatisme melalui pemberian pengampunan atau amnesty kepada anggota kelompok separatis yang terlibat dalam aksi separatisme. Tujuan dari gerakan pengampunan yaitu merangkul kembali anggota kelompok separatis ke dalam lingkungan masyarakat negara (Bangkokpost, 2013). Namun dari tuntutan ini justru memicu perpecahan internal BRN karena adanya ketidaksepakatan yang selaras sehingga menimbulkan ketidakpuasan antara anggota BRN. Proses negosiasi ini kemudian tertunda setelah BRN menghentikan keikutsertaannya diakhir tahun 2013 (Bangkokpost, 2013). Dengan demikian, proses dialog ini tetap menjadi kerangka penting dalam upaya perdamaian meskipun berjalan dengan lambat dan banyaknya hambatan. Agenda negosiasi antara pemerintah Thailand dan kelompok separatis terus berlanjut walaupun masih belum menemukan solusi perdamaian hingga saat ini tahun 2025.

Upaya kelompok separatisme tidak pernah menyerah dalam menuntut keadilan terhadap pengakuan identitas Melayu. Pada tahun 2020 terjadi aksi deklarasi barisan pembebasan Pattani yang dilakukan diluar negeri untuk menekan pemberian otonomi di Thailand Selatan. Aksi deklarasi ini dilakukan oleh para pemimpin gerakan Pattani yang berada di luar negeri seperti Malaysia dan beberapa negara yang terdapat diaspora Melayu Pattani (Jory P, 2007). Dalam deklarasi ini menegaskan pengakuan identitas Melayu yang tertindas dan mendesak pihak internasional untuk mengakui hak-hak minoritas agar dapat menentukan nasibnya

sendiri. Deklarasi ini menjadi strategi penting karena dapat menjauhkan tekanan langsung dari pemerintah Thailand dan membuka ruang diplomasi secara luas (Jory P, 2007). Namun kondisi ini dipandang sebagai tindakan separatisme karena deklarasi ini memiliki tujuan yang sama dengan gerakan separatisme di Thailand Selatan sehingga aksi ini memperpanjang konflik dan ketegangan hubungan antara pemerintah Thailand.

4.4 Respon Pemerintah Thailand Terhadap Tuntutan Otonomi Khusus

Seperti yang telah penulis jelaskan dan disusun melalui tabel 4.2 bahwa tuntutan otonomi berawal dari pasca perlawanan tokoh ulama Pattani yaitu Haji Sulong pada tahun 1947. Otonomi khusus pertama kali diusung oleh Haji Sulong dalam 7 perkara yang ia telah ajukan agar identitas Muslim-Melayu mendapatkan kebebasan dari ikatan identitas Thai. Namun respon pemerintah justru memicu konflik dengan masyarakat Muslim-Melayu akibat tindakan penangkapan hingga pembunuhan Haji Sulong. Sejak kematian Haji Sulong mulai terbentuknya organisasi-organisasi separatis seperti BRN dan PULO yang menuntut pemisahan wilayah Thailand Selatan yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat dari pemerintah pusat. Kelompok separatisme terus berusaha memperjuangkan hak identitas Muslim-Melayu dengan menuntut pemberian otonomi khusus di wilayah Thailand sebagai dari upaya penyelesaian konflik. Otonomi khusus dianggap sebagai solusi pemberian kebebasan wilayah tertentu untuk menciptakan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut namun masih dibawah naungan pemerintah pusat. Namun dari seluruh rangkaian aspirasi otonomi khusus yang di usung oleh kelompok Muslim-Melayu pemerintah Thailand tetap dengan tegas menolak otonomi khusus sebagai solusi penyelesaian konflik.

Respon pemerintah dalam menolak otonomi khusus pertama kali dalam peristiwa tuntutan yang diajukan oleh Haji Sulong pada tahun 1947 melalui 7 perkara yang disampaikan. Pemerintah Thailand menolak tuntutan tersebut karena isi dari perkara yang disampaikan dianggap bertentangan dengan konsep nasionalisme dan landasan ideologi negara Thailand. Nasionalisme Thai menuntut keseragaman identitas nasional seperti budaya, bahasa dan simbol kebangsaan

sebagai persatuan. Namun konsep otonomi khusus justru memberikan pengakuan terhadap identitas non-Thai sehingga dianggap melemahkan rasa persatuan dan mengancam keberadaan identitas nasional Thailand (Husam *et al*, 2017). Oleh karena itu, penolakan terhadap tuntutan Haji Sulong tidak semata-mata sebagai keputusan politik namun juga strategi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara.

Kemudian tuntutan otonomi kembali diusung oleh kelompok separatisme yang berusaha memperjuangkan keadilan bagi identitas Muslim-Melayu. Melalui organisasi separatisme seperti BRN dan PULO. Dalam merespon tuntutan ini pemerintah Thailand tetap dengan tegas menolak otonomi khusus sebagai penyelesaian konflik (Rattanamane & Dubus, 2011). Keputusan ini diambil untuk mempertahankan keutuhan negara dan identitas nasional Thailand. Bagi pemerintah, otonomi khusus dapat melemahkan nasionalisme bangsa Thai dan mengancam proses integrasi nasional yang selama ini telah dibnetuk melalui dominasi identitas Thai. Pemerintah Thailand juga khawatir pemberian otonomi khusus akan berpotensi disalahgunakan seperti adanya ketimpangan kebijakan atau bahkan memperkuat agenda separatisme (Rattanamane & Dubus, 2011). Oleh karena itu, meskipun BRN dan PULO menganggap otonomi khusus sebagai jalan kompromi untuk mengakhiri konflik namun pemerintah Thailand menilai tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan strategis negara dan memicu disintegrasi di masa depan.

Dalam perundingan yang difasilitasi oleh Malaysia maupun melewati keterlibatan OKI, pemerintah Thailand tetap menolak pemberian otonomi khusus di wilayah Thailand Selatan. Penolakan ini berdasarkan pertimbangan yang strategis berkaitan dengan konsep nasionalisme dan integrasi nasional. Pemerintah Thailand menilai otonomi khusus merupakan sebuah konsep yang dapat mengancam identitas nasional Thai yang dibangun diatas kesatuan bangsa, budaya dan simbol-simbol negara (*International Crisis Group*, 2020). Pengakuan secara nasional terhadap identitas non-Thai akan berpotensi menggeser atau melemahkan peran identitas nasional Thai dan memicu fragmentasi sosial. Selain itu, pemerintah juga mengkhawatirkan kebijakan otonomi khusus akan menimbulkan dampak besar

berupa munculnya tuntutan serupa di wilayah lain sehingga dapat meningkatkan risiko disintegrasi nasional. Bagi pemerintah Thailand, prioritas utama adalah stabilitas dan kedaulatan negara Thailand (*International Crisis Group*, 2020). Oleh karena itu otonomi khusus dianggap sebagai solusi yang tidak efektif dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan.

Dalam merespon isu separatisme di Thailand Selatan, pemerintah Thailand menerapkan pendekatan yang penuh kehati-hati mengingat kompleksitas dan sesivitas konflik ini tidak dapat diselesaikan melalui langkah-langkah sederhana. Dalam menghadapi gerakan separatisme, pemerintah Thailand menerapkan pendekatan militeristik. Penanganan konflik dilakukan dengan membentuk kebijakan represif termasuk penerapan status darurat militer di wilayah perbatasan selatan sebagai bagian dari strategi keamanan negara (Marks, 2018). Kebijakan militeristik ini justru menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan. Kondisi tersebut disebabkan oleh pendekatan militeristik yang dinilai mengancam rasa keamanan dan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di wilayah yang terdampak konflik (Marks, 2018). Kebijakan ini turut memicu ketidakpuasan masyarakat sehingga memperdalam ketegangan antara pemerintah Thailand dengan kelompok separatisme.

Hingga tahun 2025, konflik di Thailand Selatan belum menemukan solusi damai yang komprehensif. Situasi ini disebabkan karena adanya tindak kekerasan yang berkelanjutan, rasa ketidakpercayaan antara kedua pihak yang menciptakan berbagai hambatan dalam merumuskan langkah-langkah perdamaian (Marks, 2018). Oleh karena itu, kekecewaan dan ketidakpercayaan yang terus berkembang di kalangan masyarakat lokal Thailand Selatan justru memperparah situasi dan memicu gelombang perlawanan yang lebih besar.

Dengan demikian, konflik separatisme di Thailand Selatan masih berlangsung hingga 2025 belum menemukan penyelesaian yang efektif, mengingat respon pemerintah Thailand yang konsisten menolak aspirasi otonomi khusus sebagai solusi perdamaian. Penolakan ini tidak semata-mata mencerminkan tindakan sewenang-wenang negara Thailand, melainkan respon ini dilandaskan pada kekhawatiran terhadap ancaman kedaulatan negara dan identitas nasional.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa identitas Thai lebih mendominasi sehingga pengakuan identitas lain akan mempengaruhi posisi etnis Thai di Thailand (Banpasirichote Wungaeo, 2014). Dengan demikian persoalan otonomi khusus bukan hanya sekedar usulan secara administratif namun otonomi juga berkaitan dengan kebangsaan Thailand secara inklusif.

4.5 Alasan Penolakan Pemerintah Thailand atas Aspirasi Otonomi Khusus

Respon Thailand dalam menanggapi aspirasi otonomi khusus oleh kelompok Muslim-Melayu di Thailand Selatan tidak berdasarkan keputusan sepihak namun juga atas dasar pertimbangan dan alasan tertentu. Terdapat beberapa alasan yang telah dipertimbangkan untuk keberlangsungan keamanan negara Thailand. Respon Thailand berkaitan dengan beberapa aspek yang melibatkan strategi militer, politik dan sosial. Beberapa alasan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.5.1 Otonomi Khusus Mengancam Keberadaan Identitas Nasional 'Lak Thai'

Konflik separatisme merupakan permasalahan yang berkaitan dengan identitas suatu kelompok minoritas yang terpinggirkan. Dalam konteks Thailand, Konflik Separatisme di Pattani merupakan gerakan yang menentang penerapan identitas nasional sebagai dasar kehidupan masyarakat Thailand baik masyarakat etnis Thai maupun etnis Melayu. Separatisme di Thailand Selatan dilakukan oleh komunitas Muslim-Melayu sebagai respon menolak kebijakan asimilasi budaya Melayu ke dalam budaya Thai (Whinacakul, 2008). Kebijakan tersebut menciptakan kesenjangan dalam aspek sosial, politik dan budaya oleh masyarakat Muslim-Melayu.

Dalam upaya menuntut pengakuan identitas Melayu, komunitas Muslim-Melayu mengusulkan otonomis khusus terhadap pemerintah Thailand sebagai solusi penyelesaian konflik. Aspirasi otonomi khusus secara lebih luas di Thailand Selatan dapat mengancam keberadaan identitas nasional. Kekhawatiran utama

muncul dari pemberian otonomi khusus dapat menggeser dominasi identitas nasional Thai dan membuka peluang terjadi disintegrasi nasional. Alasan ini disebabkan pemberian otonomi secara utuh akan memberikan pengakuan terhadap identitas lain sehingga kondisi tersebut akan mengancam keberadaan identitas nasional (Whinacakul, 2008). Aspirasi otonomi khusus menjadi perhatian penting bagi kelompok nasionalis (pemerintah dan partai politik pro bangsa Thai). Kondisi tersebut disebabkan otonomi dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan identitas nasional Thailand.

Penolakan aspirasi otonomi khusus di Thailand Selatan bagi kelompok nasionalis (pemerintah, partai politik dan warga sipil pro-Bangsa Thai) merasa bahwa otonomi dapat mengancam integritas nasional negara Thailand (Marks, 2018). Dalam memahami penolakan otonomi khusus di Thailand Selatan maka penting untuk melihat kembali akar persoalan yang menjadi pemicu konflik separatisme. Pemerintah Thailand pernah menawarkan pendekatan desentralisasi dengan model *Southern Border Provinces Administrative Centre* (SBPAC) namun pendekatan ini belum dirasa cukup untuk mentransformasikan konflik separatisme sebagaimana di jelaskan dalam Banpasirichote Wungaeo (2014) sebagai berikut:

"A decentralized administrative arrangement such as the SBPAC/ISOC model or a proposal for provincial self-government may not be enough to transform the conflict. The problem lies in the fact that local identity is still largely excluded from the mainstream political structure and cultural legitimacy remains dominated by the central Thai Buddhist ideology." (Banpansirichote Wungaeo, 2014).

Penyataan diatas menegaskan bahwa hambatan utama dalam penerapan desentralisasi bukan karena sistem administratif namun karena marginalisasi identitas lokal dalam struktur politik nasional serta dominasi ideologi negara yang berbasis Buddha-Thai. Akibatnya otonomi dari kelompok Muslim-Melayu seringkali dianggap sebagai ancaman keutuhan negara dan identitas nasional Thailand (Banpansirichote Wungaeo, 2014). Dengan demikian struktur politik Thailand masih mendominasi sehingga legitimasi budaya yang diakui secara nasional berdasarkan ideologi Buddhis-Thai.

Penolakan terhadap otonomi khusus dapat dianggap sebagai sikap Nasionalisme pemerintah Thailand. Kelompok nasionalis di Thailand begitu besar yaitu mencakup pemerintah, militer, partai politik dan masyarakat lokal pro-bangsa Thai. Sikap nasionalisme merupakan konsep yang penting bagi kelompok nasionalis karena nasionalisme menjadi alasan utama dalam usaha mempertahankan integritas wilayah dan identitas negara Thailand (Hartati, 2018). Kelompok nasionalis juga mendorong penolakan otonomi khusus karena dianggap hal ini bukan hanya akan mengancam kedaulatan negara namun juga identitas nasional yang telah dilestarikan sejak lama. Salah satu pernyataan yang dapat mendukung pernyataan diatas dikutip melalui Banpasirichote Wungaeo (2014).

“It is revealing that one of the responses to the crisis in the south was to renew official nationalist campaigns to promote ‘Thainess’. In the words of one of the most popular nationalist propaganda songs: ‘underneath the Thai flag the whole population is Thai’. Within this Thainess while there is a place for Muslims, it appears there is no place for Malays...” (Banpasirichote Wungaeo (2014).

Penolakan terhadap aspirasi otonomi khusus di Thailand Selatan tidak hanya berdasarkan faktor keamanan namun juga faktor kekhawatiran pemerintah terhadap kedaulatan negara Thailand. Menurut Banpasirichote menegaskan bahwa respon negara Thailand terhadap krisis di Thailand Selatan semakin memperkuat kampanye kelompok nasionalis (pemerintah dan partai politik pro-bangsa Thai) terhadap konsep ‘Thainess’ (konsep yang secara eksplisit menolak pengakuan identitas Melayu) (Banpasirichote Wungaeo (2014). Dalam kerangka ideologi nasionalis Thailand, Negara Thailand hanya menerima konsep Muslim-Thai namun tidak menerima Muslim-Melayu atau bahkan Muslim-Pattani. Kondisi ini disebabkan pengakuan terhadap identitas lain akan berpotensi mengancam homogenitas nasional yang telah ada sejak lama (Banpasirichote Wungaeo (2014). Oleh karena itu, Nasionalisme juga mempengaruhi keputusan pemerintah Thailand dalam merespon aspirasi otonomi khusus.

Di lain sisi, pemerintah tetap berupaya untuk menyelesaikan konflik ini sesuai dengan kebijakan yang berlandaskan terhadap ideologi pemerintah Thailand. Salah satu cara upaya penyelesain konflik dengan menawarkan metode dialog

secara inklusif. Pada Februari 2013, pemerintah Thailand melakukan dialog inklusif bersama dengan kelompok pemberontak BRN untuk sepakat melakukan aksi gencatan senjata, saat itu pemerintah Yinluck Shinawarta menandangi “*General Consensus on Peace Dialogue Process*” sebagai salah satu bukti perjanjian kedua pihak. Perjanjian ini merupakan inisiatif dari pemerintah Thailand dalam upaya membuka dialog damai guna menyelesaikan konflik di wilayah Thailand Selatan (Wheeler&Chambers, 2019). Namun sayangnya, perjanjian ini mengalami tantangan dan hambatan. Salah satu hambatan utama dalam perjanjian ini disebabkan BRN mengundurkan diri dari agenda dialog damai dengan pemerintah sehingga menyebabkan upaya perdamaian dalam dialog ini tidak dapat terwujud (Bangkokspot, 2013). Kondisi hubungan antar pemerintah Thailand dengan masyarakat Muslim-Melayu terus dalam ketegangan dan berupaya melakukan resolusi konflik untuk masa depan hubungan.

Thailand memiliki semboyan identitas nasional yang disebut sebagai ‘*Lak Thai*’. Secara harfiah *Lak Thai* dianggap sebagai inti Thailand dan sering merujuk pada tiga unsur suci oleh masyarakat Thailand yaitu Raja, Thai dan Buddha (Hartati, 2008). Ketiga unsur tersebut memiliki arti yang berhubungan dengan Nasionalisme negara Thailand. Pertama Raja, dijelaskan bahwa Thailand merupakan negara yang menganut Monarki Konstitusional namun peran raja masih berpengaruh terhadap kehidupan publik dan dianggap sebagai simbol persatuan nasional. Kedua Thai merupakan sebuah identitas atau etnis besar yang menjadi simbol kesatuan nasional. Ketiga Buddha merupakan agama mayoritas Thailand dan agama ini memerankan peran penting dalam budaya dan nilai-nilai masyarakat Thailand. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar Nasionalisme bangsa Thai untuk menjadi simbol kesatuan negara Thailand (Hartati, 2018). Dalam konteks penolakan otonomi khusus, nasionalisme Thailand berakar dari kuatnya implementasi semboyan ideologis ‘*Lak Thai*’ yang menekankan kesatuan bangsa, agama Buddha dan monarki serta bahasa sebagai pondasi utama identitas nasional Thailand.

Identitas ‘*Lak Thai*’ digunakan sebagai fondasi dalam membentuk dan memperkuat Nasionalisme Thailand yang mengikat kebersamaan masyarakat

Thailand baik pada masa lalu hingga sekarang. Identitas ini menjadi landasan berbagai gerakan nasionalis di masa lalu termasuk dalam gerakan revolusi Thailand 1932 yang bertujuan untuk memulihkan kemakmuran dan kemerdekaan negara Thailand (Funston, 2008). Meskipun banyak perubahan dalam sistem negara Thailand namun '*Lak Thai*' tetap menjadi identitas nasional sebagai label promosi identitas Thailand kepada dunia internasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan '*Lak Thai*' seperti kesatuan bangsa, dominasi budaya Thai dan agama Budhha serta loyalitas terhadap monarki menjadi alasan utama mengapa pemerintah Thailand khawatir terhadap tuntutan otonomi khusus oleh kelompok separatis. Pemerintah memandang pemberian otonomi khusus dengan identitas etno-religius yang berbeda berpotensi mengancam prinsip kesatuan yang menjadi inti ideologi '*Lak Thai*' (Whinacakul, 2008). Oleh karena itu, penolakan otonomi khusus bersifat ideologis dan simbolik sebagai pertahanan nasionalisme negara Thailand.

Nasionalisme *Lak Thai* merupakan semboyan ideologi yang menguatkan terciptanya kebijakan Siamisasi pada tahun 1938 dalam kepemimpinan Phibunsongkhram. Kebijakan ini yang memicu permasalahan terhadap identitas etnis lainnya salah satunya konflik separatisme di Thailand Selatan. Nasionalisme '*Lak Thai*' hanya fokus terhadap pemahaman mendalam mengenai etnis Thai dan Buddha sehingga seluruh kebijakan baik dalam aspek politik, sosial dan ekonomi dilandaskan pada semboyan ideologi '*Lak Thai*' (Whinacakul, 2008). Kebijakan ini memicu ketidakpuasan masyarakat yang menganut tradisi dan agama lainnya. Salah satunya konflik Thailand Selatan, di mana masyarakat lokal banyak didominasi oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam. Perbedaan ini menjadi faktor utama pemicu konflik separatisme, sebab adanya perbedaan budaya dan agama antara kelompok etnis Thai dengan kelompok etnis Melayu. Masyarakat Muslim-Melayu memiliki tradisi budaya yang berdasarkan ajaran dan syariat agama Islam. Ajaran ini secara fundamental berbeda dengan ajaran agama Buddha (Hartati, 2018). Konflik ini muncul sebagai respon atas pengabaian identitas Melayu dan pemaksaan penggunaan identitas 'Thai' yang diterapkan dalam aspek sosial, politik

dan budaya serta keagamaan kepada seluruh masyarakat Thailand termasuk Muslim-Melayu.

Pengabaian terhadap identitas etno-kultural Melayu di Thailand Selatan menjadi faktor utama munculnya gerakan separatis yang berupaya memisahkan diri dari negara Thailand. Gerakan separatisme muncul sebagai respon atas pembungkaman hak-hak politik dan kultural masyarakat Muslim-Melayu karena tidak diberikan ruang untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran budaya dan agama mereka, melainkan dipaksa mengikuti nilai-nilai budaya dan agama Thai (McCargo, 2014). Contohnya seperti, larangan menggunakan bahasa Melayu digantikan bahasa Thai, penggunaan nama Thailand diwajibkan, pengadilan agama Islam dihapuskan dan larangan menggunakan busana tradisional Melayu (Rahayu et al, 2022). Tindakan ini memicu tantangan bagi para masyarakat Muslim-Melayu sebab mereka merasa bahwa identitas Melayu tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah Thailand. Oleh karena itu, masyarakat Muslim-Melayu membentuk gerakan separatisme sebagai respon terhadap ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah Thailand.

Konflik separatisme di Thailand Selatan telah mengancam integrasi nasional. Menanggapi konflik separatisme, kelompok nasionalis yang berpegang pada ideologi '*Lak Thai*' menentang gerakan separatis di Thailand Selatan. Mereka menganggap bahwa konflik tersebut berpotensi mengancam keutuhan negara Thailand dan identitas nasional yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip '*Lak Thai*' (Malitz, 2022). Bagi kelompok nasionalis termasuk pemerintah, partai politik pro-Thai dan masyarakat lokal beridentitas Thai, '*Lak Thai*' dipandang sebagai simbol identitas nasional yang kuat dan fundamental bagi negara Thailand. Mereka meyakini bahwa Thailand merupakan negara kesatuan yang utuh tidak dapat dibagi maupun dipisahkan. Keyakinan ini diperkuat oleh narasi historis bahwa Thailand adalah salah satu negara kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami penjajahan oleh kekuatan kolonial barat (Cintya, 2018). Oleh karena itu, bagi kelompok nasionalis separatisme adalah sebuah permasalahan yang mengancam identitas nasional.

Aspirasi otonomi khusus dianggap berpotensi memberikan pengakuan terhadap identitas melayu sebagai identitas alternatif di Thailand. Konsep ini dikhawatirkan dapat menggeser posisi identitas ‘*Lak Thai*’ sebagai simbol identitas nasional dan pondasi kesatuan negara Thailand. Selain itu, otonomi juga membuka ruang bagi sistem pemerintahan daerah untuk lebih mandiri sehingga identitas melayu memiliki peluang untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan tingkat pemerintahan lokal di Thailand Selatan (Malitz, 2022). Namun peluang tersebut menjadi salah satu faktor penolakan otonomi di Thailand Selatan karena dinilai bertentangan dengan prinsip ideologi ‘*Lak Thai*’. Ideologi ini menekankan kesatuan nasional yang terintegrasi dalam identitas Thai, agama Buddha dan pemerintahan Monarki (Hatarti, 2018). Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan yang memungkinkan munculnya identitas alternatif dikhawatirkan akan menggeser dominasi identitas nasional.

Dalam menanggapi aspirasi otonomi khusus di Thailand Selatan, pemerintah dan kelompok nasionalis lainnya berpegang pada ideologi ‘*Lak Thai*’ menolak tuntutan tersebut. Mereka menilai pemberian otonomi tidak hanya menggeser peran identitas nasional Thai namun juga melemahkan integritas negara kesatuan. Menurut Khun Wichitmatra (1928) dalam bukunya ‘*Lak Thai*’ seperti yang ditafsirkan oleh Jack Fong (2009) menegaskan narasi historis dan kultural nasionalisme Thai merupakan fondasi ideologi negara yang menekankan kesatuan bangsa, agama budhha, monarki dan bahasa Thai. Seperti kutipan dibawah:

Pro-royalists resurrected the primordial foundations that would eventually streamline the legitimation of King Bhumibol’s rule. Influences were provided by royalists such as Khun Whichitmatra. His work Lak Thai (1928) was a derivative discourse... to construct the Thais as a race. (Fong, 2009, p. 676)

Ideologi ‘*Lak Thai*’ diinstitutionalkan dalam wacana *Thainess* dan menegaskan pemilik tunggal hak-hak budaya dan politik adalah identitas Thai sehingga situasi ini menolak diversitas identitas lain kedalam kerangka negara Thailand (Fong J, 2009). Oleh karena itu aspirasi otonomi yang berbasis identitas Melayu dianggap melawan prinsip dasar ‘*Lak Thai*’ sehingga penolakan ini

menjadi bagian dari strategi negara menjaga keutuhan nasional dan kedaulatan politik Thailand.

Kelompok nasionalis yang terdiri dari pemerintah dan militer, partai pro-Thai serta organisasi masyarakat seperti *Village Scout* yang secara konsisten menyuarakan dukungan dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara melalui penguatan ideologi '*Lak Thai*'. Sebagai bentuk contoh dukungan kegiatan dalam organisasi *Village Scouts* yang berdiri pada 1972 mendapat dukungan langsung dari kerajaan Thailand dengan melakukan promosi persatuan nasional dan kesetiaan terhadap mornaki serta agama Budhha sebagai bagian dari gerakan konservatif pro-Lak Thai (Muecke, 1980). Kelompok nasionalis menentang setiap upaya yang berpotensi mengurangi kedaulatan nasional termasuk konflik separatisme dan aspirasi otonomi khusus di Thailand Selatan. Oleh karena itu, kelompok nasionalis '*Lak Thai*' menjadi salah satu faktor pemerintah menolak otonomi khusus di Thailand Selatan.

Dalam merespon konflik separatisme di Thailand Selatan, pemerintah Thailand cenderung mengedepankan pendekatan militeristik sebagai upaya untuk menekan gerakan separatis. Pendekatan ini tidak lepas dari pengaruh ideologi '*Lak Thai*' yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa berdasarkan identitas Thai sebagai satu-satunya identitas resmi negara Thailand (Hartati, 2018). Ideologi ini tidak hanya mendorong penolakan terhadap pengakuan identitas Muslim-Melayu namun juga menjadi dasar penolakan aspirasi otonomi khusus sebagai solusi perdamaian. Prinsip dasar dalam Lak Thai menempatkan identitas Thai sebagai satu-satunya identitas nasional yang sah sehingga segala bentuk pengakuan terhadap identitas lain dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara (Hartati, 2018). Kondisi ini telah menimbulkan ketidakpuasan yang semakin besar di kalangan masyarakat Muslim-Melayu. Mereka merasa terpinggirkan secara sosial, politik, budaya dan agama.

Ketegangan antara pemerintah Thailand dengan kelompok separatis terus berlanjut karena kurangnya ruang dialog yang setara dan inklusif. Hingga tahun 2025 konflik ini belum menemukan titik temu yang membawa ke dalam proses perdamaian. Hal ini dibuktikan dengan ketegangan hubungan antara pihak-pihak

yang terlibat. Kondisi ini dapat digambarkan dalam laporan data dari *Nation Thailand* (2025) sebagai berikut:

The ongoing unrest in Thailand's southern border provinces has resulted in: 5,936 fatalities (3,644 civilians and 2,292 state officials), 13,129 injuries (6,442 civilians and 6,687 state officials) 903 cases of permanent disability (465 civilians and 438 state officials). (Nation Thailand, 2025)

Konflik separatisme di Thailand Selatan telah menimbulkan dampak serius terhadap keamanan dan stabilitas nasional Thailand. Berdasarkan laporan *Nation Thailand*, Sejak pucaknya pada tahun 2004 hingga Januari 2025, konflik tersebut menyebabkan kematian lebih dari 5.936 dan 13.129 luka-luka. Korban dalam serangan ini mencakup warga sipil dan aparat negara serta diikuti hampir 10.000 insiden kekerasan. Dalam menanggapi konflik ini, pemerintah Thailand mengalokasikan total anggaran sebesar 510 Miliar baht sepanjang 2004-2025 untuk operasi militer di wilayah selatan dengan lebih dari 30 Miliar bath diantaranya digunakan pada tahun-tahun pasca konflik, misalnya serangan separatisme 2016 (Nation Thailand, 2025). Data ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang begitu besar mencerminkan pemerintah Thailand menilai konflik separatisme sebagai ancaman jangka panjang terhadap integrasi nasional Thailand. Selain itu, pendekatan militeristik yang dominan juga menunjukkan adanya ancaman serius bagi wilayah selatan karena upaya penyelesaian konflik seharusnya diiringi dengan penyelesaian konflik yang lebih komprehensif seperti dialog politik dan pembangunan sosial-ekonomi yang merata (Nation Thailand, 2025). Oleh karena itu, meskipun terdapat dana besar dari pemerintah Thailand namun konflik separatisme terus akan berlanjut karena tidak ada upaya penyelesaian akar masalah seperti mengurangi tindakan diskriminasi terhadap identitas minoritas dan kesenjangan sosial-ekonomi terhadap wilayah Thailand Selatan.

Penggunaan pendekatan militer ini mencerminkan keputusan strategis pemerintah untuk memprioritaskan keamanan melalui militer. Namun dominasi militer dalam penanganan konflik dipandang sebagai instrumen otoriter yang justru memperburuk situasi. Pendekatan ini memperbolehkan siklus kekerasan yang dapat mengancam keselamatan warga lokal sehingga memperdalam ketegangan dan merusak peluang dialog damai. Ketegangan yang berkelanjutan mencerminkan

kegagalan dalam menerapkan langkah pendekatan militer dan eksklusivisme identitas nasional dalam merespon konflik yang bersifat multidimensional yaitu etnis, agama dan tradisi budaya (Chalermripinyorat, 2020). Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma kebijakan yang lebih terbuka terhadap pluralitas identitas sebagai syarat menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan merupakan kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah *Public Consultations* yaitu sebuah forum negosiasi yang berdiri pada tahun 2013 di provinsi-provinsi Selatan (Pattani, Yala dan Narathiwat), melibatkan warga lokal Pattani termasuk tokoh agama, akademisi dan politisi untuk mendiskusikan persoalan pembangunan, agama, bahasa, hukum dan keamanan daerah (Berghof Foundation, 2024). Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam merespon isu-isu yang dihadapi masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan. Pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dinilai dapat membangun kepercayaan, memperkuat legitimasi kebijakan dan menciptakan solusi yang lebih adaptif.

Demikian, meskipun kekhawatiran terhadap otonomi khusus mungkin berakar dari pertimbangan ideologis dan keamanan nasional, pemerintah Thailand tetap perlu mengembangkan mekanisme keterlibatan yang demokratis. Hal tersebut menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan meminimalisir potensi radikalisme kelompok separatisme serta menciptakan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Thailand Selatan.

4.5.2 Otonomi Khusus dan Disintegrasi Nasional

Bagi kelompok nasionalis mencakup pemerintah, partai politik pro-Thai dan masyarakat lokal etnis Thai yang menganut ideologi '*Lak Thai*', konflik separatisme dianggap sebagai ancaman serius terhadap integrasi nasional (Hartati, 2018). Dalam konteks ini, integrasi nasional menjadi isu sentral yang sangat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah, termasuk keputusan untuk menolak

aspirasi otonomi khusus. Salah satu alasan utama penolakan ini adalah kekhawatiran bahwa pemberian otonomi yang lebih besar dapat membuka ruang bagi disintegrasi nasional (Ellianne & Justinar, 2022). Kekhawatiran ini muncul karena gerakan separatisme dianggap berpotensi mengganggu keutuhan negara dan melemahkan identitas nasional yang telah dibentuk melalui prinsip-prinsip ideologi 'Lak Thai'.

Secara historis, keberadaan kelompok separatis seperti BRN yang berjuang memisahkan diri dari Thailand menjadi bukti bahwa konflik ini memiliki akar yang bersifat berkelanjutan. Separatisme di Thailand tidak hanya bersifat lokal namun juga berhubungan dengan dinamika internasional yang mencakup isu-isu identitas etnis dan keagamaan (Ellianne & Justinar, 2022). Situasi ini memperkuat sikap skeptisme pemerintah terhadap pemberian otonomi khusus karena dianggap dapat membuka peluang intervensi asing dan memperkuat gerakan separatisme.

Pemberian otonomi khusus kepada wilayah berkonflik seperti Thailand Selatan seringkali dipandang oleh pemerintah Thailand sebagai kebijakan yang berisiko tinggi. Pemerintah Thailand khawatir bahwa pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah berkonflik justru akan memperburuk situasi dan membuka jalan pada fragmentasi wilayah berujung terhadap ancaman integrasi teritorial negara. Kekhawatiran ini mencerminkan persepsi bahwa otonomi dapat melemahkan kendali pusat dan memberikan peluang bagi aktor-aktor non-negara, termasuk kelompok ekstrimis untuk memperluas pengaruhnya dan meningkatkan potensi kekerasan di kawasan (Armawi & Wijatmoko, 2022). Melalui sudut pandang ini, otonomi bukan dipahami sebagai instrumen perdamaian namun sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Pemerintah Thailand menyakini bahwa penguatan otonomi lokal dapat menciptakan ruang kekuasaan yang akan dimanfaatkan oleh kelompok separatis yang lebih radikal dalam menentang legitimasi negara,

Pemerintah juga merasakan kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi yang menjadi faktor penting dalam penolakan otonomi khusus. Dari segi sosial, terdapat kekhawatiran bahwa otonomi dapat memperkuat pemisahan identitas antara komunitas Melayu-Muslim dan mayoritas Thai-Buddha yang berpotensi

memperdalam polarisasi sosial dan meningkatkan ketegangan antar kelompok etnis dan agama. Sementara itu, dari sisi ekonomi, pemberian otonomi khusus di khawatirkan akan melemahkan sistem faksial nasional karena adanya pembagian kewenangan anggaran dan kebijakan ekonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah (Mahakanjana, 2006). Dalam konteks ini, terdapat perasaan khawatir yang dialami oleh pemerintah pusat bahwa kelompok-kelompok tertentu mungkin akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang lain yang dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik akan berlanjut. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketidakpuasan kelompok separatisme terhadap pemerintah pusat seringkali berakar pada permasalahan ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kekurangan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan (Fathurachmi, 2014). Oleh karena itu, bagi pemerintah Thailand otonomi bukan hanya persoalan politik namun juga berimplikasi terhadap struktur sosial dan stabilitas ekonomi nasional yang lebih luas.

Di sisi lain, penolakan terhadap otonomi khusus jika tidak dikelola dengan baik akan berpotensi disintegrasi nasional yaitu perpecahan atau fregemntasi kesatuan negara. Kekhawatiran utama dalam pemberian otonomi adalah terbukanya ruang bagi kelompok separatis untuk memperluas tuntutan menuju kemerdekaan secara penuh. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengancam stabilitas dan keutuhan wilayah Thailand (Fathurachmi, 2014). Salah satu contoh yang menunjukkan otonomi khusus dapat memicu disintegrasi nasional yaitu tragedi kekerasan di Pattani pada 2004 hingga 2010 yang menunjukkan eskalasi drastis setelah serangkaian serangan mematikan yang dilakukan oleh kelompok separatis seperti BRN dan PULO. Oleh karena itu, Pemerintah Thailand penolakan terhadap aspirasi otonomi khusus di Thailand Selatan berpotensi memicu munculnya isu-isu yang berkaitan dengan keamanan nasional negara Thailand.

Salah satu alasan penguat penolakan otonomi khusus yang dianggap dapat memicu disintegrasi nasional yaitu adanya kebijakan *Rathaniyom*. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan khusus yang diciptakan guna mempertahankan integrasi nasional. Kebijakan *Rathaniyom* dirancang sebagai upaya negara dalam

membangun identitas nasional Thai sebagai identitas tunggal (Saari, 2023).

Kebijakan *Rathaniyom* terdiri dari 12 prinsip utama sebagai berikut;

- 1) Kesetiaan terhadap identitas Lak Thai (Bangsa, Agama dan Raja)
- 2) Penggunaan nama Thai sebagai identitas nasional
- 3) Bahasa Thai sebagai satu-satunya bahasa nasional
- 4) Penyeragaman budaya dan adat istiadat
- 5) Penerapan gaya hidup berdasarkan budaya Thai
- 6) Penggunaan pakaian modern Thai
- 7) Disiplin waktu dan etos kerja
- 8) Penguatan nasionalisme melalui simbol negara
- 9) Pengutamaan kepentingan nasional di atas identitas etnis atau agama
- 10) Modernisasi sistem pendidik berbasis identitas Thai
- 11) Sentralisasi administrasi pemerintah menyesuaikan struktur pemerintahan pusat
- 12) Pembentukan kesadaran akan identitas Thai sebagai identitas tunggal dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Dari 12 prinsip *Rathaniyom* diatas menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menargetkan aspek administratif politik saja namun juga mengelola dan menyeleraskan kehidupan sosial, budaya, pendidikan dan perekonomian masyarakat khususnya pada komunitas Muslim-Melayu di Thailand Selatan (Mohd, 1993)). Kebijakan *Rathaniyom* telah mendorong proses sentralisasi kekuasaan dan identitas Thai sebagai pusat politik dan budaya. Oleh karena itu, kebijakan *Rathaniyom* telah mengakibatkan terbatasnya ruang ekspresi bagi masyarakat Muslim-Melayu.

Berdasarkan penjelasan diatas penolakan pemerintah Thailand terhadap aspirasi otonomi khusus di Thailand Selatan berakar pada kekhawatiran pemerintah terhadap ancaman disintegrasi nasional. Ideologi *Lak Thai* dan kebijakan *Rathaniyom* menjadi pondasi utama dalam menjaga integrasi nasional budaya Thai (Saari, 2023). Penguatan identitas Thai ditunjukkan dalam upaya pemerintah dalam menyeleraskan penggunaan identitas Thai baik dalam segi sosial, politik maupun ekonomi. Seperti penggunaan bahasa Thai dalam beraktifitas, pengakuan identitas

nasional Thai secara Tunggal dan lain sebagainya. Bagi Pemerintah, otonomi khusus dianggap sebagai potensi ancaman yang dapat memperkuat separatisme dan melemahkan kendali pemerintahan pusat. Kondisi ini menunjukkan kebijakan integrasi nasional sangat bersifat sentralistik dan asimiatif (Saari, 2023). Meskipun kebijakan ini diciptakan guna untuk menjaga keutuhan negara namun kebijakan ini juga berpotensi memperpanjang konflik dan menghambat solusi perdamaian di wilayah Thailand Selatan.

BAB 5. KESIMPULAN

Skripsi ini berfokus pada separatisme di Thailand Selatan. Konflik tersebut belum menemukan solusi perdamaian disebabkan pemerintah Thailand menolak aspirasi otonomi khusus. Respon ini berdasarkan sikap nasionalisme Thailand yang kuat di kalangan pemerintah maupun masyarakat etnis Thai. Penolakan otonomi khusus dan upaya mempertahankan kebijakan siamisasi menyebabkan munculnya sikap *relative deprivation* di kalangan masyarakat Pattani sehingga memicu tindakan separatisme. Konflik ini belum menemukan titik temu dalam upaya perdamaian karena pemerintah Thailand berusaha mempertahankan kebijakan siamisasi sedangkan kelompok Muslim-Melayu menuntut otonomi khusus sebagai penyelesaian konflik. Fokus penelitian ini muncul dari *gap* penelitian mengenai alasan mendasar dibalik penolakan pemerintah Thailand terhadap otonomi khusus sebagai solusi perdamaian di Thailand Selatan. Dalam menganalisis persoalan ini, penulis menganalisa dengan kerangka teori yang meliputi kajian teori Konflik, Konsep Nasionalisme, Konsep Integrasi Nasional, Konsep Separatisme dan Konsep Otonomi Khusus.

Alasan penolakan pemerintah Thailand terhadap otonomi khusus didasarkan pada pertimbangan strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Pertama, otonomi khusus dianggap berpotensi mengancam identitas nasional Thailand dan melemahkan nasionalisme Thai sebagai pondasi integrasi nasional. Kedua, pemerintah Thailand khawatir bahwa pemberian otonomi khusus akan memicu disintegrasi nasional. Oleh karena itu, meskipun terdapat upaya mediasi seperti dialog dari pihak ketiga namun pemerintah Thailand masih memandang aspirasi otonomi khusus sebagai kebijakan yang belum menjamin perdamaian dan justru dianggap berpotensi memunculkan konflik serupa di wilayah Thailand lainnya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, A. (2018). Gerakan perlawanan Pattani United Liberation Organization. Digilib UIN Sunan Kalijaga.
- Abdullah, A. A. B. (2008). *Southern Thailand: Some grievances of the Patani Malays*. Journal of International Studies, 4, 102–111. <https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jis/article/view/7883> diakses pada 24 Januari 2026
- Abuza Zachary (2006), Strategic Perspectives 6 : The Ongoing Insurgency in Southern Thailand Trends in Violence, Counterinsurgency Operations, and the Impact of National Politics, Institute for National Strategic Studies, <https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-6.pdf>
- Aedasong, A., & Useng, N. (2024, January 1). *Social Capital and Implementation Effects: Participatory Action Research for Poverty Alleviation through the Earthworm Fertilizer Pilot Project, Mayo District, Pattani Province*. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/view/254715?utm_source=chatgpt.com
- Almas Taqqiya, (09 Juni 2022), Profil Haji Sulong, Pemimpin Muslim Pattani yang Diduga Dihilangkan Pemerintah Thailand, SindoNews, <https://international.sindonews.com/read/792775/40/profil-haji-sulong-pemimpin-muslim-Pattani-yang-diduga-dihilangkan-pemerintah-thailand-1654733176/10>
- Aphornsuvan Thanet, (2013, November 6). Reflections on the Peace Dialogue in Southern Thailand Between The NSC and BRN, Sasakawa Peace Foundation. Diakses 28 Juni 2025, dari https://www.spf.org/apbi/news_en/t_131106.html
- Bajoria, J., & Zissis, C. (2008, 10 September). *The Muslim insurgency in Southern Thailand*. Council on Foreign Relations. Diakses kemudian dari <https://www.cfr.org/backgrounder/muslim-insurgency-southern-thailand>
- Banpasirichote Wungaeo, C. (2014). The autonomy questions: Conflict transformation in the three southern border provinces. Dalam P. Luesakul (Ed.), *Colombia and Thailand: Geographical farness, thematic nearness* (hlm. 179–199). Bangkok: The Embassy of the Republic of Colombia dan Latin America Studies, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.
- Bangkok Post. (2013, Oktober 11). BRN clarifies five demands with security council. Bangkok Post. Diakses 28 Juni 2025, dari <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/368559/brn-clarifies-five-demands-with-security>

- Benedict Anderson (1983), *Imagined Communities "Reflection on the Origin and Spread of Nationalism"*, British Library, Verso London, ISBN--13 : 978-1-84467-086-4, ISSN—10 : 1-84467-086-4.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. doi:10.1191/1478088706qp063oa
- Bradley, F. R. (2013). Siam's conquest of Pattani and the end of Mandala relations, 1786–1838. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/290915179_Siam%27s_conquest_of_Pattani_and_the_end_of_Mandala_relations_1786-1838
- Bradley, F. R. (2021). Women, Violence, and Gender Dynamics during and after the Five Pattani-Siam Wars, 1785–1838. *Itinerario*, 45(3), 345–363. doi:10.1017/S0165115321000292
- Boonpiam, N. (1989). Anglo – Thai Relations, 1855-1909 : A Study in Changing of Foreign Policies. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 10(1), 18–27. retrieved from <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss/article/view/243875>
- Burke A, Tweedie P & Poocharoen O, *The contested corners of Asia: Subnational conflict and international development assistance (The Case of Southern Thailand)*. The Asia Foundation. <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2013/10/The-Contested-Corners-of-Asia-The-Case-of-Southern-Thailand.pdf> diakses pada 24 Januari 2026
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cederman, L., Wimmer, A., & Min, B., 2010. Why Do Ethnic Groups Rebel?: New Data and Analysis. *World Politics*, 62, pp. 119 - 87. <https://doi.org/10.1017/S0043887109990219>.
- Chalermpananupap, T. (2016). The last in a list of false starts: The MARA initiative for South Thailand 2015–2019. *The Kyoto Review of Southeast Asia*, (28). <https://kyotoreview.org/issue-28/the-last-in-a-list-of-false-starts-the-mara-initiative-for-south-thailand-2015-2019/>
- Chetae, A.; Fiadi, A. RUNTUHNYA KESULTANAN PATTANI DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT PATTANI PADA ABAD 20. *JAMBE* 2020, 2, 52-65.
- Cornell, S. (2002). Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective. *World Politics*, 54, 245 - 276. <https://doi.org/10.1353/WP.2002.0002>.

- Esteban, J., & Ray, D., 2011. A Model of Ethnic Conflict. *Journal of the European Economic Association*, 9, pp. 496-521. <https://doi.org/10.1111/J.1542-4774.2010.01016.X>.
- Failaq. (2023). Inovasi dan rekonstruksi undang-undang sektoral daerah untuk desentralisasi asimetris. *Matra Pembaruan*.
<https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.75-86>
- Fong, J. (2009). Sacred Nationalism: The Thai Monarchy and Primordial Nation Construction. *Journal of Contemporary Asia*, 39(4), 673–696.
<https://doi.org/10.1080/00472330903077030>
- Funston, J. (2008). Southern Thailand: The dynamics of conflict (Policy Studies No. 50). Washington, DC: East-West Center. ISBN: 978-981-230-888-7. Retrieved from <https://www.eastwestcenter.org/publications/southern-thailand-dynamics-conflict>
- Gur, R. T. (1970), *Why Men Is Rebel*, Perspectives on Violence and Politics: Ideologies, Utilities, and Communication, ISBN 13: 978-1-59451-913-0 (hbk), ISBN 13: 978-1-59451-914-7 (pbk)
- Haberkorn, T. (2024). Generative Constitutional Bricolage: From Thailand to Authoritarianism Elsewhere. *Law & Social Inquiry*, 49(4), 2583–2588. doi:10.1017/lsi.2024.42
- Hamzah, N. (2019). Gerakan pembebasan Islam Pattani di Thailand Selatan. *Tamaddun*, 20(2), 195-210.
- Human rights Watch, (August 27, 2007), No One Is Safe: Insurgent Attacks on Civilians in Thailand's Southern Border Provinces, <https://www.hrw.org/report/2007/08/27/no-one-safe/insurgent-attacks-civilians-thailands-southern-border-provinces>
- Husam Lamato, Sumarmo, Nurul Umamah (2017), The Role of Haji Sulong in Fighting Special Autonomy for Pattani Southern Thailand (1947-1954), *Jurnal Historica*, ISSN No. 2252-4673, Vol. 1, Issue 1.
- Hutchinson, J. (1987). *The dynamics of cultural nationalism: The Gaelic revival and the creation of the Irish nation state*. Allen & Unwin.
- Hutchinson, J. (1992). Moral Innovators and the Politics of Regeneration: the Distinctive Role of Cultural Nationalists in Nation-Building. *International Journal of Comparative Sociology*, 33(1-2), 101-117. <https://doi.org/10.1163/002071592X00077>
- Hutchinson, J. (1999). Re-interpreting cultural nationalism. *Australian Journal of Politics and History*, 45(3), 392–409. <https://doi.org/10.1111/1467-8497.00072>

- H. Rosidi Semail, (13 Januari 2016), Haji Sulong Sang Permata Pattani (1895-1954), Hidayatullah.com, <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2016/01/13/87332/haji-sulong-sang-permata-Pattani-1895-1954-1.html>
- International Crisis Group. (2009, December 8). Southern Thailand: Moving towards political solutions? (Asia Report No. 181). International Crisis Group. Retrieved from <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/thailand/southern-thailand-moving-towards-political-solutions>
- International Crisis Group* (08 Desember 2009). *181 Southern Thailand - Moving towards political solutions* (Asia Report No. 181). <https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/181-southern-thailand-moving-towards-political-solutions.pdf>
- International Crisis Group* (21 January 2020), Southern Thailand's Peace Dialogue: Giving Substance to Form. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/thailand/304-southern-thailands-peace-dialogue-giving-substance-form>
- Jinda, A. (2023). The Historical Manifestation of the 'Global Britain' narrative in Siam (1855-1925). วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(2), 359–376. <https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.43>
- Julio Castor Achmadi, (18 Oktober 2016), Sejarah Kelam Thailand dan Perjuangan Masyarakat Pattani, LBH Jakarta, <https://bantuanhukum.or.id/sejarah-kelam-thailand-dan-perjuangan-masyarakat-Pattani/>
- Jory, P. (2007). From "Melayu Pattani" to "Thai Muslim": The spectre of ethnic identity in Southern Thailand (ARI Working Paper No. 84). Asia Research Institute, National University of Singapore. https://ari.nus.edu.sg/publication/wps07_084/
- Karasa N, (2017), SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM NUSANTARA DI PATTANI THAILAND SELATAN (Studi Pemimpin Empat Sulthanah Abad 16-17 M), ISBN: 978-602-61550-4-7,
- Kusuma. (2017). Islam, asymmetric policy, and social conflict: The state's role as a root of radicalism in the Philippines and Thailand. *Ikat The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*. <https://doi.org/10.22146/ikat.v1i1.27467>
- Kornphetcharat, Kotchaphop (2025) "The Transformation of Thailand's Diplomatic Relations after the Bowring Treaty of 1855: From under the Chinese Diplomatic System to the Modern Diplomatic System," *Journal of Strategic and Global Studies*: Vol. 8: Iss. 1, Article 1. DOI: 10.7454/jsogs.v8i1.1158
- Leonard Binder (1964), *National Integration and Political Development*, *The American Political Science Review*, University Chicago.

- Mahakanjana, C. (2006). Decentralization, local government, and socio-political conflict in Southern Thailand (East-West Center Washington Working Papers No. 5). East-West Center. Retrieved from <https://www.eastwestcenter.org/publications/decentralization-local-government-and-socio-political-conflict-southern-thailand>
- Manan, Abdul (2022) The Expansion of Islam in Pattani, South Thailand: A Historical Analysis, Journal of Al-Tamaddun 17(1):85-95, DOI: [10.22452/JAT.vol17no1.7](https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no1.7)
- Mania (2019), Perkembangan Sosial Islam di Thailand, AL MA' ARIEF: JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA, Vol 1 No 1 2019,
- Malitz, D. M. (2022). A long-term view of Thai nationalisms: From royal to civic nationalism? ASIEN, 164/165 (July/October), 22–47. Retrieved from https://asien.asienforschung.de/wp-content/uploads/sites/6/2023/07/04_RA_Malitz_final.pdf
- Marc Weller & Stefan Wolff (2005), Autonomy Self-Governance and Conflict Resolution, Routledge- London, New York, ISBN 0-203-69241-1
- McCargo, D. (2014, April 23). *Southern Thailand: From conflict to negotiations?* Lowy Institute for International Policy. Diakses dari <https://www.lowyinstitute.org/publications/southern-thailand-conflict-negotiations>
- McDermott, G. (2014). The 2013 Kuala Lumpur talks: A step forward for Southern Thailand. Peace Research: The Canadian Journal of Peace and Conflict Studies, 46(1), 5–34. https://sg.docworkspace.com/d/sIKbmqvOcAvaR_sIG
- Melvin J Neil (2007), Conflict in Southern Thailand Islamism, Violence and the State in the Pattani Revolt, Stockholm International Peace Research Institute, ISSN-E 1652-0432. ISSN-P 1653-7548.
- Miller A. Michelle (2012), Autonomy and Armed Separatism in South and Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, ISBN 9978-981-4379-97-7 (soft cover) ISBN 9978-981-4379-98-4 (E-book PDF).
- Minority Rights Groups (2016-2018), Thailand: Empowering Thai Civil Society Organizations Representing Marginalised Communities In The Southern Border Provinces, <https://minorityrights.org/programmes/thailand-empowering-thai-civil-society-organizations-representing-marginalised-communities-in-the-southern-border-provinces/>
- Mohd. Zamberi A. Malek. (1993). *Umat Islam Patani: Sejarah dan politik*. Shah Alam: Hizbi.

- Muecke, M. A. (1980). The Village Scouts of Thailand. *Asian Survey*, 20(4), 407–427. <https://doi.org/10.2307/2643866>
- Muhammad Naufal Rabbani, (2023), Konflik Minoritas Muslim-Melayu di Selatan Thailand, Unairnews, <https://unair.ac.id/konflik-minoritas-melayu-muslim-di-selatan-thailand/#:~:text=Ia%20menjelaskan%20bahwa%20sikap%20dari,hingga%20saat%20ini%2C%E2%80%9D%20>
- National Library Board. (2025, January 13). Bowring Treaty signed with Bangkok. National Library Board, Singapore. Diakses 29 Juni 2025, dari <https://www.nlb.gov.sg/main/article-detail?cmsuuid=AE996879-BB92-4DAB-A62B-594824B803E6>
- National Statistical Office. (n.d.). *Statistical Yearbook Thailand 2024*. https://www.nso.go.th/public/e-book/Statistical-Yearbook/SYB-2024_webPage/Page_SYB_EN.html?utm_source=chatgpt.com
- Nilsen, M. (2012). *Negotiating Thainess: Religious and National Identities in Thailand's Southern Conflict*. Cornell University Press. <https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/3717246/2437291.pdf>
- Noor, F.A. (2019). Data-Gathering in Colonial Southeast Asia 1800-1900: Framing the Other. Amsterdam University Press. <https://muse.jhu.edu/book/71340>.
- Paik, C., & Vechbanyongratana, J. (2019). Path to Centralization and Development: Evidence from Siam. *World Politics*, 71, 289 - 331. <https://doi.org/10.1017/S0043887118000321>.
- Panjor, F. (2024). National security and political space for youth in Thailand's Deep South. *Asian Affairs: An American Review*, 51(3), 177–205. <https://doi.org/10.1080/00927678.2024.2336864>
- Puri, C. N., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 96–108. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.19717>
- Rachman, A. (2019). Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Menangani Isu Muslim Pattani di Thailand Selatan (2005–2015). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahayu, Supriati H., Taufik Nugroho, Muthmainnah Muthmainnah, Difla Nadjih, M. Parid, and Nur Alfian Bahem. “Problematika Integrasi Masyarakat Muslim-Thai Dalam Negara Thailand”. *Ulu mudin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (April 11, 2022): 119–132. Accessed June 29, 2025. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_Islam/article/view/1110.
- Rattanamanee Polkla, S., & Dubus, A. (2011). *Chapter Four. The South under Thaksin Shinawatra's governments (2001–2006)*. In *Policies of the Thai*

State towards the Malay Muslim South (1978–2010). Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine.
<https://doi.org/10.4000/books.irasec.860>

Rungrawee Chalermripinyorat (2020) Dialogue without negotiation: illiberal peace-building in Southern Thailand, *Conflict, Security & Development*, 20:1, 71-95, DOI:10.1080/14678802.2019.1705069

Robert G. Wirsing & Ehsan Ahrari (2005), *Fixing Fractured Nation: The Challenge of Ethnic Separation in The Asia Pacific*, Critical Studies of The Asia Pacific, ISBN 978-0-230-22896-2, ISSN 978-0-230-22897-9 (outside North America only).

Rogozhina, N. (2021). The Problem of the Deep South of Thailand – Separatism of the Malay Muslims. *Outlines of global transformations: politics, economics, law*. <https://doi.org/10.23932/2542-0240-2021-14-1-9>.

Saari, H. (2023). The marginalisation of Islam in Southern Thailand: Analysis of Thailand's (Siam's) government policy and conflict issues on the Pattani Islamic community. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 7(2), 13–23.

Sanurdi (2018), Islam di Thailand, TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM, Volume 10, Nomor 2, September 2018, 379-390. ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e) <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>

Saputri et al. (2021). Adaptasi dan interaksi mahasiswa Pattani (Thailand) dalam tinjauan komunikasi antar budaya di Lampung. *Jurnal Peurawi Media Kajian Komunikasi Islam*. <https://doi.org/10.22373/jp.v4i2.10949>

Setiarini. (2022). Budaya Muslim Melayu Pattani Thailand Selatan. Tsaqofah dan Tarikh *Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*.
<https://doi.org/10.29300/tjksi.v6i2.4440>

Shymonyak, A. (2014). Stronger than yesterday: the effect of ethnic conflict on ethnic identity. *The Eagle Feather*. <https://doi.org/10.12794/tef.2014.326>

Suciyani, S., & Mamaeng, F. (2024). Exploring Maqāṣid al-Sharī'ah in the OIC's Role in Addressing Muslim Minority Conflicts: A Case Study of Pattani, Thailand. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*.
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i1.8141>.

Subrahmanyam, A. (2018). The Unruly Past: History and Historiography of the 1932 Thai Revolution. *Journal of Contemporary Asia*, 50(1), 74–98.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1556319>

The Nation (25 Februari 2025), Two Decades of Southern Insurgency: 500 billion bath spent, nearly 10,000 attacks, *The Nation's News*,
<https://www.nationthailand.com/news/policy/40046661?utm>

- The southern Thai conflict six years on: insurgency, not just crime. (n.d.). *The Free Library*. (2014). Retrieved August 12, 2025, from <https://www.thefreelibrary.com/The+southern+Thai+conflict+six+years+on%3a+insurgency%2c+not+just+crime.-a0236631576>
- The World Bank (2011) , World Development Report ; Conflict, Security and Development.
- UNICEF East Asia and Pacific Regional Office (2014), Thailand Case Study in Education, Conflict and Social Cohesion, <https://www.slideshare.net/slideshow/pbea-thailand-case-study/41086922?utm>
- Waesahmae, P. (2012). The Organization of the Islamic Cooperation and the Conflict in Southern Thailand [Master's Thesis, Victoria University of Wellington]. https://openaccess.wgtn.ac.nz/articles/thesis/The_Organization_of_the_Islamic_Cooperation_and_the_Conflict_in_Southern_Thailand/16999402
- Wheeler, M., & Chambers, P. (2019). The Tragedy of Conflict Irresolution: Peace Dialogue in Southernmost Thailand under Military Rule. *International Studies Review*. <https://doi.org/10.16934/ISR.20.1.201906.25>.
- Winichakul, T. (2008). Nationalism and the Radical Intelligentsia in Thailand. *Third World Quarterly*, 29(3), 575–591. <https://doi.org/10.1080/01436590801931520>
- Wira Tahe, (2010), Perjuangan Politik Haji Sulong Di Pattani Thailand, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi.
- Woods, E. T. (2015). Cultural nationalism. *The State of Nationalism*. <https://stateofnationalism.eu/article/cultural-nationalism/>
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). SAGE Publications.
- Zaripova, A. and Zakirov, A. (2022). The separatist conflict. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 2257-2261. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.268>